

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN JATI DIRI  
MELALUI PROYEK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM  
(PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) MANDIRI  
DI PESISIR PANTAI UTARA KOTA TUBAN  
(Studi Kasus di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten  
Tuban)**

**SKRIPSI**

Oleh

**WAHYU HIDAYATI**

**0710450027 - 45**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS PERTANIAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN  
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN  
MALANG  
2011**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN JATI DIRI  
MELALUI PROYEK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM  
(PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) MANDIRI  
DI PESISIR PANTAI UTARA KOTA TUBAN  
(Studi Kasus di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten  
Tuban)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Oleh

**WAHYU HIDAYATI**

**0710450027 - 45**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pertanian Strata Satu (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS PERTANIAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN  
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN  
MALANG  
2011**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN JATI DIRI  
MELALUI PROYEK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM  
(PROGRAM NASIONAL PEMBERDYAAN MASYARAKAT) MANDIRI  
DI PESISIR PANTAI UTARA KOTA TUBAN  
(Studi Kasus di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten  
Tuban)**

Oleh :

Nama : Wahyu Hidayati  
Nim : 0710450027  
Program Studi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

**Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS**  
**NIP. 19540705 198103 2 003**

Mengetahui  
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,

**Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS.**  
**NIP. 19530715 198103 1 006**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, Juni 2011

---

WAHYU HIDATATI

**Judul Skripsi** : **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN JATI DIRI MELALUI PROYEK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM (PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) MANDIRI DI PESISIR PANTAI UTARA KOTA TUBAN (Kasus di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban)**

**Nama Mahasiswi** : **WAHYU HIDAYATI**

**NIM** : **0710450027- 45**

**Jurusan** : **SOSIAL EKONOMI PERTANIAN**

**Menyetujui** : **Dosen Pembimbing**

Pembimbing Utama

**Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS**  
**NIP. 19540705 198103 2 003**

Mengetahui  
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,

**Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS.**  
**NIP. 19530715 198103 1 006**

Tanggal Persetujuan : .....

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Mengesahkan**

**MAJELIS PENGUJI**

Penguji I

Penguji II

**Dr. Ir. Yayuk Yulianti, MS**  
**NIP. 19540705 198103 2 003**

**Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesni, MS**  
**NIP. 19560226 198103 2 002**

Penguji III

**Prof. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS**  
**NIP. 19550626 198003 1 004**

Tanggal Lulus : .....



**LEMBAR PENGESAHAN**

**Mengesahkan**

**MAJELIS PENGUJI**

Penguji I

Penguji II

**Dr. Ir. Yayuk Yulianti, MS**  
**NIP. 19540705 198103 2 003**

**Prof. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS**  
**NIP. 19550626 198003 1 004**



Penguji III

**Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS**  
**NIP. 19560226 198103 2 002**

Tanggal Lulus : .....



**Skripsi ini kupersembahkan untuk Kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan dukungan, my sister tersayang, teman- teman PKP 07, dan teman- teman UB, serta orang- orang yang berada disampingku yang selalu memberikan dukungan dan doanya.**

**Tak akan pernah ada perubahan tanpa keberanian untuk memncoba, ingin memperbaiki kualitas diri dan dapat mendapatkan yang terbaik adalah keinginanKu, oleh karena itu ingin ku persiapkan diri sebaik mungkin untuk orang yang yang terbaik yang akan mendapingiku dan orang - orang tercinta yang ada disekitar Ku. Terimakasih ya Allah atas jalan yang telah Kau atur sedikian rupa untukKu.**



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



## RINGKASAN

**Wahyu Hidayati (0710450027 – 45) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN JATI DIRI MELALUI PROYEK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI DI PESISIR PANTAI UTARA KOTA TUBAN (Studi Kasus di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban) Dibawah bimbingan: Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS.**

---

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan antitesis dari konsep pembangunan (*development*). Pada dasarnya konsep pembangunan lebih mencerminkan model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat *top down*, sedangkan pemberdayaan lebih bersifat *bottom up* yang berbasis pada kepentingan yang dibutuhkan masyarakat (Kusnadi, 1985). Pada saat ini perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan jati dirinya terbukti dengan banyaknya memperoleh kesempatan untuk berkiprah di berbagai sektor pertanian maupun industri dan dipercaya untuk mengambil keputusan. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.556.363 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 118.048.783 jiwa dan laki-laki sebesar 119.507.580 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan dalam pembangunan. Begitu pula di Desa Sobontoro jumlah penduduk perempuan perlu dioptimalisasikan untuk meningkatkan pembangunan desa dan peningkatan jati diri terhadap perempuan. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan yaitu mengikut sertakan ibu-ibu rumah tangga dalam proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri berupa pemberian modal usaha, untuk kegiatan usaha misalnya dagang, peternakan, pertanian, dan nelayan. Penelitian ini bertujuan: 1) Mendeskripsikan proses Pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri. 2) Menganalisis dampak pelaksanaan Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri terhadap peningkatan jati diri perempuan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Teknik penentuan responden dengan sensus yaitu dengan mengambil seluruh anggota Proyek SPP PNPM Mandiri. Metode pengambilan data menggunakan wawancara terstruktur, wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data untuk menjawab tujuan pertama digunakan analisis deskriptif. Sedangkan untuk menjawab tujuan kedua dalam penelitian ini digunakan analisis gender dengan menggunakan analisis Harvard.

Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri di desa Sobontoro sudah dilaksanakan dengan baik selama 2 periode yakni periode tahun 2009 – 2010 dan periode tahun 2010 – 2011. Dalam pelaksanaannya Proyek SPP PNPM Mandiri di desa Sobontoro meliputi: ‘tahap perencanaan’ yang terdiri dari MAD Sosialisasi, Musdes Sosialisasi, Pelatihan KPMD, penggalangan gagasan, MPK, Musdes perencanaan, penulisan usulan desa, verifikasi usulan oleh kecamatan, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan proposal, musdes informasi hasil MAD, dan pengesahan dokumen SPPB. ‘Tahap pelaksanaan’ yang terdiri dari persiapan pelaksanaan berupa rakor desa, pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri di desa Sobontoro, musdes pertanggungjawaban, dokumentasi kegiatan, dan penyelesaian Proyek SPP PNPM Mandiri. Untuk tahap terakhir yakni ‘tahap monitoring dan

evaluasi'. Tahap monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pembayaran tiap 1 bulan yang dapat dipantau dari buku kas kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri.

2. Peningkatan jati diri perempuan ditinjau dari analisis Harvard yang meliputi aspek aktivitas, aspek akses, aspek kontrol, dan aspek manfaat di Desa Sobontoro melalui proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNMP Mandiri mengalami peningkatan walaupun belum terlalu tinggi. Hal ini disebabkan karena proyek SPP PNPM Mandiri baru berjalan hampir 2 tahun di Desa Sobontoro. Selama proyek SPP PNPM Mandiri berjalan aspek aktivitas mengalami peningkatan yaitu dari dominan pria menjadi dilakukan bersama, peningkatan aspek dalam memperoleh akses, peningkatan aspek dalam pengambilan keputusan atau kontrol, dan aspek manfaat yang dapat dirasakan secara bersama untuk pemenuhan kebutuhan keluarga seperti biaya kesehatan dan biaya sekolah sedangkan peningkatan jati diri, pengalaman, dan keterampilan hanya dirasakan oleh perempuan. dalam peningkatan jati diri perempuan terjadi peningkatan pada dua aspek terpenting yakni aspek memperoleh kemudahan dalam akses (aspek akses) dan aspek pengambilan keputusan (aspek kontrol). Kedua aspek tersebut mempunyai peran penting dalam peningkatan jati diri perempuan karena hakikat jati diri perempuan adalah pemahaman perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol dalam setiap aktivitasnya.

Setelah melakukan penelitian di Desa Sobontoro, ada beberapa saran yang ditawarkan oleh peneliti, diantaranya:

**Saran Akademis:**

- 1) Untuk peneliti yang tertarik meneliti di Desa Sobontoro di sarankan untuk melakukan penelitian mengenai peran pelaku pendamping terhadap peningkatan jati perempuan, penelitian mengenai evaluasi proyek SPP PNPM Mandiri atau evaluasi program PNPM Mandiri di Desa Sobontoro.

**Saran Praktis:**

1. Pelaksanaan pemberian dana dari Proyek SPP PNPM Mandiri dapat menyentuh seluruh perempuan di Desa Sobontoro, agar semua perempuan dapat merasakan manfaat dari SPP PNPM Mandiri.
2. Koordinasi dan pendekatan kepada seluruh anggota baik dari pemerintah kecamatan, desa, dan pengurus kelompok proyek SPP PNPM Mandiri lebih di tingkatkan dari jamaah tahlil dan pertemuan PKK yang sudah baik di Desa Sobontoro untuk lebih ditingkatkan lagi agar menjaga kerukunan dan mengetahui kendala dan masalah satu sama lain antar anggota SPP PNPM Mandiri dalam hal pembayaran angsuran pinjaman dana.
3. Proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro perlu ditingkatkan dan diperpanjang masa periodenya agar tercapai peningkatan jati diri perempuan di Desa Sobontoro
4. Monitoring dan evaluasi oleh pemerintah kecamatan tidak cukup hanya 1bulan sekali, akan tetapi perlu adanya terjun langsung dari aparat pemerintah untuk melihat kondisi lapang dari proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro.

## SUMMARY

**Wahyu Hidayati (0710450027 – 45) WOMEN EMPOWERMENT IN IMPROVING SELF-IDENTITY THROUGH SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PROJECT OF PNPM MANDIRI IN NORTH COASTAL AREA OF TUBAN TOWN (case study in Sobontoro village, Tambakboyo subdistrict, Tuban regency) supervisor: Dr. Ir. Yayuk Yuliati, Ms.**

---

*Empowerment* is an antithesis of the development concept. Basically, development concept itself reflects more to planning model and top down policy implementation. Meanwhile, empowerment tends to be *bottom up* character which is based on what people needs (Kusnadi, 1985). Recently, women have opportunity to improve their self-identity by knowing the fact that many of them have got change to deal with any kinds of agriculture sector and also any industry sector activities. Here, they have right and responsibility to make decision.

According to BPS data of 2010, the number of Indonesia citizen reaches 237.556.363 people, which contain 118.048.783 women and 119.507.580 men. It shows that there is potential opportunity for women to be involved in national development. That is the same as what happen in Sobontoro village, the number of women also needs to be optimized to improve the development and its women self-identity in this area. It can be done by joining housewife in Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Project of PNPM Mandiri. In this project, every woman will get financial capital aid in order to built business in trading, livestock, agriculture, and fishing.

This research is intended to: 1) describe the implementation process of women empowerment through Simpan Pinjam Perempuan (SPP) project of PNPM Mandiri. And, 2) analyze the effect of Simpan Pinjam Perempuan (SPP) project of PNPM Mandiri implementation toward women's self-identity empowerment.

The design of the research is descriptive research. The subject of the research is determined by having purposive sampling; that is located in Sobontoro village, Tambakboyo subdistrict, Tuban regency. The respondent determination technique is by having census that involves all the members of SPP project of PNPM Mandiri. Data collection method uses structured interview, in-depth interview, observation, and documentation. Data analysis technique to answer the first objective of the research is by using descriptive analysis. On the other side, to answer the second objective of the research, the researcher uses gender analysis of Harvard.

The results of the study will be described as follows:

1. The implementation of SPP project of PNPM Mandiri in Sobontoro village has been held well within 2 periods; 2009 – 2010 period and 2010 – 2011 period. They include planning stage which consists of MAD socialization, Musdes socialization, KPMD training, digging information, MPK, Musdes planning, village proposal writing, proposal verification by district government, MAD proposal priority, MAD proposal deciding, musdes information result of MAD, and SPPB document validation. Then, 'implementing stage' consists of preparation of the implementation in the form of village coordination meeting, SPP project implementation of PNPM Mandiri in Sobontoro village, musdes responsibility report, documentation, and accomplishment of SPP project of PNPM Mandiri. The last stage is monitoring and evaluation stage. It is done by giving monthly payment which can be monitored from SPP project cash book of PNPM Mandiri.

2. Women's self-identity improvement based on Harvard analysis which included activities, access, control and beneficial aspects in Sobontoro village through Mandiri woman saving and loan (SPP) PNPM project was increased in no significant rate. This might be caused the project was only 2 years in implementation. After running the project, the aspect of activity rise from men-dominated to be done together, the increase in aspect in obtaining access, improved aspect in decision-making or control, and aspects of the benefits that can be felt together to meet family needs such as health costs and school fees and increased identity women, experience, and skills that are particularly felt by women. In the improvement of women self-identity there's improvement on the two important aspects which is aspect of obtaining the ease of access and decision making aspects. Both aspects become important aspects in the improvement of women self-identity because the basic of women self-identity is an understanding of women to gain access and control in every activity.

Having research in Sobontoro village, there are some suggestions proposed by the researcher:

**Academic Suggestion:**

- 1) the next research will be on subject facilitator roles to woman self-identity improvement, needs to evaluate SPP project of PNPM Mandiri or evaluation PNPM Mandiri program in Sobontoro village .

**Practical Suggestions:**

- 1) the implementation of SPP project of PNPM Mandiri by giving monetary fund aid can be given to the whole number of women in Sobontoro village so all women may get benefit of SPP project of PNPM Mandiri.
- 2) Coordination and approach towards all the member from district government, village, and administrator of SPP project of PNPM Mandiri is more improved from jamaah tahlil and PKK meeting in Sobontoro village. They are all needed to be increased in order to keep harmony among people and know the obstacles and problems of one another. In this case, the problem is on the installment payment of fund loan.
- 3) SPP project of PNPM Mandiri in Sobontoro village can be improved and developed in the future, and be lengthen in its period to reach the goal to improve women's self-identity in Sobontoro village.
- 4) Monitoring and evaluation for the district government is not merely held once in a month but direct observation to know the real condition of SPP project of PNPM Mandiri Sobontoro village is considered much better.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayahNya telah menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “*Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Jati Diri Melalui Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Di Pesisir Pantai Utara Kota Tuban (Studi Kasus Di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban)*”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya, kepada :

1. Dr. Ir. Yayuk Yuliati, Ms selaku dosen pembimbing skripsi atas segala kesabaran, nasihat, arahan, dan bimbingannya kepada penulis.
2. Drs. Mukhamad Mahmud Mm, selaku pak Camat Kecamatan Tambakboyo yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukannya
3. Drs. Zaenal Abidin selaku ketua pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri di kecamatan Tambakboyo yang telah banyak membantu dan mengarahkan.
4. Bapak Nur Cholis selaku Kepala Desa Sobontoro atas segala bantuannya
5. Bapak Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
6. Ibu, Ayah dan Kakak yang senantiasa memberikakan dukungan dan doanya yang tak pernah lelah kepada penulis.
7. Teman- teman PKP 07 atas segala bantuan, motivasi dan semangat kebersamaannya.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu kritik saran yang cerdas yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis sebagai perbaikan, mudah-mudahan tulisan ini dapat berguna bagi kita semua Amin.

Malang, Mei 2011

Penulis

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Madiun pada tanggal 06 November 1989 sebagai putri bungsu dari dua bersaudara dari Bapak Wiroso dan Ibu Sri Suhartini. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 01 Sobontoro Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban pada tahun 1995 sampai tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SLTPN 01 Tambakboyo Kabupaten Tuban pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Pada tahun 2004 sampai tahun 2007 penulis studi di SMU N 01 Tambakboyo Kabupaten Tuban. Dan pada tahun 2007 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 Program Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Brawijaya, Malang melalui jalur SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru)

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi asisten praktikum Mata Kuliah Sosiologi Pertanian tahun , 2008- 2009, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Agribisnis tahun 2009- 2010. Penulis tercatat sebagai Anggota PERMASETA, menjadi Badan Pengawas Organisasi PERMASETA tahun 2008-2009, ikut dalam Kepanitiaan Pelatihan Durian Montong dalam Mata Kuliah Manajemen Pelatihan, ikut serta dalam kepanitiaan Rasta PERMASETA tahun 2007 dan pernah ikut lomba Penulisan Karya tulis Mahasiswa (PKM) dan PMW tahun 2009 dan 2010 dengan judul Mie Aloe vera atau MiLove.

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN</b> .....	i
<b>SUMMARY</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Gender.....	4
2.1.1 Pengertian Gender.....	4
2.1.2 Teori- Teori Gender.....	6
2.1.3 Pemberdayaan dalam perseptif kesetaraan gender.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis Pemberdayaan.....	9
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan.....	9
2.2.2 Proses Pemberdayaan.....	13
2.2.3 Konsep Pemberdayaan Perempuan.....	14
2.2.4 Indikator Keberdayaan.....	16
2.3 Tinjauan Jati Diri.....	17
2.3.1 Konsep Jati Diri.....	17
2.3.2 Perkembangan Jati Diri.....	19
2.3.3 Jenis – Jenis Jati Diri.....	22
2.3.4 Faktor - Faktor Jati Diri.....	23
2.4 Tinjauan PNPM Mandiri.....	24
2.4.1 Pengertian PNPM Mandiri.....	24
2.4.2 Visi, Misi dan Tujuan PNPM Mandiri.....	25
2.4.3 Ruang Lingkup Program PNPM Mandiri.....	26
2.4.4 Komponen Program dalam PNPM Mandiri.....	27
2.4.5 Startegi PNPM Mandiri.....	28
2.4.6 Prinsip Dasar PNPM Mandiri.....	29
2.4.7 Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri.....	30



**III. KERANGKA PEMIKIRAN**

3.1 Kerangka Pemikiran.....	32
3.2 Batasan Masalah .....	36
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	36
3.4.1 Definisi Operasional .....	36
3.4.2 Pengukuran Variabel.....	37

**IV. METODE PENELITIAN**

4.1 Jenis Penelitian .....	41
4.2 Teknik Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
4.3 Teknik Penentuan Informan .....	42
4.4 Teknik Pengambilan Data .....	42
4.5 Teknik Analisis Data .....	43
4.5.1 Analisis Deskriptif.....	43
4.5.2 Analisis Gender (Analisis Harvard) .....	44

**V. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

5.1 Keadaan Geografis Lokasi Penelitian .....	46
5.1.1 Keadaan Sumber Daya Manusia Desa Sobontoro .....	47
5.1.2 Keadaan Sumber Daya Buatan di Desa Sobontoro.....	47
5.1.3 Keadaan Sumber Daya Manusia di Desa Sobontoro .....	49
1. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia.....	49
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	50
3. Berdasarkan Mata Pencapaian .....	51
4. Berdasarkan Tingkat kesejahteraan .....	51
5.1.4 Keadaan Pertanian Desa Sobontoro.....	52
1. Distribusi Penggunaan Lahan Pertanian .....	52
2. Tingkat Kesuburan Tanah dan Penggunaan Lahan Pertanian .....	53
3. Keadaan Pertanian Berdasarkan Pola Tanam .....	54
5.2 Keadaan Kelembagaan di Desa Sobontoro.....	55
5.2.1 Kelembagaan Sosial .....	55
1. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) .....	55
2. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) .....	55
3. Jamaah Tahlil .....	56
5.2.2 Kelembagaan Ekonomi .....	56
1. Gapoktan Tani maju.....	56
2. Kelompok Tani .....	56
5.3 Keadaan Program-Program Pembangunan Desa di Desa Sobontoro ...	57
5.3.1 Bidang Sosial dan Ekonomi.....	57
5.3.2 Bidang Pendidikan .....	58
5.3.3 Bidang Sarana dan Prasarana .....	58

## VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Deskripsi Informan.....	59
6.1.1 Umur Informan Anggota Proyek SPP PNP Mandiri Desa Sobontoro .....	59
6.1.2 Jenis Pekerjaan Responden dan Key Informan Anggota Proyek SPP PNP Mandiri Desa Sobontoro .....	59
6.1.3 Pendidikan Responden dan Key Informan Anggota Proyek SPP PNP Mandiri Desa Sobontoro .....	61
6.1.4 Luas pekarangan yang dimiliki Responden dan Key Informan Anggota Proyek SPP PNP Mandiri Desa Sobontoro .....	63
6.2 Proses Pelaksanaan Proyek SPP PNP Mandiri .....	64
6.2.1 Tahap Perencanaan.....	69
6.2.2 Tahap Pelaksanaan .....	86
6.2.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi .....	91
6.3 Analisis Gender dalam Peningkatan Jati diri Perempuan Melalui proyek SPP PNP Mandiri .....	97
6.3.1 Analisis Aktivitas perempuan Anggota Proyek SPP PNP Mandiri .....	97
6.3.2 Analisis Akses perempuan Anggota Proyek SPP PNP Mandiri .....	112
6.3.3 Analisis Kontrol perempuan Anggota Proyek SPP PNP Mandiri .....	117
6.3.4 Analisis Manfaat perempuan Anggota Proyek SPP PNP Mandiri .....	126

## VII. PENUTUP

7.1 Kesimpulan .....	132
7.2 Saran .....	133
7.2.1 Saran Akademis .....	133
7.2.2 Saran Praktis .....	133

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
Tabel 1	Tahapan Pemberdayaan Knowledge, attitudes, practice dengan pendekatan aspek afektif, psikomotorik dan konatif .....	13
Tabel 2	Variabel Proses Pelaksanaan Program SPP PNPM Mandiri .....	37
Tabel 3	Indikator dan Skor Jati Diri anggota Rumah Tangga Perempuan Dalam Mengikuti program SPP PNPM Mandiri .....	39
Tabel 4	Keadaan Curah Hujan dan Ketinggian Tempat Desa Sobontoro .....	47
Tabel 5	Sarana dan Prasarana di Desa Sobontoro .....	48
Tabel 6	Jumlah Penduduk Laki – Laki dan Perempuan Desa Sobontoro .....	49
Tabel 7	Jumlah Penduduk Desa Sobontoro Menurut Usia .....	49
Tabel 8	Pertumbuhan Penduduk Desa Sobontoro Tahun 2009 – 2010.....	50
Tabel 9	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban Tahun 2010 .....	50
Tabel 10	Mata Pencarian Penduduk Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban .....	51
Tabel 11	Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban .....	52
Tabel 12	Distribusi Penggunaan Lahan Pertanian .....	52
Tabel 13	Tingkat Kesuburan Tanah Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban .....	53
Tabel 14	Potensi sektor Pertanian di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban .....	53
Tabel 15	Umur Informan Anggota Proyek SPP PNPM Mandiri .....	59
Tabel 16	Jenis Pekerjaan Anggota Proyek SPP PNPM Mandiri .....	60
Tabel 17	Tingkat Pendidikan informan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri .....	62
Tabel 18	Luas Pekarangan yang Dimiliki Informan Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri .....	63
Tabel 19	Aspek Akses Antara Laki – Laki (Suami) dan Perempuan (Istri) Dalam Proyek SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro .....	112
Tabel 20	Aspek Kontrol Antara Laki – Laki (Suami) dan Perempuan (Istri) Dalam Proyek SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro .....	119
Tabel 21	Aspek Akses Antara Laki – Laki (Suami) dan Perempuan (Istri) Dalam Proyek SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro .....	128

## DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Jati Diri Melalui Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Di Pesisir Pantai Utara Kota Tuban. ....	35
Gambar 2	Pola Tanam 1 di Desa Sobontoro .....	54
Gambar 3	Pola Tanam 2 di Desa Sobontoro .....	54
Gambar 4	Pola Tanam 3 di Desa Sobontoro .....	54
Gambar 5	Struktur Proyek SPP PNPM Mandiri .....	66
Gambar 6	Aspek Aktivitas Anggota SPP pada Aktivitas Produktif (Persiapan Dan Pelaksanaan – Pertanian) Sebelum Proyek SPP PNPM Mandiri .....	101
Gambar 7	Aspek Aktivitas Anggota SPP pada Aktivitas Produktif (Persiapan Dan Pelaksanaan – Pertanian) Sesudah Proyek SPP PNPM Mandiri .....	102
Gambar 8	Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada produktif (Persiapan dan Pelaksanaan- Perlayan dan Perdagangan) Sebelum Proyek SPP PNPM- MP .....	103
Gambar 9	Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada produktif (Persiapan dan Pelaksanaan- Perlayan dan Perdagangan) Sesudah Proyek SPP PNPM- MP .....	104
Gambar 10	Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Persiapan dan pelaksanaan – Penjahit) sebelum Proyek SPP PNPM- MP .....	105
Gambar 11	Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Persiapan dan pelaksanaan – Penjahit) sesudah Proyek SPP PNPM- MP .....	105
Gambar 12	Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Pengolahan & Pemasaran) Sebelum Proyek SPP PNPM – MP .....	106
Gambar 13	Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Pengolahan & Pemasaran) Sesudah Proyek SPP PNPM – MP .....	107
Gambar 14	Aspek Aktivitas Anggota SPP pada Aktivitas Reproduksi Sebelum Proyek SPP PNPM- MP .....	108
Gambar 15	Aspek Aktivitas Anggota SPP pada Aktivitas Reproduksi Sesudah Proyek SPP PNPM- MP .....	108
Gambar 16	Aspek Aktivitas Anggota SPP pada Aktivitas Sosial Sebelum Proyek SPP PNPM – MP .....	109
Gambar 17	Aspek Aktivitas Anggota SPP pada Aktivitas Sosial Sesudah Proyek SPP PNPM – MP .....	109
Gambar 18	Aspek Akses Anggota SPP Sebelum Proyek SPP PNPM- MP.....	114
Gambar 19	Aspek Akses Anggota SPP Sesudah Proyek SPP PNPM- MP .....	114
Gambar 20	Aspek kontrol Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif Sebelum Proyek SPP PNPM – MP .....	121

Gambar 21 Aspek Kontrol Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif Sesudah  
 Proyek SPP PNPM – MP ..... 121

Gambar 22 Aspek Kontrol Anggota SPP pada Aktivitas Reproduksi  
 Sebelum Proyek SPP PNPM- MP ..... 123

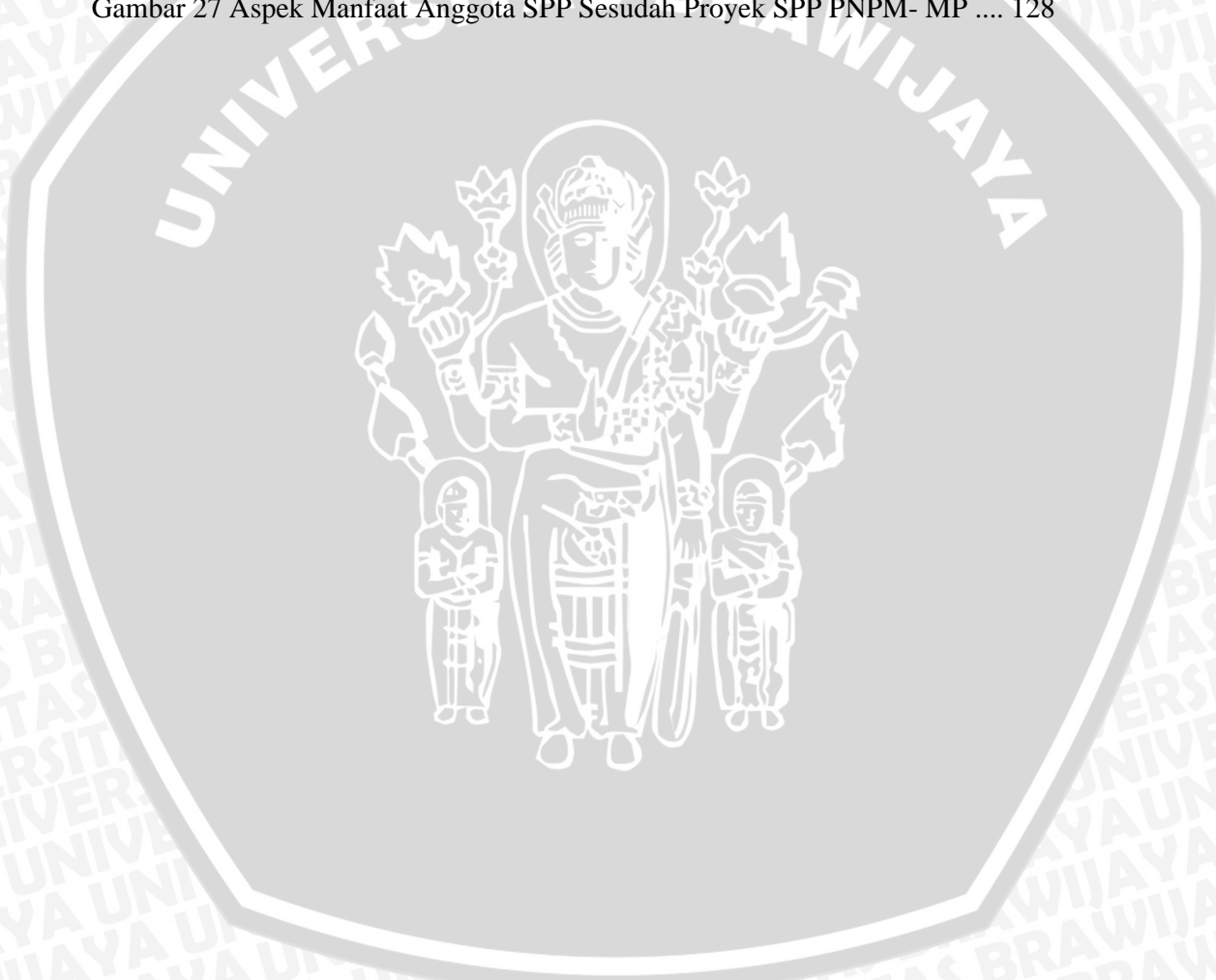
Gambar 23 Aspek Kontrol Anggota SPP pada Aktivitas Reproduksi  
 Sesudah Proyek SPP PNPM- MP ..... 123

Gambar 24 Aspek Kontrol Anggota SPP pada Aktivitas Sosial Sebelum  
 Proyek SPP PNPM- MP ..... 125

Gambar 25 Aspek Kontrol Anggota SPP pada Aktivitas Sosial Sesudah  
 Proyek SPP PNPM- MP ..... 125

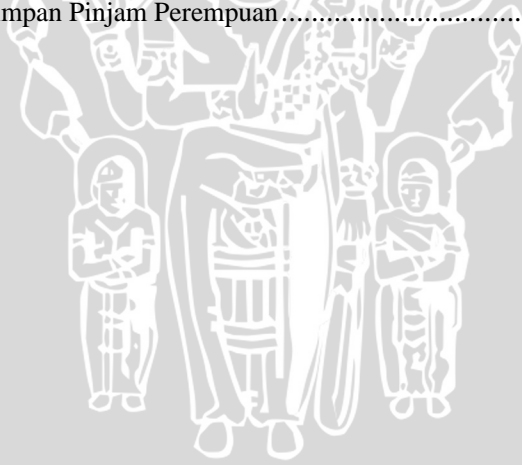
Gambar 26 Aspek Manfaat Anggota SPP Sebelum Proyek SPP PNPM- MP ... 128

Gambar 27 Aspek Manfaat Anggota SPP Sesudah Proyek SPP PNPM- MP .... 128



**DAFTAR LAMPIRAN**

No	Teks	Halaman
Lampiran 1	Peta Desa Sobontoro .....	
Lampiran 2	Daftar Pemanfaat Pinjaman SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro .....	
Lampiran 3	Foto Musyawarah Antar Desa Sosialisasi .....	
Lampiran 4	Aturan dan Sanksi SPP PNPM Mandiri .....	
Lampiran 5	Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan .....	
Lampiran 6	Berita Acara MKP.....	
Lampiran 7	Foto Verivikasi SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro .....	
Lampiran 8	Surat Pernyataan Tanggung Renteng.....	
Lampiran 9	Surat Pernyataan Kesanggupan Menabung dalam SPP PNPM-MP .....	
Lampiran 10	Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) .....	
Lampiran 11	Foto Proses Pencairan Dana SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro ....	
Lampiran 12	Foto Proses Monitoring dan Evaluasi SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro .....	
Lampiran 13	Kegiatan Aktivitas Produktif dan Reproduksi Perempuan Anggota Proyek SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro.....	
Lampiran 14	Usaha Anggota SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro.....	
Lampiran 15	Aspek Aktivitas Antara Perempuan (Istri) dan Laki – laki (Suami) dalam Proyek Simpan Pinjam Perempuan.....	



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan antitesis dari konsep pembangunan (*development*). Pada dasarnya konsep pembangunan lebih mencerminkan model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat *top down*, sedangkan pemberdayaan lebih bersifat *bottom up* yang berbasis pada kepentingan yang dibutuhkan masyarakat. (Kusnadi, 1985). Pembangunan cukup intensif dilakukan di negara- negara sedang berkembang, misalnya Indonesia untuk mengejar atau menyejajarkan dengan negara lainnya. Sehingga isu pemberdayaan merupakan wacana publik ketika kebijakan pembangunan kurang memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh warga masyarakat.

Konsep pemberdayaan sangat tepat diterapkan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, yang sarasanya adalah sumberdaya manusia. Sumber daya manusia disini yang ingin dioptimalisasikan dalam pemberdayaan adalah perempuan. Telah banyak studi yang membahas mengenai peranan perempuan. Perempuan memiliki peranan ganda yakni sebagai ibu rumah tangga maupun juga bersama- sama suami untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan perekonomian dalam rumah tangga.

Gender tidak hanya sekedar merujuk pada perbedaan biologis semata tetapi juga pada perbedaan perilaku, sifat, ciri- ciri khas yang dimiliki laki- laki dan perempuan. Gender lebih jauh lagi merujuk pada peranan dan hubungan antara laki- laki dengan perempuan. Pada saat ini perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan jati dirinya terbukti dengan banyaknya memperoleh kesempatan untuk berkiprah di berbagai sektor pertanian maupun industri dan dipercaya untuk mengambil keputusan. Pada tahun 2010 menurut data dari BPS Tuban (2010) jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.556.363 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 118.048.783 jiwa dan laki - laki sebesar 119.507.580 jiwa. Sehingga Sajogyo (1983), menegaskan bahwa memperhatikan dan mengikutsertakan perempuan untuk berpartisipasi dalam



pembangunan merupakan hal yang penting. Tindakan ini bukanlah suatu tindakan berperikemanusiaan belaka tetapi dapat dikatakan bahwa dengan mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan adalah suatu tindakan yang efisien, sehingga tidak terjadi pemborosan sumberdaya manusia dengan melibatkan perempuan dalam pemberdayaan.

Banyaknya jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan dalam pembangunan. Begitu pula di Desa Sobontoro jumlah penduduk perempuan perlu dioptimalisasikan untuk meningkatkan pembangunan desa dan peningkatan jati diri terhadap perempuan. Perempuan dahulunya cenderung dimarginalisasikan peranan dan jati dirinya dalam rumah tangga maupun masyarakat oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan perempuan yang dapat meningkatkan potensi, peranan, dan jati diri perempuan.

Pemberdayaan terhadap perempuan merupakan salah satu hal yang penting bagi ibu rumah tangga untuk meningkatkan jati dirinya dengan cara mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan yaitu mengikut sertakan ibu- ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dalam proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri berupa pemberian modal usaha, untuk kegiatan usaha misalnya dagang, peternakan, pertanian, dan nelayan.

Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri merupakan program nasional yang terdapat didalam program PNPM Mandiri dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program pemberian bantuan modal untuk usaha yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Kelompok sasaran proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri adalah: masyarakat miskin di perdesaan, kelembagaan masyarakat di perdesaan, dan kelembagaan pemerintah lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui proses pelaksanaan proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri dan dampak dari pelaksanaan proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri terhadap

peningkatan jati diri perempuan di Desa Sobontoro. Sehingga dengan demikian perempuan dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?
2. Bagaimanakah dampak pelaksanaan proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri terhadap peningkatan jati diri perempuan?

### **1.3 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan proses Pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri.
2. Menganalisis dampak pelaksanaan proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri terhadap peningkatan jati diri perempuan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari Penelitian ini, untuk:

1. Bagi peneliti, peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi mengenai proses pemberdayaan perempuan dalam PNPM- Mandiri di Desa Sobontoro, dan memperoleh pengalaman baru saat melakukan penelitian.
2. Bagi Perempuan (Ibu- Ibu Rumah Tangga) di Desa Sobontoro untuk dapat lebih mengetahui seberapa besar dampak dari pelaksanaan proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam peningkatan jati diri perempuan di Desa Sobontoro.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan terutama dalam pemberdayaan perempuan.
4. Bagi teman- teman mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi ketika mahasiswa akan melakukan penelitian yang sejenis.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teoritis Gender

#### 2.1.1 Pengertian Gender

Menurut (Monser, 1995) berkembangnya emansipasi pada perempuan merupakan usaha melepaskan diri dari peranan perempuan yang terbatas dalam sistem kekerabatan untuk mendapatkan pengakuan status baru, sesuai dengan jaman baru, dalam keluarga maupun dalam masyarakat besar, sehingga diferensiasi peranan antara perempuan dan laki- laki tidak begitu besar atau mencapai kesetaraan.

Menurut John M Echols dan Hassan Sadhily dalam Monser (1995) gender berasal dari kata dalam bahasa inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki- laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai tingkah laku. Menurut (Monser, 1995) dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki- laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Di dalam buku *sex and gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips dalam Fakhri (1995) mengartikan gender sebagai harapan- harapan budaya terhadap laki- laki dan perempuan. Misalnya saja perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara lelaki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri- ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat diperlukan misalnya ada laki- laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat- sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Menurut Wijaya (1994) menyebutkan konsepsi gender “mengacu pada pengertian bahwa dilahirkan sebagai laki- laki atau perempuan keberadaannya berbeda dalam waktu, tempat, kultur bangsa maupun peradapan”. Dijelaskan bahwa “gender merupakan interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin dan hubungan laki- laki dan perempuan”

Menurut Heddy Shri Ahimsha Putra yang dikutip dari buku karangan Wijaya (1994) secara historis, konsep gender pertama sekali dibedakan oleh sosiolog asal Inggris yaitu Ann Oakley yaitu ia membedakan antara gender dan seks. Perbedaan seks berarti perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis yaitu yang menyangkut prokreasi (menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui). Perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan seks tetapi tidak selalu identik dengannya. Jadi kelihatan di sini gender lebih mengarah kepada simbol-simbol sosial yang diberikan pada suatu masyarakat tertentu. Sebagai contoh kalau untuk bayi perempuan yang baru lahir diberikan perlengkapan dengan nuansa merah jambu sedangkan bayi laki-laki yang lahir diberikan perlengkapan dengan nuansa warna biru muda. Perbedaan itu juga pada pola pengasuhan dan pola permainan. Anak perempuan diberikan mainan boneka dan permainan yang berisiko rendah, sedangkan anak laki-laki diberikan permainan mobil-mobilan, tembak-tembakan dengan risiko yang tinggi. Hal ini terus berlanjut sampai kepada pertumbuhan mereka sampai dewasa. Pada norma yang berlaku sangat tegas sekali perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki. Pada satu sisi perbedaan itu memberikan kondisi yang merugikan pada diri kaum perempuan akan tetapi hal itu juga merugikan kepada kaum laki-laki walaupun relatif sangat kecil.

Gender adalah pembedaan peran, perilaku, perangai laki-laki dan perempuan oleh budaya atau masyarakat melalui interpretasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Jadi gender, tidak diperoleh sejak lahir tapi dikenal melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa anak-anak hingga dewasa. Oleh karena itu, gender dapat disesuaikan dan diubah. Setiap masyarakat mengembangkan identitas gender yang berbeda, tetapi kebanyakan masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan dengan maskulin dan feminim. Maskulin identik dengan keperkasaan, bergelut di sektor publik, jantan dan agresif. Sedangkan feminim identik dengan lemah lembut, berkutat di sektor domestik (rumah), pesolek, pasif, dan lain-lain. Disebabkan oleh pembedaan yang tugas terhadap peran laki-laki dan perempuan yang selama ini terjadi didukung oleh

budaya patriarkhi yang sangat mendominasi menyebabkan ketimpangan gender itu terjadi. Di dalam kehidupan sosial muncul stereotip tertentu terhadap laki-laki dan perempuan. Padahal gender ini sifatnya netral dan tidak memihak. Peran laki-laki dan perempuan sangat ditentukan dari suku, tempat, umur, pendidikan serta perkembangan zaman. Selama ini yang terjadi adalah bias gender yang berpihak kepada laki-laki.

### 2.1.2 Teori Gender

Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya tiga aliran atau teori yaitu :

#### 1. *Teori Nurture*

Dalam penelitian Widodo (2003) teori nurture merupakan perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu terabaikan dan tertinggal peran serta konstruksi dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis dan perempuan sebagai protelar.

#### 2. *Teori Nature*

Dalam penelitian Widodo (2003) Menurut teori ini perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bias karena memang berbeda secara kodrat alamiah. Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri. Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing.

### 3. Teori Equilibrium

Dalam penelitian Widodo (2003) Disamping kedua aliran tersebut, terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki- laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum laki- laki dan perempuan, karena keduanya harus dapat bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

#### 2.1.3 Pemberdayaan Dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender menurut Tan (1995) adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki- laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki- laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah konstektual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal.

Menurut Tan (1995) Konsep gender berkembang sejak tahun 1970an karena dalam kalangan yang berkecimpung dengan masalah kaum perempuan, terdapat ketidakpuasan dengan konsep perempuan dalam pembangunan (*women in development atau WID*), yang pada dasarnya melihat kaum perempuan terpisah dari kaum laki- laki. Pendekatan perempuan dalam pembangunan WID menekankan persamaan hak dan akses untuk perempuan dan laki- laki, tetapi ternyata pendekatan ini tidak berhasil mencapai keadilan gender dan dunia advokasi. Pendekatan WID kurang memperhatikan hakikat hubungan sosial yang mendasari sub- ordinasi kaum perempuan. Dengan demikian, perlu untuk membuat perbedaan antara jenis kelamin yang bersifat biologi, dan gender yang bersifat sosial.

Menurut Fasih (1995) konsep jenis kelamin atau seks, melihat perbedaan antara perempuan dan laki- laki semata- mata dari segi biologis, pria rata- rata tinggi, berotot, dan berambut di tubuh dan muka (kumis, jenggot). Sedangkan perempuan memiliki pinggul yang lebih lebar daripada pria, tidak berbahu lebar,

mempunyai buah dada, dan tubuhnya lebih berlemak. Jenis kelamin secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sebagai ketentuan kodrat. Berdasarkan hasil penelitian Soeseno dan Sarwono (1995) pengetahuan tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagian besar responden berpendapat kondisi biologis, kodrat dan jenis kelamin perempuan, disamping martabat dan harkat perempuan sebagai sumber penyebab terjadinya perlakuan dan praktek- praktek yang bersifat diskriminatif.

Menurut Tan (1995) konsep gender muncul dan berkembang karena adanya ketidakpuasan dengan konsep jenis kelamin atau seks yang hanya menggambarkan laki- laki dan perempuan semata- mata dari segi biologis. Dengan meningkatnya kesadaran bahwa peran perempuan perlu dilihat dalam konteks masyarakat, dan dalam hubungan dengan kaum laki- laki, para perencana dan praktisi mengemukakan pendekatan gender dan pembangunan (*Gender And Development atau GAD*) sebagai konsep, strategi, dan perencanaan yang lebih tepat. Konsep gender merupakan konsep sosial budaya yang digunakan untuk menggambarkan peran, fungsi, dan perilaku laki- laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Konsep ini merujuk kepada pemahaman bahwa identitas, peran, fungsi, pola perilaku, kegiatan dan persepsi baik tentang perempuan maupun laki- laki ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Dengan demikian, penggambaran perempuan dan laki- laki berakar dalam kebudayaan, dan bukan berdasarkan aspek biologis saja.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan pria. Akan tetapi, dalam kenyataan perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan bagi laki- laki dan terutama perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan politik, stree tipe, diskriminasi, dan kekerasan.



## 2.2 Tinjauan Teoritis Pemberdayaan

### 2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Sulistiyani (2004) menjelaskan secara rinci mengenai arti ‘pemberdayaan’ secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata ‘daya’ yang berarti ‘kekuatan atau kemampuan’. Sehingga ‘pemberdayaan’ dapat diartikan sebagai sebuah proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Menurut Suharto (2005) pemberdayaan mengacu pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan kebebasan dalam kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan, (b) mengajukan sumber produktif yang memungkinkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang masyarakat perlukan, (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi masyarakat.

Menurut Fatterman (1996) dan Brown (1994) dalam buku Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam pembangunan yang berlangsung secara dinamis dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.

Pemberdayaan masyarakat berarti mengembangkan kemampuan masyarakat agar berdiri sendiri, memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Jadi, pemberdayaan adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mengambil keputusan secara bebas dan mandiri (Kartasasmita, 1995). Pemberdayaan

masyarakat didefinisikan sebagai upaya memberdaya atau kekuatan kepada rakyat. Bentuk jenis dan cara pemberdayaan rakyat sangatlah beraneka ragam. Salah satu upaya itu terwujud adanya kemauan untuk mengubah struktur masyarakat yang selama ini berlaku.

Menurut Kartasasmita (1995) konsep pemberdayaan masyarakat mengikuti dua strategi yaitu :

1. Memberi peluang agar sektor dan masyarakat modern dapat tetap maju. Kemajuan sektor dan masyarakat modern ini diperlukan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan.
2. Memperdayakan sektor ekonomi dan lapangan rakyat yang masih tertinggal dan hidup di luar atau pinggiran jalur kehidupan modern, memberdayakan artinya memampukan dan mendirikan lapisan masyarakat dan ini dapat dilakukan melalui tiga jurus yaitu :
  1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi lapisan masyarakat itu berkembang, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki lapisan masyarakat agar berupaya untuk mengembangkannya.
  2. Memperkuat potensi dan daya yang mereka miliki misalnya membuka akses pada berbagai peluang yang akan membuat mereka semakin berdaya dan penyediaan berbagai masukan (akses dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya).
  3. Mengembangkan perlindungan bagi si lemah, bukti pemihakan mereka, mencegah persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Adapun prinsip pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang bermuatan pada peningkatan kemampuan dalam proses pengkajian kesadaran serta pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan sampai pada pemberian penilaian dan koreksi terhadap kegiatan yang berlangsung, dengan kata lain masyarakat memiliki akses (peluang) dan kontrol (kemampuan memberikan keputusan dan memilih) terhadap berbagai keadaan

yang terjadi disepular kehidupannya. Dengan demikian mereka bias mengurangi ketergantungan terhadap bantuan orang lain, terutama bila bantuan itu bersifat merugikan (melemahkan posisi masyarakat atau petani).

Ife dalam Suharto (2005) mengatakan pemberdayaan memuat 2 pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. *Pilihan personal dan kesempatan- kesempatan hidup*: kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
2. *Pendefisian kebutuhan*: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan apresiasi dan keinginannya.
3. *Ide atau gagasan*: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. *Lembaga- lembaga*: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata- parnata masyarakat, seperti kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan
5. *Sumber- sumber*: kemampuan mobilisasi sumber- sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.
6. *Aktivitas ekonomi*: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
7. *Reproduksi*: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Menurut Payne dikutip dalam buku karangan Adi (2003) mengatakan proses pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya adalah *to help gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal block to exercing power, by increasing capacity and self confidence to use power and transferring power form the environment to clients*. Shardlow dalam Adi (2003) mengartikan ‘pemberdayaan’ pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol

kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka atau masyarakat.

Robinson (1994) dalam Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Paul (1987) dalam Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa 'pemberdayaan' berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil- hasil pembangunan.

Mac Ardle (1989) dalam Sulistiyani (2004) mengartikan 'pemberdayaan' sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh orang- orang dan secara konsekuen melaksanakan keputusan itu. Orang- orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Berkembangnya pengertian pemberdayaan dari kalangan peneliti, menyebabkan tidak adanya pengertian baku dari pemberdayaan itu sendiri, Prijono dan Pranarka dalam Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti, pengertian pertama yaitu *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Disisi lain pemaknaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Pernyataan tersebut berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat dalam Sulistiyani (2004) menyampaikan pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment* dan istilah tersebut benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi 'daya' bukan 'kekuasaan'. *Empowerment* dalam khasanah barat lebih bernuansa 'pemberian kekuasaan' daripada 'pemberdayaan'

itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah *energize* atau katakan ‘memberi *energy*’. Pemberdayaan adalah memberikan energi agar yang bersangkutan mampu untuk mencapai tujuan baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

### 2.2.2 Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan mengarah kepada tercapainya suatu tujuan dan tidak berlangsung selamanya, tetapi pemberdayaan akan berlangsung sampai masyarakat mampu untuk mandiri dan ketika dilepas kembali masyarakat tidak akan terjatuh atau menjadi tidak mandiri. Sebagai suatu proses, Sulistiyani (2004) mengemukakan bahwa pemberdayaan memiliki tahapan atau proses, sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan. Proses dimana merubah perilaku menuju perilaku peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi. Merupakan proses dimana terjadi penambahan kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan intelektual. Proses dimana terjadi penambahan kecakapan dan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

**Tabel. 1** Tahapan Pemberdayaan *Knowledge, Attitudes, Practice* dengan Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik, dan Konatif

No	Tahapan Afektif	Tahapan Kognitif	Tahapan Psikomotorik	Tahapan Konatif
1	Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki keterampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
2	Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai keterampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
3	Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan keterampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
4	Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi	Memperkaya variasi keterampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber : Sulistiyani (2004)

Tahap penyadaran merupakan tahap persiapan didalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pemberdaya, aktor, atau pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diinvestasi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan kesadaran akan menyadarkan masyarakat akan kondisinya dan akan merangsang mereka agar menyadari bahwa kondisi tersebut perlu diperbaiki.

Tahap kedua atau tahap transformasi yaitu proses transformasi pengetahuan kecakapan atau keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika kondisi pertama terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimuli terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan atau keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, akan tetapi belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga, merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan mandiri. Kemampuan tersebut ditandai dengan kemampuan masyarakat membentuk inisiatif, yang melahirkan kreasi dan inovasi dalam lingkungannya. Dalam konsep pembangunan masyarakat jika ketiga tahap tercapai, masyarakat ditempatkan pada subyek pembangunan sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

### **2.2.3 Konsep Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan menurut Widuri (2006) adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik serta sosial budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan

percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan pada jati dirinya. Fakta menunjukkan, bahwa posisi perempuan Indonesia mengalami ketertinggalan dalam kesetaraan.

Pemberdayaan perempuan sangatlah penting. Hal itu terutama, karena perlu dihargainya hak asasi sebagai perempuan, dikembangkannya kesetaraan dan keadilan gender, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan sosial politik dan ekonomi yang seimbang serta perlunya pembangunan sosial budaya yang non diskriminatif.

Keberhasilan pemberdayaan perempuan bukanlah dengan satu-satunya indikator perempuan harus bekerja di luar rumah tetapi perempuan harus menjadi perempuan yang mandiri, bisa mendampingi suami, mampu mendidik anak dengan wawasannya yang luas dan penuh nilai-nilai pendidikan. Kalau ia berkariier ia mampu menjalankan peran keduanya dengan seimbang. Akan sangat ideal jika perempuan bisa meraih prestasi karier karena kemampuan intelektualnya.

Kondisi inilah yang akan diubah dengan cara-cara yang terencana, terarah dan terpadu melalui peningkatan kualitas perempuan serta adanya lembaga yang mampu dalam jajaran pemerintah maupun dalam masyarakat (LSM). Agar tercipta lingkungan sosial budaya yang lebih mendukung bagi kemajuan perempuan, diperlukan upaya antara lain:

1. Penyesuaian sistem struktur pranata sosial budaya, ekonomi politik dan HANKAM serta penyesuaian dan jaminan norma hukum peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Keluarga sebagai wahana utama dalam pembinaan keluarga harus dapat mengubah sikap, perilaku serta pandangan tradisional yang kurang menguntungkan bagi peranan dan tugas perempuan.
3. Dalam mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, peran ganda laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan

masyarakat, bangsa dan negara merupakan faktor penting untuk disadari, diwujudkan dan dikembangkan.

4. Memasyarakatkan konsep kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, dengan mewujudkan perilaku saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan serta saling membantu dan saling peduli.
5. Terintegrasikan wawasan kemitrasejajaran di dalam proses perencanaan pembangunan (evaluasi, analisis situasi, penyusunan proyek proposal dan keluarannya, tercapai pada setiap perencanaan pembangunan).

#### **2.2.4 Indikator Keberdayaan**

Untuk mengetahui fokus dan tujuan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat pemberdayaan, dan kemampuan kultur dan politis, dalam Suharto (2005), dijelaskan ada 8 indikator keberdayaan, antara lain:

1. Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, kerumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang- barang kebutuhan keluarga sehari- hari (beras, minyak tanah, gas, minyak goreng, dan bumbu dapur), kebutuhan dirinya (sabun, sampho, minyak wangi, bedak, dll). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia membeli barang- barang tersebut dengan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang- barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, Koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti hal diatas point tinggi



diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih bila ia membeli barang- barang tersebut dengan uangnya sendiri.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga, yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan- keputusan keluarga, Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, dan kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga yaitu responden ditanya mengenai ‘apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa meminta izinnya, yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja dirumah’.
6. Keadaan hukum dan politik, yaitu mengetahui nama salah satu pegawai pemerintah desa atau kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah, dan hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes, yaitu seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, yaitu memiliki rumah, tanah, asset produksi, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek- aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

## 2.3 Tinjauan Jati Diri

### 2.3.1 Konsep Jati Diri

Jati diri menurut Anggara (2009) merupakan identitas dari seseorang yang mewakili dari sifat dan perilaku orang tersebut. ‘Jati’ memiliki pengertian ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda, identitas atau yang mungkin lebih tepat disebut inti. Sedangkan ‘Diri adalah orang seorang (terpisah

dari yang lainnya) badan. Jadi kesimpulannya, 'Jati Diri' adalah identitas atau inti kehidupan dari seseorang.

Jati diri menurut Soedarsono (2004) menyatakan bahwa jati diri merupakan sifat dasar manusia, dari kita yang asli, asli dari Tuhan. Jati diri ada yang dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan dan ada yang bersifat genetik yakni bawaan sejak lahir. Dengan jati diri merupakan identitas atau karakter yang dimiliki seseorang yang bersifat khas atau unik.

Pemahaman dan kesadaran jati diri manusia diawali dengan asumsi tentang konsep dasar manusia yang dalam susunan kodrat, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga, dalam sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dan dalam kedudukan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Konsep dasar sebagai makhluk monopluralistik inilah jati diri kita manusia Indonesia digerakkan dan diarahkan perwujudannya. Secara kodrati, konsep dasar yang demikian akan selalu di upayakan agar segera terbentuk, karena menghilangkan salah satu diantara sifat kodrat, kedudukan kodrat dan susunan kodrat tersebut justru hanya akan melahirkan manusia yang tidak utuh sebagai manusia. Itulah proses menjadi *becoming* manusia diarahkan demi tercapainya kualitas kemanusiaan yang monopluralistik. Dalam konteks pencapaian kualitas tersebut, proses pendidikan dan pembelajaran menjadi aktivitas yang sangat penting dan menentukan. Proses-proses ini akan menentukan pembentukan wujud dari identitas kemanusiaan. Dengan demikian, wujud identitas manusia tidak hanya bersifat kodrati, melainkan harus ada upaya sistematis, terencana dan terukur untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana dijelaskan, pada dasarnya manusia memiliki dua kutub yang berbeda dan berseberangan. Yang satu kutub yang mengarah pada potensi kebaikan (unsur positif yang berkembang), satunya berpotensi pada keburukan (unsur negatif yang berkembang). Terwujudnya kedua potensi ini tergantung dari bagaimana manusia berupaya mengembangkan yang satu (positif) dan mengendalikan yang kedua (negatif). Kesalahan berproses dapat saja yang

terwujud adalah sebaliknya, unsur negatif lebih dominan terbentuk daripada unsur positif. Menjadi wajar ketika dalam kenyataannya, selalu terjadi perbedaan antara fakta dan nilai, antara yang seharusnya dan yang senyatanya. Kesenjangan antara keduanya selalu menjadi fakta dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat berkeyakinan bahwa proses pendidikan dijalankan agar terlahir manusia yang *integrated*, yakni yang cerdas dan bermoral. Capaian intelektual akademis yang baik seiring dengan moralitas dan ahlak yang terpuji. Meskipun disadari situasi paradoks justru seringkali terlahir dengan terlahirnya keluaran pendidikan (*oknum*) yang tercela dan berkarakter buruk. Paradoks ini juga terlihat dari fenomena beragama kita saat ini yang ternyata juga melahirkan dua hal yang berbarengan antara kesalehan dan kedzoliman. Terlihat saleh secara publik, tapi berperilaku korup dan serakah secara sembunyi-sembunyi.

Di lain pihak, sebagai makhluk berbudaya, manusia menciptakan kebudayaan dalam rangka mengembangkan potensi kemanusiaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kebudayaan adalah proses realisasi insaniyah manusia agar tercipta nilai dan pranata budaya ideal yang diinginkan. Proses berbudaya dilakukan agar peradaban manusia menjadi lebih beradab. Dalam kenyataannya, sebagian dari kita gagal mendorong, mengubah dan mengembangkan dirinya menjadi makhluk berbudaya dan beradab. Yang terlahir justru manusia biadab di tengah kebudayaan yang beradab. Meskipun secara intelektual cerdas dan beradab, tapi justru memiliki perilaku buruk yang mereduksi makna kemanusiaan yang beradab.

### **2.3.2. Perkembangan Jati Diri**

Jati diri menurut Centi (1993) yang dimiliki manusia tidak terbentuk secara instan melainkan dengan proses belajar sepanjang hidup manusia. Jati diri berasal dan berkembang sejalan pertumbuhannya, terutama akibat dari hubungan individu dengan individu lainnya. Menurut Calhoun dan Acocella (1990) Ketika individu lahir, individu tidak memiliki pengetahuan tentang dirinya, tidak

memiliki harapan - harapan yang ingin dicapainya serta tidak memiliki penilaian terhadap diri sendiri. Namun seiring dengan berjalannya waktu individu mulai bias membedakan antara dirinya, orang lain dan benda- benda di sekitarnya dan pada akhirnya individu mulai mengetahui siapa dirinya, apa yang diinginkan serta dapat melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri.

Menurut Willey dalam Calhoun dan Acocella (1990) perkembangan jati diri yang digunakan sebagai sumber pokok informasi adalah interaksi individu dengan orang lain. Baldwin dan Holmes dalam Calhoun dan Acocella (1990) juga mengatakan bahwa jati diri adalah hasil belajar individu melalui hubungannya dengan orang lain. Yang dimaksud dengan “orang lain” menurut Calhoun dan Acocella (1990) adalah:

1. Orang Tua

Orang tua adalah kontak sosial yang awal yang dialami oleh seseorang dan yang paling kuat. Informasi yang diberikan orang tua kepada anaknya lebih menancap dari pada informasi yang diberikan orang lain dan berlangsung hingga dewasa. Coopersmith dalam Calhoun dan Acocella (1990) mengatakan bahwa anak- anak yang tidak memiliki orang tua, disia - siakan oleh orang tua akan memperoleh kesukaran dalam mendapatkan informasi tentang dirinya sehingga hal ini akan menjadi penyebab utama anak memiliki jati diri yang cenderung negatif.

2. Teman Sebaya

Teman sebaya mempengaruhi jati diri. Peran yang diukur dalam kelompok sebaya sangat berpengaruh terhadap pandangan individu mengenai dirinya sendiri.

3. Masyarakat

Masyarakat sangat mementingkan fakta- fakta yang ada pada seorang anak, seperti siapa bapaknya, ras, dll sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap jati diri yang dimiliki seseorang individu.

Kemudian Argy dalam Hardy dan Heyes (1985) mengatakan bahwa perkembangan jati diri dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

1. Reaksi dari orang lain

Cooley dalam Hardy dan Heyes (1985) membuktikan bahwa dengan mengamati pencerminan perilaku diri sendiri terhadap respon yang diberikan oleh orang lain maka individu dapat mempelajari dirinya sendiri. Orang-orang yang memiliki arti pada diri individu (*significant other*) sangat berpengaruh dalam pembentukan jati diri.

2. Perbandingan dengan orang lain

Jati diri yang dimiliki individu sangat tergantung kepada bagaimana cara individu membandingkan dirinya dengan orang lain.

3. Peranan individu

Setiap individu memainkan peranan yang berbeda-beda dan pada setiap peran tersebut individu diharapkan akan melakukan perbuatan dengan cara-cara tertentu pula. Harapan-harapan dan pengalaman yang berkaitan dengan peran yang berbeda-beda berpengaruh terhadap jati diri seseorang. Menurut Kuhn dalam Hardy dan Hayes (1985) sejalan dengan pertumbuhannya individu akan menggabungkan lebih banyak peran ke dalam jati dirinya.

4. Identifikasi terhadap orang lain

Kalau seorang anak mengagumi seorang dewasa, maka anak seringkali mencoba menjadi pengikut orang dewasa tersebut dengan cara meniru beberapa nilai keyakinan dan perbuatan. Proses identifikasi tersebut menyebabkan individu merasakan bahwa dirinya telah memiliki beberapa sifat yang dikaguminya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa individu tidak lahir dengan jati diri. Jati diri terbentuk seiring dengan pertumbuhan manusia melalui proses belajar. Sumber informasi dalam perkembangan jati diri adalah interaksi individu dengan orang lain yaitu orang tua, teman sebaya dan masyarakat. Proses belajar yang dilakukan individu dalam pembentukan jati diri diperoleh dengan melihat reaksi-reaksi orang lain terhadap perbuatan yang

dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan orang lain, memenuhi harapan orang lain atas peran yang dimainkannya dan melakukan identifikasi terhadap orang yang dikaguminya.

### 2.3.3. Jenis- jenis Jati Diri

Menurut Calhoun dan Acocella (1990) perkembangan jati diri terbagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Jati Diri Positif

Jati diri positif lebih kepada penerimaan diri bukan sebagai suatu kebanggaan yang besar tentang diri. Jati diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang memiliki jati diri positif adalah individu yang tahu betul tentang dirinya, dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam- macam tentang dirinya sendiri, evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima keberadaan orang lain. Individu yang memiliki jati diri akan merancang tujuan- tujuan yang sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan besar untuk dapat dicapai, mampu menghadapi kehidupan didepannya serta menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan.

Kesimpulannya, individu yang memiliki jati diri positif adalah individu yang tahu betul siapa dirinya sehingga dirinya menerima segala kelebihan dan kekurangan, evaluasi terhadap dirinya menjadi lebih positif serta mampu merancang tujuan- tujuan sesuai dengan realitas.

#### 2. Jati Diri Negatif

Calhoun dan Acocella (1990) membagi jati diri negative menjadi dua tipe, yaitu:

- a. Pandangan individu tentang dirinya sendiri benar- benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri. Individu tersebut benar- benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan kelemahannya atau yang dihargai dalam kehidupannya.

- b. Pandangan tentang dirinya terlalu stabil dan teratur. Hal ini biasa terjadi karena individu dididik dengan cara yang sangat keras, sehingga cenderung tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari seperangkat hukum yang dalam pikirannya merupakan cara hidup yang tepat.

Jadi, individu yang memiliki jati diri yang negative terdiri dari dua tipe, yaitu *tipe pertama* individu yang tidak tahu siapa dirinya dan tidak mengetahui kelebihan dan kekurangannya, sedangkan *tipe kedua* individu yang memandang dirinya sangat teratur dan stabil.

#### 2.3.4. Faktor- Faktor Jati Diri

Menurut Calhoun & Acocella (1990) jati diri merupakan gambaran mental yang dimiliki oleh seseorang individu. Gambaran mental yang dimiliki oleh individu dipengaruhi oleh tiga faktor- faktor yang mempengaruhi jati diri seseorang, yakni:

##### 1. Pengetahuan

Dimensi pertama dari jati diri adalah pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki individu merupakan apa yang individu ketahui tentang dirinya sendiri. Hal ini mengacu pada istilah- istilah kuantitas seperti usia, jenis kelamin, kebangsaan, pekerjaan, dll dan sesuatu yang merujuk pada istilah- istilah kualitas seperti individu yang egois, baik hati, tenang, dan bertempramen tinggi. Pengetahuan bias diperoleh dengan membandingkan diri individu dengan kelompok pembandingnya. Pengetahuan yang dimiliki individu tidaklah menetap sepanjang hidupnya, pengetahuan bisa berubah dengan cara merubah tingkah laku individu tersebut atau dengan cara mengubah kelompok pembanding.

##### 2. Penghargaan

Selain individu mempunyai satu set pandangan tentang siapa dirinya, individu juga memiliki satu set pandangan lain, yaitu tentang kemungkinan menjadi apa dimasa mendatang. Jadi setiap individu mempunyai pengharapan bagi dirinya sendiri dan pengharapan tersebut berbeda- beda pada setiap individu.

### 3. Penilaian Diri Sendiri

Individu berkedudukan sebagai penilai terhadap dirinya sendiri setiap hari. Penilaian terhadap diri sendiri adalah pengukuran individu tentang keadaannya saat ini dengan apa yang menurutnya dapat dan terjadi pada dirinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jati diri yang dimiliki setiap individu terdiri dari tiga aspek yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, harapan mengenai diri sendiri dan penilaian mengenai diri sendiri. Pengetahuan adalah apa yang individu ketahui tentang dirinya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, pengetahuan ini biasa diperoleh dengan membandingkan diri dengan kelompok pembanding dan pengetahuan yang dimiliki individu biasa berubah-ubah. Harapan adalah apa yang individu inginkan untuk dirinya dimasa yang akan datang dan harapan bagi setiap orang berbeda- beda. Sedangkan penilaian adalah pengukuran yang dilakukan individu tentang keadaan dirinya saat ini dengan apa yang menurut dirinya dapat dan terjadi.

## **2.4 Tinjauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM- Mandiri)**

### **2.4.1 Pengertian PNPM**

PNPM Mandiri menurut Tim PNPM Mandiri Tuban (2010) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program - program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah:

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan



melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

#### **2.4.2 Visi, Misi, Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan**

Dalam pelaksanaannya PNPM Mandiri mempunyai Visi, Misi, dan Tujuan, yakni:

##### **1. Visi, Misi, PNPM Mandiri Perdesaan**

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) perlembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

##### **2. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan**

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khusus meliputi :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang di prioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan

#### **2.4.3. Ruang Lingkup Program PNPM-Mandiri**

Ruang lingkup kegiatan PNPM-MANDIRI pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi :

1. Penyediaan dan perbaikan pasarana atau sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
2. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target.

4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

#### **2.4.4. Komponen Program dalam PNPM-MANDIRI**

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

##### **1. Pengembangan Masyarakat.**

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat, dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

##### **2. Bantuan Langsung Masyarakat**

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

##### **3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal**

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan

terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

#### 4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

#### 2.4.5. Strategi PNPM- Mandiri

Dalam upaya mencapai tujuan PNPM, strategi yang diterapkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat seutuhnya dengan mendayagunakan seluruh potensi dan sumberdaya lokal termasuk sumberdaya manusia, alam, teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Strategi tersebut terdiri dari tahapan internalisasi, pelembagaan, dan keberlanjutan, yaitu:

##### 1. Tahap internalisasi

1. Tahap pembelajaran bagi masyarakat dan PEMDA untuk memahami pengelolaan pembangunan partisipatif
2. Bantuan pendanaan merupakan faktor utama penggerak proses pemberdayaan peran pendamping (fasilitator atau konsultan) masih sangat dominan.
3. Peran pendamping (fasilitator atau konsultan) masih sangat dominan

##### 2. Tahap pelembagaan

1. Proses pelembagaan pembangunan partisipatif, pendanaan mikro berbasis masyarakat, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal
2. Bantuan pendanaan lebih bersifat stimulan
3. Peran fasilitator atau konsultan terfokus pada peningkatan kapasitas
4. Masyarakat, pemda, konsultan dan fasilitator merupakan mitra sejajar
5. Perencanaan partisipatif mulai terintegrasi ke dalam sistem perencanaan.

### 3. Tahap keberlanjutan

1. Tahap penyiapan masyarakat untuk mampu melanjutkan pengelolaan pembangunan secara mandiri
2. Masyarakat mampu menghasilkan keputusan yang rasional dan adil, serta mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak
3. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak pembangunan
4. PEMDA lebih tanggap dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat keberadaan fasilitator atau konsultan atas permintaan masyarakat atau PEMDA sesuai keahlian yang dibutuhkan.

#### 2.4.6 Prinsip Dasar PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.
2. Otonomi. Pengertian prinsip ekonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa intervensi negatif dari luar.
3. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewajiban yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari

tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

6. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam peranannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati .
7. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musrawarah dan mufakat.
8. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara morak, teknis, legal maupun administratif.
9. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengantasan kemiskinan.
10. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pegendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

#### **2.4.7. Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri**

Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri merupakan realisasi kegiatan program yang terdapat didalam program PNPM Mandiri dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program pemberian bantuan modal untuk usaha yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Kelompok sasaran Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri adalah: Masyarakat miskin di perdesaan, Kelembagaan masyarakat di perdesaan, dan Kelembagaan pemerintah lokal. Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini merupakan kegiatan yang berjalan selama 1 tahun dan diperpanjang lagi dari apabila berjalan dengan baik. Proyek Simpan Pinjam Perempuan digunakan untuk membantu permodalan masyarakat miskin

dan membantu meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan jati diri perempuan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri yakni menggunakan pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
5. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.





### III. KERANGKA PEMIKIRAN

#### 3.1 Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam pembangunan yang berlangsung secara dinamis dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan mengambil keputusan secara bebas dan mandiri. Untuk memaksimalkan pembangunan maka perlu pemberdayaan yang diberikan kepada perempuan dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada. Perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembangunan.

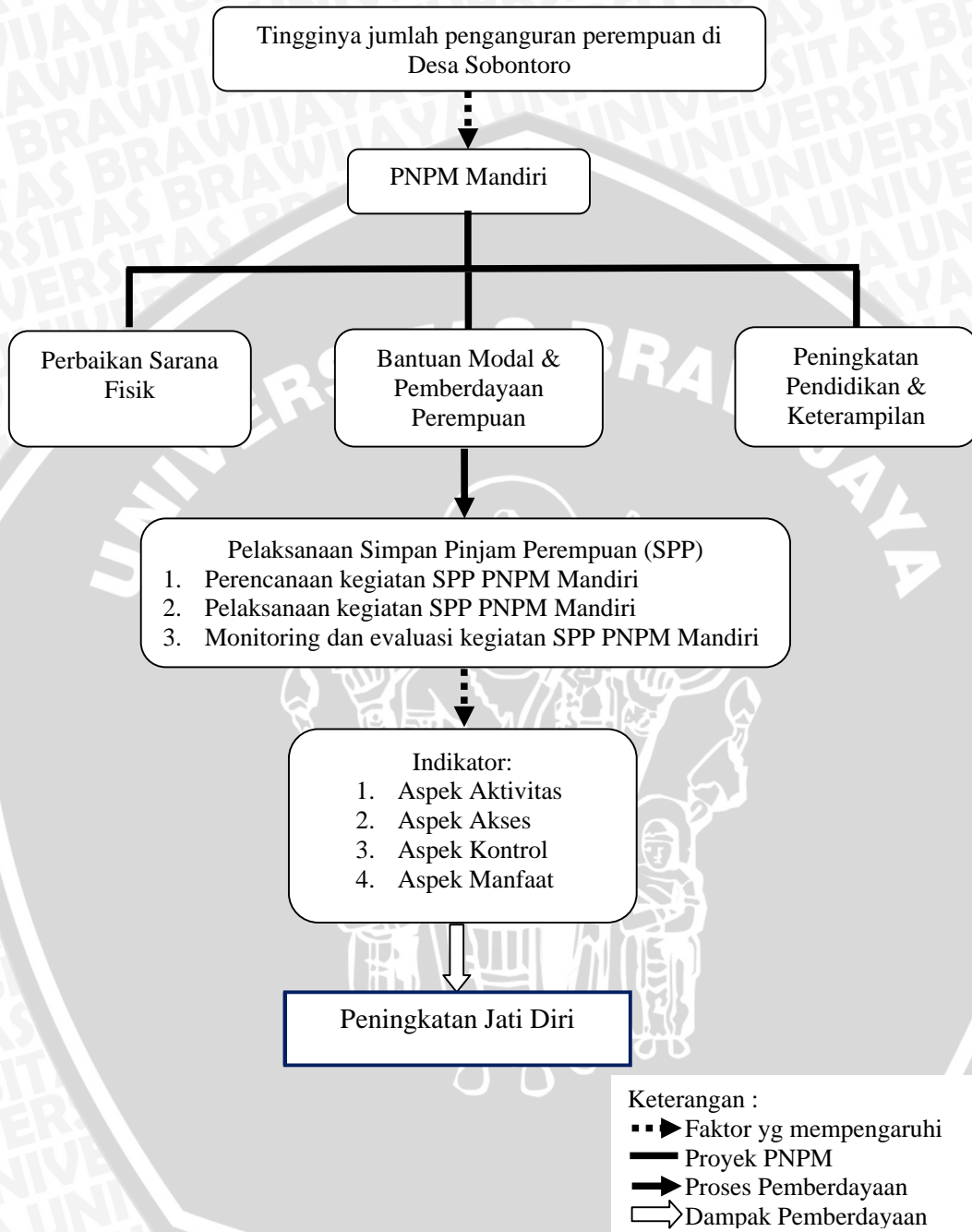
Pada dewasa ini, tingginya jumlah pengangguran perempuan yang kurang dimanfaatkan menjadi salah satu penyebab dari terhambatnya pembangunan. Oleh karena itu diperlukan adanya pemberdayaan perempuan yang dapat meningkatkan jati diri perempuan dalam aktivitas produktif, aktivitas reproduktif, dan aktivitas sosialnya dengan menggunakan pendekatan analisis gender berupa analisis harvard. Begitu pula yang dirasakan di Desa Sobontoro banyaknya jumlah tenaga kerja perempuan yang belum dimanfaatkan membuat pembangunan belum berjalan secara maksimal. Dari perolehan data dari BPS Kabupaten Tuban (2010) tercatat dari 1216 jiwa penduduk, jumlah penduduk perempuan sebanyak 789 orang yang belum dimanfaatkan sedangkan dari 1247 jiwa penduduk laki-laki hanya sebanyak 273 orang yang tidak bekerja. Banyaknya jumlah tenaga kerja perempuan inilah yang merubah paradigma dibentuknya pemberdayaan perempuan berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan jati diri para perempuan. Dengan memanfaatkan waktu luang yang dimiliki oleh ibu-ibu rumah tangga untuk hal yang lebih bermanfaat. Dengan adanya pemberdayaan perempuan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para perempuan untuk menggunakan waktu luangnya menjadi hal yang lebih bermanfaat lagi dengan mengikuti pemberdayaan sehingga terjadi peningkatan jati diri pada perempuan.

Pemberdayaan yang sedang dilaksanakan di Desa Sobontoro dalam upaya meningkatkan jati diri perempuan ini adalah proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri yang merupakan bantuan pemberian modal untuk usaha kepada perempuan. Dengan adanya proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para perempuan sehingga dengan demikian perempuan dapat belajar dalam berorganisasi, sekaligus meningkatkan jati dirinya. Pertemuan kegiatan proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini dilaksanakan tiap 2 minggu sekali dalam acara tahlilan yang rutin dilaksanakan untuk meningkatkan kerukunan antara warga pula. Sehingga dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perempuan baik peran domestik dan peran publik inilah

Dalam pelaksanaan proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri meliputi : a. Perencanaan yang meliputi sosialisasi proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP), nasyawarah- musyawarah desa, musyawarah khusus perempuan, dan pembuatan usulan, b. Pelaksanaan dari proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) c. Monitoring dan Evaluasi proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sasaran atau objek dari proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri adalah perempuan khususnya ibu- ibu rumah tangga yang mengikuti kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Demi terciptanya peningkatan jati diri ini perlu dilihat dari aktivitas perempuan dalam aktivitas produktif berupa aktifitas panen dan paska panen untuk ibu- ibu atau perempuan yang turut serta membantu dalam kegiatan pertanian dan aktivitas paska penangkapan ikan untuk perempuan yang turut membantu dalam kegiatan penangkapan ikan sebelum mengikuti dan sesudah mengikuti program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri, selain aktivitas produktif juga perlu dilihat dari aktivitas reproduktif dan aktivitas sosial perempuan terhadap kegiatan kemasyarakatan. Bagaimana pemberdayaan ini mampu membantu meningkatkan jati diri para perempuan ini dapat dilakukan pendekatan analisis gender berupa analisis Harvard yang meliputi 4 aspek yakni: aspek aktivitas, aspek akses, aspek kontrol, dan aspek manfaat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan Mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan menganalisis peningkatan jati diri perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri. Sehingga sesuai dengan tujuan penelitian dapat disederhanakan dalam kerangka pemikiran, dibawah ini:





**Gambar 1.** Bagan kerangka pemikiran penelitian pemberdayaan perempuan dalam peningkatan jati diri melalui proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di pesisir pantai utara kota tuban.

### 3.2 Batasan Masalah

- a. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban.
- b. Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri yang diteliti di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban
- c. Sasaran atau objek yang diteliti dibatasi hanya pada perempuan yang mengikuti Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.

### 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.3.1 Definisi Operasional

- a. Pemberdayaan perempuan yang diteliti dalam penelitian ini merupakan proses dimana perempuan menuju berdaya. Pemberdayaan perempuan berupaya untuk memberikan daya atau kemampuan kepada perempuan (pihak yang belum berdaya) sehingga memiliki daya untuk lebih mandiri. Dalam penelitian ini perempuan yang diberdayakan adalah anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban
- b. Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri merupakan proyek dari program PNPM Mandiri yang berupa pemberian modal usaha serta melibatkan keikutsertaan aktif perempuan dalam kegiatannya. Kegiatan SPP PNPM di Desa Sobontoro dalam penelitian ini meliputi: Perencanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan monitoring serta evaluasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- c. Jati diri merupakan identitas dari seseorang. Sedangkan jati diri perempuan merupakan identitas yang dimiliki oleh perempuan. Jati diri perempuan dalam penelitian ini yakni pemahaman akan hak dan kewajibannya mengenai akses atau sumber daya dan kontrol yang berhubungan dengan pengambilan keputusan di lingkungan keluarga dan masyarakat sosial. Indikator dari jati diri dilihat dengan menggunakan analisis gender yakni menggunakan analisis Harvard, sebagai berikut:

1. Aspek aktivitas, merupakan kemampuan dari perempuan (responden) dalam rumah tangga dalam mengikuti Proyek Simpan Pinjam Perempuan. Yang meliputi aktifitas produktif, aktifitas reproduktif, dan aktifitas sosial
2. Aspek akses, merupakan kemampuan dari perempuan (responden) dalam rumah tangga untuk memperoleh sumberdaya dalam mengikuti Proyek Simpan Pinjam Perempuan.
3. Aspek kontrol, merupakan kemampuan dari perempuan (responden) dalam rumah tangga untuk memperoleh wewenang pengambilan keputusan dalam mengikuti Proyek Simpan Pinjam Perempuan.
4. Aspek manfaat, merupakan kemampuan dari perempuan (responden) dalam rumah tangga untuk memperoleh hasil yang membawa kegunaan dalam mengikuti Proyek Simpan Pinjam Perempuan.

### 3.3.2 Pengukuran Variabel

Variabel adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Pengukuran variabel dimaksudkan untuk menentukan penilaian terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui proses pemberdayaan perempuan dalam Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) digunakan analisis deskriptif yang dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2.** Variabel Proses Pelaksanaan SPP PNPM Mandiri

Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator
Mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri	Proses Pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri	1. Perencanaan Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 2. Pelaksanaan Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 3. Monev Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Sedangkan untuk pengukuran variabel peningkatan jati diri perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat digunakan analisis gender berupa analisis Harvard, yang dapat dilihat di tabel 3, yang terdiri dari empat aspek, yakni:

a. Aspek aktivitas

Suatu aktivitas yang dilakukan oleh laki- laki dan perempuan dalam aktivitas reproduktif, produktif, dan sosial. Analisa aktivitas ini untuk melihat siapa yang

lebih dominan didalam aktivitas yang dilakukan oleh laki- laki dan perempuan, sehingga dapat menjawab pertanyaan siapa yang melakukan apa untuk setiap aktivitasnya.

b. Aspek Akses

Peluang menggunakan sumberdaya (sarana produksi) dan jangkauan terhadap informasi yang berkaitan langsung maupun tidak dalam seluruh proses kegiatan pemberdayaan maupun masyarakat. Yang meliputi: Permodalan atau kredit, kepemilikan tanah, kepemilikan perahu, tenaga kerja, pendidikan atau pelatihan, pasar, serta jangkauan informasi. Analisis ini menjawab peluang pemanfaatan sumber daya antara laki- laki dan perempuan.

c. Aspek Kontrol

Adalah wewenang penuh untuk memutuskan atau menentukan pelaksanaan proses pemberdayaan yang meliputi: Aktivitas produktif (membeli kebutuhan konsumsi keluarga, membiayai pendidikan anak, kesehatan, memperbaiki rumah, membeli perabotan rumah tangga, dan membeli kendaraan), Aktivitas reproduktif (membeli perahu, membeli emas untuk investasi, mengikuti arisan, menjadi pedagang ikan, dan menentukan harga ikan dan hasil pertanian) dan yang terakhir Peran sosial (mengikuti rapat ditingkat RT, RW, desa dan kelurahan, mengikuti pelatihan dilingkungan tempat tinggal, mengikuti kegiatan keagamaan, memberi sumbangan sosial, memberi sumbangan hajatan, dan menghadiri hajatan). Analisa ini menjawab pengambilan dari usaha reproduktif, produktif, dan peran sosial.

d. Aspek Manfaat

Aspek manfaat merupakan kesempatan untuk memperoleh manfaat atau hasil dari proses pemberdayaan. Analisis ini menjawab siapa yang mendapat kesempatan untuk memperoleh manfaat dari kegiatan proses pemberdayaan yang meliputi: pengalaman, keterampilan, dan peningkatan jati diri, pemenuhan kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan biaya sekolah

**Tabel 3.** Indikator Jati Diri Perempuan Dalam Mengikuti Proyek SPP PNPM Mandiri

No	Jenis Pekerjaan	SEBELUM						SELAMA					
		Perempuan (Istri)		Laki- Laki (Suami)		Bersama (Suami + Istri)		Perempuan (Istri)		Laki- Laki (Suami)		Bersama (Suami + Istri)	
		Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
1	<p><b>Aspek Aktivitas:</b></p> <p><b>A. Aktivitas Produktif</b></p> <p>a. Persiapan dan Pelaksanaan</p> <p>1. Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyiapan Bibit</li> <li>▪ Penyiapan lahan</li> <li>▪ Penanaman</li> <li>▪ Pengairan</li> <li>▪ Pemupukan</li> <li>▪ Pemanenan</li> <li>▪ penjemuran</li> </ul> <p>2. Nelayan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyiapan jarring dan bekal</li> <li>▪ Penangkapan ikan</li> </ul> <p>3. Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyiapkan barang yang akan dijual</li> <li>▪ Membersihkan warung</li> </ul> <p>4. Penjahit atau menjahit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian bahan</li> <li>• Membuat Pola</li> <li>• Pemetongan</li> <li>• Menjahit</li> </ul> <p>b. Pengolahan dan Pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan hasil ikan</li> <li>• Pemasaran hasil ikan</li> <li>• Pengolahan hasil pertanian</li> <li>• Pemasaran hasil pertanian</li> <li>• Menjaga toko</li> <li>• Informasi Pesanan jahitan</li> </ul> <p><b>B. Aktivitas Reproduksi</b></p> <p>a. Mengambil air</p> <p>b. Penyiapan makanan</p> <p>c. Menjaga anak</p> <p>d. Membersihkan rumah</p> <p>e. Belanja</p> <p>f. Memperbaiki rumah dan perabot</p> <p>g. Mengelola keuangan rumah tangga</p> <p><b>C. Aktivitas Sosial</b></p> <p>a. Mengikuti rapat ditingkat RT, RW, desa dan kelurahan</p> <p>b. Terlibat dalam organisasi ditingkat desa atau kelurahan</p> <p>c. Terlibat dalam kegiatan- kegiatan kerohanian</p> <p>d. Ikut terlibat dalam penyampaian pendapat baik di rapat- rapat maupun dalam kegiatan kerohanian</p> <p>e. Ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan gotong- royong, arisan, syukuran atau hajatan.</p>												



**Lanjutan Tabel 3.** Indikator Jati Diri Perempuan Dalam Mengikuti Proyek SPP PNPM Mandiri

No	Jenis Pekerjaan	SEBELUM						SELAMA						
		Perempuan (Istri)	%	Laki Laki (Suami)	%	Bersama (Suami + Istri)	%	Perempuan (Istri)	%	Laki-Laki (Suami)	%	Bersama (Suami + Istri)	%	
		Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	
2	<b>Aspek Akses</b> a. Permodalan/ kredit b. Kepemilikan tanah sawah c. Kepemilikan perahu d. Kepemilikan mesin jahit e. Kepemilikan toko f. Pendidikan/ pelatihan g. Jangkauan Terhadap Informasi													
3	<b>Aspek Kontrol</b> <b>A. Aktivitas Produktif</b> a. Penentuan pemilihan alat pertanian b. Penentuan tanaman pertanian c. Penentuan pemilihan alat pelayaran d. Penentuan waktu kegiatan e. Penentuan jam pelayaran f. Penentuan barang yang akan dijual g. Penentuan bentuk dan penataan toko h. Penentuan bahan yang digunakan untuk menjahit <b>B. Aktivitas Reproduksi</b> a. Membeli kebutuhan konsumsi keluarga b. Membiayai pendidikan anak c. Menentukan Biaya Kesehatan d. Memperbaiki rumah e. Membeli perabotan rumah tangga <b>C. Peran Sosial</b> a. Mengikuti rapat ditingkat RT, RW, desa dan kelurahan b. Mengikuti pelatihan dilingkungan tempat tinggal c. Mengikuti kegiatan keagamaan d. Memberi sumbangan sosial e. Memberi sumbangan hajatan f. Menghadiri hajatan dan arisan													
4	<b>Aspek Manfaat (Benefit)</b> a. Pengalaman, Keterampilan, dan peningkatan jati diri b. Pemenuhan kebutuhan pokok c. Pemenuhan biaya kesehatan d. Pemenuhan biaya sekolah													

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



## IV. METODE PENELITIAN

### 4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. (Arikunto, 1995) sedangkan, menurut Singarimbun (1989) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta- fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya, dengan memberikan gambaran situasi kejadian atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan dalam analisis gender menggunakan analisis Harvard untuk mendeskripsikan dampak pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban .

### 4.2. Teknik Penentuan Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Meskipun dilakukan secara *purposive* bukan berarti tanpa alasan (*reasoning*) yang logis karena di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban merupakan desa yang terdapat Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri. Diadakannya Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini karena terlalu banyaknya pengangguran perempuan khususnya ibu- ibu rumah, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan jati diri untuk kaum perempuan. Pengumpulan data primer dimulai 18 Januari 2010 sampai dengan 26 maret 2010 di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.

### 4.3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja atau *purposive*. Dengan metode sensus dimana informan yang menjadi objek penelitian ini adalah seluruh anggota proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini jumlah informan sebanyak 69 orang anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Desa Sobontoro, serta 9 orang key informan yang diwawancarai secara mendalam yaitu Kepala Desa, Ketua PNPM, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan, Ketua dan Tim Fasilitator dari Kecamatan sehingga dapat diperoleh informasi secara rinci.

### 4.4. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan orang-orang yang ada di desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Adapun data yang dikumpulkan akan dilakukan secara resmi atau tidak resmi atau dengan mendatangi sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu wawancara terstruktur, wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan salah satu cara pengambilan data primer dengan menggunakan kuesioner sebagai pedoman. Wawancara terstruktur ini dilakukan dengan cara peneliti datang langsung kepada responden untuk memberikan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara terstruktur dilakukan kepada seluruh anggota perempuan yang ikut dalam Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri.

#### 2. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam adalah cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan yang dianggap representatif. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan detail juga untuk mendapatkan pernyataan atau kutipan dari informan. Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan pada ketua PNPM Mandiri, ketua SPP PNPM mandiri, kepala desa, petugas SPP PNPM mandiri di tingkat kecamatan.

### 3. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan pengetahuan tentang kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun proses interaksi yang berlangsung dalam lingkungan sosial tertentu yakni para responden yang tergabung dalam Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Desa Sobontoro, Kecamatan. Tambakboyo, Tuban

### 4. Dokumentasi

Data yang didapatkan dari dokumentasi ini adalah berupa dokumen tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk dokumentasi yang digunakan oleh peneliti antara lain:

1. Data Primer: berasal dari wawancara baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur.
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh bukan dari peneliti sendiri dalam arti data diperoleh melalui pihak interen pegawai kecamatan Tambakboyo, beberapa dokumen, laporan dari kantor kecamatan Tambakboyo atau kantor desa setempat, literatur buku, internet, hasil penelitian terdahulu.
3. Foto, merupakan kegiatan penelitian yang diabadikan melalui kamera dalam bentuk gambar.

## 4.5. Teknik Analisa Data

Berdasarkan Sugiyono (2008) analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada pihak lain. Dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis data yang digunakan dalam menganalisa hasil penelitian ini yaitu analisis deskriptif, dan analisis deskriptif dengan menggunakan analisis gender (analisis Harvard). Masing- masing metode akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

### 4.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama digunakan analisis deskriptif. Untuk tujuan pertama digunakan analisis deskriptif untuk

mendeskripsikan proses pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri yang meliputi: Persiapan Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri, Pelaksanaan Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri, dan Monitoring serta evaluasi Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri.

#### 4.5.2 Analisis Gender (Analisis Harvard)

Untuk menjawab tujuan kedua dalam penelitian ini digunakan analisis gender dengan menggunakan analisis Harvard. Analisis gender merupakan pengamatan terhadap perbedaan peranan antara pria dengan wanita dalam mengakses sumberdaya, pengetahuan baik di kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. (Sugiarti, 2002). Analisis gender dengan analisis harvard digunakan untuk mengetahui peningkatan jati diri perempuan dalam mengikuti pemberdayaan perempuan dalam Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri. Metode Harvard sering disebut sebagai GFA (*Gender Framework Analysis*) yang pertama kali dikemukakan oleh Overhold dan dirancang sebagai landasan untuk mengetahui profil gender dari suatu kelompok sosial. (Sukei, dkk. 2004). Menurut Astuti (Dalam Sukei) kerangka metode analisis Harvard dapat digunakan pada tingkat mikro yaitu rumah tangga dan masyarakat atau yang sering disebut *level grassroot or micro*. Teknis analisis Harvard didasarkan pada empat kriteria, meliputi: analisis aspek aktivitas, aspek akses, aspek kontrol, dan aspek manfaat.

Dalam penelitian ini menggunakan acuan teknik analisis data menurut Sutopo (2002) dalam penelitian Pellu (2010) untuk memastikan kebenaran suatu data sekaligus mendapatkan data yang akurat, diperlukan pengecekan keabsahan data. Teknik yang digunakan peneliti, adalah:

1. Keikutsertaan yakni uji keabsahan data yang dilakukan dengan ikutserta dalam masyarakat atau dalam penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan, selanjutnya apabila data yang diperoleh masih kurang dapat dilakukan perpanjangan keikutsertaan, yakni uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara menambah waktu observasi untuk mengecek dan mencari informasi tentang data yang kurang.

2. Triangulasi, merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif, artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap diperlukan tidak hanya satu cara pandang saja. Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan antara data hasil wawancara dengan informan dengan data hasil observasi di lapang. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data yang diperoleh di lapang dengan observasi dan wawancara dengan kajian dari literatur yang relevan sehingga diperoleh data yang mempunyai derajat keakuratan tinggi.

Dalam penelitian ini menggunakan acuan keabsahan data menurut Lincoln dan Guba dalam penelitian Pellu (2010) yaitu:

1. Standar kredibilitas, diperlukan agar hasil penelitian dapat dipercaya oleh para pembaca dan dapat disetujui. Standar ini dapat dicapai melalui: keikutsertaan peneliti di lapang, ketekunan pengamat, melakukan triangulasi, melakukan pemeriksaan baik dengan teman atau orang yang lebih mengerti dengan diskusi, melakukan pengecekan ulang kepada responden, dan menguraikan dengan rinci.
2. Standar transferibilitas (keteralihan) merupakan pernyataan empiris yang tidak dapat dijawab oleh peneliti. Yang bisa menjawabnya adalah pembaca yang membaca laporan penelitian. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari laporan yang dibuat, maka dapat dikatakan bahwa derajat keteralihannya sudah terpenuhi.
3. Standar dependabilitas (ketergantungan) berkaitan dengan pengecekan dan penilaian akan “salah benarnya” peneliti dalam menkonseptualisasikan apa yang ditelitinya. Jika semakin konsisten dalam proses pengumpulan data, hasil temuan dan laporan penelitian, maka semakin terpenuhinya standar ketergantungan ini.
4. Standar konfirmabilitas (kepastian) berhubungan dengan mutu hasil penelitian dengan memperhatikan topangan catatan atau rekaman data dalam penyajian dan kesimpulan hasil penelitian. Jika sesudah diperiksa ternyata ada kepastian, mak penelitian tersebut akan diterima oleh pembaca. Dan apa yang ditangkap di lapangan harus dikonfirmasi dengan para informan, sehingga tidak mengakibatkan salah persepsi.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.





## V. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 5.1. Keadaan Geografis Lokasi Penelitian Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

Desa Sobontoro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban yang berada di pesisir Pantai Utara Kota Tuban. Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan, salah satunya Kecamatan Tambakboyo, dan Kecamatan Tambakboyo memiliki 18 desa yakni: Desa Mander, Desa Cokrowati, Desa Dasin, Desa Pabeyan, Desa Pulogede, Desa Gadon, Desa Klutuk, Desa Tambakboyo, Desa Kenanti, Desa Sawir, Desa Glondong Gede, Desa Merkawang, Desa Plajan, Desa Ngulahan, Desa Dikir, Desa Sotang, Desa Belikanget, dan Desa Sobontoro.

Desa Sobontoro memiliki luas lahan wilayah sebesar 141,28 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2463 jiwa, secara umum penduduk Desa Sobontoro bermata pencaharian terbanyak sebagai petani dan nelayan dengan jumlah petani dan buruh tani sebanyak 698 orang, sedangkan nelayan sebanyak 287 orang.

Desa Sobontoro terletak  $\pm$  30 km sebelah Barat dari Kota Tuban dan, dengan jarak tempuh dari Desa Sobontoro ke Kecamatan terdekat sejauh 1 km dengan waktu tempuh 10 menit bila mengendarai motor. Desa Sobontoro berada pada titik koordinat 111<sup>0</sup>30' sampai dengan 112<sup>0</sup>35' Bujur Timur dan 6<sup>0</sup>40' sampai 7<sup>0</sup>18' Lintang Selatan dan berada pada ketinggian tempat 2 m dari permukaan laut, dengan batas wilayah, sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sawir dan Desa Dasin
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kenanti
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Glondong Gede

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Desa Sobontoro di Gambar 2 (Lampiran 1).

### 5.1.1. Keadaan Sumber Daya Alam Desa Sobontoro

Sumber daya alam merupakan potensi yang terkandung atau dimiliki Desa Sobontoro dari kuasa dan anugerah Tuhan untuk dapat digunakan secara bijak dalam pemanfaatannya. Desa Sobontoro merupakan desa yang berada membujur di sekitar Pantai Utara Kota Tuban dengan iklim tropis dengan keadaan tanah yang berpasir dan merupakan dataran rendah. Dalam 1 tahun curah hujan di Desa Sobontoro berkisar antara 1000 sampai 1500 mm per tahun, dengan ketinggian tempat 2 meter dari permukaan laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4, di bawah ini:

**Tabel 4.** Keadaan Curah Hujan dan Ketinggian Tempat Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

No	Uraian	Keterangan
1	Curah Hujan dalam 1 tahun	1000 – 1500 mm
2	Tinggi Tempat dari Permukaan Laut	2 meter

Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010

Selain curah hujan dan ketinggian tempat Desa Sobontoro juga memiliki aneka flora dan fauna daerah tropis misalnya berbagai macam jenis ikan, tumbuhan katus, pandan – pandanan yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk tikar dan ranjang, dan tumbuhan siwalan yang banyak tumbuh di sekitar pantai yang dimanfaatkan sebagai jenis minuman fermentasi dan buahnya dapat dijual, serta daunnya dapat digunakan sebagai tikar.

### 5.1.2. Keadaan Sumber Daya Buatan di Desa Sobontoro

Sumber daya buatan merupakan sumberdaya yang diupayakan oleh masyarakat untuk kelangsungan hidup bersama. Sumberdaya buatan dikerjakan secara kekeluargaan dengan bersama – sama warga desa Sobontoro melakukan gotong royong untuk membangun Desa. Dalam pembangunannya sarana prasarana penunjang di Desa Sobontoro dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Sobontoro dapat dilihat pada tabel 5, di bawah ini:

**Tabel 5.** Sarana dan Prasarana di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban Menurut Penggunaannya

No	Penggunaan	Luas (ha)
1	Bangunan a. Perkantoran b. Sekolah c. Pertokoan d. Pasar e. Terminal f. Jalan	1,5 3 0,5 - - 5
2	Rekreasi dan Olah Raga a. Lapangan Sepak Bola b. Lapangan Bola Voly dan Basket c. Lapangan Golf d. Taman Rekreasi	0,5 0,5 - -
3	Perikanan Darat (Air Tawar) a. Tambak b. Danau c. Kolam	10 - -
4	Rawa	5
5	Lain- Lain a. Kuburan	4

Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010

Dari tabel dapat dilihat bahwa luas area lahan di Desa Sobontoro banyak diupayakan dalam bidang pertanian sedangkan untuk sarana seperti pasar, terminal, rekreasi dan olahraga masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sobontoro merupakan Desa yang masih berkembang.

### 5.1.3. Keadaan Sumber Daya Manusia di Desa Sobontoro

#### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang atau penduduk yang menetap di Desa Sobontoro pada tahun 2010, jumlah penduduk pria dan perempuan yang menetap di Desa Sobontoro, sebagai berikut:

**Tabel 6.** Jumlah Penduduk Laki- Laki dan Perempuan Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Laki- Laki	1247
2	Perempuan	1216
<b>Jumlah</b>		<b>1463</b>

*Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010*

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki- laki di Desa Sobontoro lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan dengan selisih sebesar 31 orang. Jumlah penduduk di Desa Sobontoro apabila diklasifikasikan menurut usia penduduk, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7.** Jumlah Penduduk Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban Menurut Usia

No	Usia	Jumlah (Orang)
1	0- 12 bulan	27
2	> 12 bulan – 12 Tahun	394
3	>12tahun – 30 tahun	800
4	> 30tahun – 50 tahun	810
5	> 50	432
<b>Jumlah</b>		<b>2463</b>

*Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010*

Dari tabel jumlah penduduk terbanyak pada usia > 30 tahun sampai pada tahun 50 tahun sebanyak 810 orang disusul dengan peringkat kedua terbesar antara usia > 12 tahun samapi 30 tahun, hal ini menunjukkan usia jumlah penduduk berada pada usia yang memungkinkan untuk bekerja dan mendapatkan serta menerima suatu ilmu dan keterampilan yang baru. Pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya selalu berubah - ubah, tak terkecuali di Desa Sobontoro jumlah penduduk juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pertumbuhan penduduk di Desa Sobontoro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 8.** Pertumbuhan Penduduk Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban Tahun 2009- 2010

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)
1	Jumlah Penduduk Tahun 2009	2359
2	Jumlah Penduduk Tahun 2010	2463

Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010

Dari tabel menjelaskan bahwa jumlah penduduk di desa sobontoro dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 104 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Desa Sobontoro terjadi akibat adanya perkawinan, migrasi penduduk, kelahiran yang terjadi pada tahun tersebut serta di karenakan adanya peningkatan kesejahteraan dalam keluarga.

## 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Sobontoro bervariasi mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai pada Perguruan Tinggi, walaupun jumlah penduduk lulusan Perguruan Tinggi belum sebanding banyaknya dengan penduduk lulusan SD dan SLTP. Rincian tingkat pendidikan penduduk Di Desa Sobontoro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 9.** Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban Tahun 2010

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Penduduk usia 10 thn ke atas yang buta huruf	-
2	Penduduk tidak tamat SD atau sederajat	19
3	Penduduk tamat SD atau sederajat	185
4	Penduduk tamat SLTP atau sederajat	380
5	Penduduk tamat SLTA atau sederajat	90
6	Penduduk tamat D-1	4
7	Penduduk tamat D-2	3
8	Penduduk Tamat D-3	9
9	Penduduk tamat S-1	15
10	Penduduk tamat S-2	2
11	Penduduk tamat S-3	1
<b>Jumlah</b>		<b>708</b>

Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010

Dari tabel dapat diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan penduduk Desa Sobontoro masih tergolong rendah, terbukti dengan didominasinya jumlah lulusan terbanyak didominasi oleh penduduk yang hanya tamat pada jenjang Sekolah

Dasar dan SLTP sebesar 565 orang dari 708 orang sedangkan untuk penduduk lulusan Perguruan Tinggi hanya sebanyak 18 orang dari 708 orang.

### 3. Berdasarkan Mata Pencaharian

Desa Sobontoro merupakan desa di pinggiran Pantai Utara, yang membujur dari Barat ke Timur. Yang wilayahnya terbagi oleh lautan, sawah, dan perkampungan penduduk. Sehingga penduduk Desa Sobontoro memiliki jenis pekerjaan yang bervariasi mulai dari bidang pertanian, nelayan, jasa, perdagangan, dll. Mata pencaharian penduduk Desa Sobontoro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 10.** Mata Pencaharian Penduduk Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Petani	348
2.	Buruh Tani	350
2	Nelayan	287
3	Pekerja di Sektor Jasa dan Perdagangan	130
5	PNS	30
6.	Pegawai Swasta	120
<b>Jumlah</b>		<b>1265</b>

*Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010*

Dari tabel penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani menduduki urutan pertama sebanyak 348 dan yang paling kecil penduduk yang bekerja sebagai PNS sebanyak 30 orang. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Desa Sobontoro banyak yang bergerak dalam bidang pertanian.

### 4. Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Kesejahteraan penduduk meliputi kriteria pemenuhan pangan, papan, dan sandang yang layak dan cukup untuk setiap anggota keluarga. Untuk tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Sobontoro dapat dilihat pada tabel 11, di bawah ini:

**Tabel 11.** Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

No	Uraian	Jumlah (KK)
1	Keluarga pra sejahtera	215
2	Keluarga sejahtera I	111
3	Keluarga sejahtera II	125
4	Keluarga sejahtera III	76
5	Keluarga sejahtera III plus	30
<b>Jumlah</b>		<b>557</b>

Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010

Dari hasil tabel dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Desa Sobontoro paling tinggi berada pada keluarga pra sejarah, hal ini membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Sobontoro masih rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan, mata pencaharian di Desa Sobontoro yang masih tergolong rendah pula sehingga untuk peningkatan taraf kesejahteraan belum meningkat.

#### 5.1.4. Keadaan Petanian Desa Sobontoro

##### 1. Distribusi Penggunaan Lahan Pertanian

**Tabel 12.** Distribusi Penggunaan Lahan Pertanian

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)
1.	Sawah Irigasi	50
2.	Sawah Setengah Teknis	10
3.	Sawah Tadah Hujan	10
4.	Sawah Pasang Surut	-
5	Ladang/ Tegalan	40
<b>Jumlah</b>		<b>110</b>

Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010

Untuk distribusi penggunaan lahan pertanian di Desa Sobontoro yang paling banyak dimanfaatkan untuk sawah irigasi, karena Desa Sobontoro merupakan Desa yang mempunyai tipe tanah oxisol dan berpasir sehingga memiliki pori – pori tanah yang besar sehingga lebih banyak dijumpai sawah irigasi. Sedangkan untuk ladang atau tegalan menduduki urutan kedua setelah sawah irigasi, tegalan biasanya dimanfaatkan untuk menanam buah – buahan, cabai, tomat, umbi – umbian, dan kacang – kacang.

## 2. Tingkat Kesuburan Tanah Pertanian dan Penggunaan Lahan Pertanian

**Tabel 13.** Tingkat Kesuburan Tanah Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

NO	Tingkat Kesuburan	Luas (ha)
1	Sangat Subur	30
2	Subur	10
3	Sedang	20
4	Tidak Subur atau Kritis	6

Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010

Kesuburan tanah dan curah hujan berpengaruh pada jenis pertumbuhan tanaman yang akan dibudidayakan. Karena curah hujan yang cukup rendah dan tingkat kesuburan tanah yang rendah maka jenis tanaman yang dibudidayakan adalah jagung, padi, kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pengairan atau irigasi pertanian petani di Desa Sobontoro menggunakan *sumur bor* atau sumur pompa.

Penggunaan lahan di Desa Sobontoro digunakan untuk kebutuhan pangan. Sehingga komoditas yang di usahakan berupa tanaman padi, kacang – kacangan seperti kacang hijau dan kacang tanah, serta jagung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini:

**Tabel 14.** Potensi sektor Pertanian di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

No.	Jenis Komoditi	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)	Produktivitas (Ton/ha)	Bentuk Produksi
1	Padi				
	Padi sawah	70	59	6	Gabah
	Padi ladang	5	5	3	Gabah
2	Jagung	30	25	210	Tongkol
3	Kacang Hijau	10	8	70	Biji
4	Kacang tanah	3	3	1,5	Biji
<b>Total</b>		<b>118</b>	<b>100</b>		

Sumber: Data Sekunder Kantor Kecamatan Tambakboyo, 2010

Penggunaan lahan pertanian di Desa Sobontoro banyak digunakan untuk menanam komoditas padi dan jagung. Pemilihan komoditas ini atas dasar padi dan jagung merupakan kebutuhan pokok dan komoditas kacang – kacangan digunakan untuk menambah unsure nitrogen ke dalam tanah sebelum tanam padi ata jagung kembali.



### 3. Keadaan Pertanian Berdasarkan Pola Tanam

Keadaan pertanian di Desa Sobontoro memiliki pola tanam yang dimaksudkan untuk mengetahui waktu tanam yang diterapkan oleh petani di daerah setempat yaitu sebagai berikut :

Bulan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Komoditas	padi			padi				padi				

**Gambar 2.** Pola Tanam 1 di Desa Sobontoro (Sumber : Analisis data primer, 2011)

Bulan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Komoditas	padi			padi			Palawija(jagung/kacang tanah)					

**Gambar 3.** Pola Tanam 2 di Desa Sobontoro (Sumber : Analisis data primer, 2011)

Bulan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Komoditas	padi			palawijo(kacang tanah)				palawijo(jagung)				

**Gambar 4.** Pola Tanam 3 di Desa Sobontoro (Sumber : Analisis data primer, 2011)

Berdasarkan pola tanam pada gambar di atas, petani desa Sobontoro melakukan budidaya padi sebanyak 2 sampai 3 kali dalam setahun. Dalam hal ini petani menanam padi selama 2 sampai 3 kali masa tanam yaitu ketika musim penghujan, musim kemarau, dan musim pancaroba atau pertengahan musim hujan dengan musim kemarau. Pada pertengahan tahun, yaitu bulan juni bertepatan dengan musim kemarau petani biasanya mengganti dengan menanam komoditas palawija, yaitu sebagian petani menanam jagung dan sebagian lagi menanam kacang tanah. Namun ada juga sebagian petani pada pertengahan tahun yakni bulan maret atau awal maret setelah panen padi mencoba untuk menanam lahannya dengan kacang tanah ataupun jagung. Kacang tanah berguna untuk mengembalikan unsur hara dalam tanah, yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman palawija.

## **5.2. Keadaan Kelembagaan di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban**

Kelembagaan di Desa Sobontoro meliputi kelembagaan sosial dan kelembagaan ekonomi, untuk kelembagaan yang bergerak dalam bidang ekonomi di Desa Sobontoro meliputi: PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan Jamaah Tahlil. Sedangkan untuk kelembagaan yang bergerak dalam bidang ekonomi di Desa Sobontoro meliputi: Gapoktan Tani Maju dan Kelompok Tani. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam penjelasan di bawah ini:

### **5.2.1 Kelembagaan Sosial**

#### **1. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)**

Di Desa Sobontoro terdapat PKK yang merupakan wadah perkumpulan dan penyalur ide dan aspirasi dari kaum perempuan warga Desa Sobontoro. Pertemuan PKK diadakan secara rutin dalam 1 bulan sekali. Dalam PKK di Desa Sobontoro ada 10 program kerja PKK yakni: a) penghayatan dan pengamalan pancasila, b) gotong royong, c) pangan, d) sandang, e) perumahan dan tata laksana rumah tangga, f) pendidikan dan keterampilan, g) kesehatan, h) pengembangan kehidupan berkoperasi, i) kelestarian lingkungan hidup, dan j) perencanaan sehat. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam PKK seperti: simpan pinjam, pelatihan keterampilan dalam memasak, pelatihan pembukuan bagi pengurus pokja , tata hias taman dan rumah, dan ikut menyukseskan program KB (Keluarga Berencana)

#### **2. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pemberdayaan kepada petani seperti aplikasi penggunaan pupuk dan produk benih baru, pengolahan hasil panen baik pertanian maupun hasil penangkapan ikan. Juga sekarang ini mulai diadakan pemberdayaan untuk ibu – ibu dalam mengelola hasil tangkapan ikan untuk dijadikan kerupuk ikan dan terasi.

### 3. Jamaah Tahlil

Jamaah tahlil di Desa Sobontoro terdiri dari 2 jamaah tahlil yaitu jamaah tahlil perempuan dan jamaah tahlil laki – laki. Kegiatan jamaah tahlil dilakukan untuk memepererat silaturahmi dan kekeluargaan ditiap warga, serta untuk membahas dan menyelesaikan masalah ditingkat warga untuk kepentingan umum. Kegiatan tahlil dilakukan secara rutin 2 minggu sekali dengan cara pergiliran setiap anggota tahlil akan ketempatan menjadi tempat diadakannya kegiatan rutin tahlil.

## 5.2.2 Kelembagaan Ekonomi

### 1. Gapoktan Tani Maju

Desa Sobontoro memiliki Gabungan Kelompok Tani atau yang sering disebut dengan Gapoktan. Gapoktan di Desa Sobontoro dinamakan Gapoktan Tani Maju. Pertemuan Gapoktan di lakukan sebulan sekali dalam acara rutin untuk membahas setiap permasalahan dan keluh kesah petani bersama penyuluh lapang dalam setiap pertemuan. Gapoktan ini dibentuk sebagai wadah ide – ide dan wadah untuk saling mengadu serta menemukan jalan keluar secara bersama – sama. Selain itu juga untuk mempermudah koordinasi antara petani dan penyuluh lapang.

### 2. Kelompok Tani

Desa Sobontoro memiliki Gapoktan yang terdiri dari dua kelompok tani yakni: kelompok tani ‘tani maju’ dan kelompok tani ‘sri mulya’. Setiap kelompok tani terdiri dari 15 orang dengan dibimbing oleh 1 penyuluh lapang. Pertemuan rutin kelompok tani di Desa Sobontoro dilakukan tiap 1 bulan sekali. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani yaitu membahas mengenai kalender tanam, pengairan, pupuk, gotong-royong, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pertanian. Dalam setiap pertemuan pengurus selalu memberikan kesempatan kepada para anggota untuk menyampaikan pendapat atau saran mengenai apa yang menjadi topik bahasan pada saat itu.

### **5.3. Keadaan Program – Program Pembangunan Desa di Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban**

Program pembangunan di Desa Sobontoro meliputi pembangunan di segala bidang. Adapun program-program pembangunan yakni peningkatan kegiatan pada bidang sosial ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan serta pada bidang pertanian. Beberapa program yang telah direncanakan tersebut merupakan suatu program dari Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 2011) yang dapat membantu masyarakat di beberapa aspek, terutama di bidang sosial ekonomi masyarakat. Selain itu dengan adanya Musrenbangdes tahun 2011 yang dihadiri oleh perangkat desa, kecamatan, tokoh masyarakat, perwakilan warga, serta dari beberapa dinas terkait, seperti dinas pertanian ditujukan untuk dapat mempererat tali silaturahmi dan hubungan di masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Sobontoro, karena diputuskan atas musyawarah bersama.

#### **5.3.1 Bidang Sosial dan Ekonomi**

Program lembaga pemerintah di Desa Sobontoro memiliki peran penting bagi pembangunan desa ke arah lebih baik lagi. Program dari lembaga pemerintah yang ada adalah peningkatan kreativitas dan kinerja dari perangkat desa dan aparat desa, RT, RW, PKK, dan LPM. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan masyarakat dalam menghadapi persoalan pemerintahan dan melayani kebutuhan masyarakat. Pada bidang sosial dan ekonomi di Desa Sobontoro mulai berkembang sejak adanya program PNPM Mandiri yang banyak membantu masyarakat dalam memberikan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian menjadi keripik singkong, dan hasil tangkapan ikan menjadi terasi, ikan asin, dll. Sehingga dengan adanya program PNPM Mandiri Pedesaan warga Desa Sobontoro mulai ikut aktif dalam kegiatan perkumpulan sosial dan mulai bermunculan home industri yang bergerak dalam pengolahan hasil tangkapan ikan dan keripik singkong dari hasil pertanian.

### 5.3.2 Bidang Pendidikan

Dalam pembangunan dalam bidang pendidikan di Desa Sobontoro dengan bantuan dana dari PNPM Mandiri Pedesaan dibangunlah sekolah TK PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) untuk warga Desa Sobontoro maupun yang di sekitar Desa Sobontoro. Hal ini merupakan wujud nyata bahwa warga Desa Sobontoro mulai lebih memperhatikan pendidikan putra putrinya agar kelak menjadi putra putrid bangsa yang lebih bisa membanggakan bagi orang tua, agama, dan bangsanya.

### 5.3.3 Bidang Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana di Desa Sobontoro dilakukan dengan menggunakan dana yang di dapat dari program PNPM Mandiri Pedesaan untuk membangun jalan – jalan desa untuk mempermudah akses keluar masuk desa dan mendukung pemasaran dari usaha home industri di Desa Sobontoro. Tidak hanya jalan – jalan desa yang diperbaiki namun juga saluran irigasi petani agar petani lebih mudah mendapatkan air. Karena petani Desa Sobontoro pengairan sawah dilakukan dengan irigasi.



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



## VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 6.1. Deskripsi Informan

Gambaran ciri- ciri khas yang dimiliki individu yang ada dalam diri perempuan yang membedakan perempuan satu dengan perempuan lainnya merupakan deskripsi informan. Deskripsi informan perempuan ini akan dibatasi pada tingkat umur, pekerjaan, dan pendidikan. Deskripsi informan bertujuan untuk memberikan informasi untuk memudahkan dalam penyusunan hasil penelitian, untuk lebih jelas mengenai deskripsi informan akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 6.1.1. Umur Informan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri

Dalam pemberdayaan umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keikutsertaan perempuan untuk terlibat secara produktif, karena umur berhubungan dengan kemauan dan kemampuan dalam segi fisik untuk dapat melakukan kegiatan pemberdayaan tersebut, sehingga dengan keterlibatan tersebut dapat meningkatkan jati diri perempuan.

**Tabel 15.** Umur Informan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 30	8	10
2	30 – 40	39	50
3	> 40	31	40
	<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>100</b>

Sumber: *Analisis Data Primer, Tahun 2011*

Sesuai dengan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan yang berumur antara 30 - 40 tahun jauh lebih banyak sebanyak 39 orang dengan presentase 50 % dari total responden, dan responden yang berumur diatas 40 sebanyak 31 orang dengan presentase 40 %, dan yang paling rendah responden dengan umur < 30 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase

sebesar 10 % dari total informan. Secara keseluruhan informan berada pada tingkat usia dimana semua perempuan telah matang menjadi istri dan ibu - ibu rumah tangga yang siap untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya dan aktivitas sosialnya untuk meningkatkan jati dirinya dalam pergaulan bermasyarakat.

### 6.1.2. Jenis Pekerjaan Informan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri

Pada penelitian ini informan merupakan ibu – ibu yang mengikuti Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri. Pekerjaan merupakan kegiatan yang sehari – hari dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dan untuk kelangsungan hidupnya. Untuk jenis pekerjaan dari informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 13 dibawah ini:

**Tabel 16.** Jenis Pekerjaan Informan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan

No	Jenis Pekerjaan	Informan	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Pekerjaan Utama:		
	a. PNS	9	12
	b. Bertani	23	29
	c. Berlayar (Nelayan)	6	7
	d. Berdagang	27	35
	e. Penjahit	3	4
	f. Ibu Rumah Tangga	10	13
	<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
2.	Pekerjaan Sampingan		
	a. Nelayan	3	30
	b. Jualan Ikan & Terasi	2	20
	c. Buruh Tani	5	50
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2011

Dari tabel diatas anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri yang pekerjaan utamanya sebagai pedagang menduduki peringkat tertinggi sebesar 27 orang perempuan (35%) dan yang terendah sebagai penjahit sebanyak 3 orang (4 %). Pekerjaan utama informan proyek



SPP lainnya selain berdagang dan menjahit yakni PNS sebesar 9 orang (12%), bertani sebanyak 23 orang (29%), nelayan sebanyak 6 orang (7%), dan ibu rumah tangga sebanyak 10 orang (13%). Sedangkan perempuan yang memiliki pekerjaan sampingan hanya 10 orang yang mayoritas menjadi nelayan dan jualan ikan dan terasi sebanyak 5 orang (50 %) serta buruh tani hanya sebanyak 5 orang (50 %). Dari jenis pekerjaan yang dimiliki responden ini akan mempengaruhi responden untuk aktivitas produktif dan aktivitas sosialnya diluar rumah yang akan mempengaruhi tingkat jati diri dari perempuan atau responden, semakin banyak perempuan atau responden tersebut bersosialisasi dengan masyarakat dan dunia luar dengan kegiatan yang positif maka akan meningkatkan jati diri responden atau perempuan.

#### **6.1.3. Pendidikan Informan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri**

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang lebih berguna. Pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang belum diketahui oleh manusia sehingga dapat melatih kemampuan manusia tersebut. Pendidikan ini dapat berupa pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, sedangkan pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diperoleh melalui pelatihan – pelatihan keterampilan, misalnya keterampilan menjahit, dan keterampilan dalam pembukuan. Dengan adanya pendidikan ini baik pendidikan informal maupun formal akan membantu responden untuk meningkatkan kepercayaan diri, pengetahuan yang tentunya juga akan meningkatkan jati diri dari responden tersebut. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 14.

**Tabel 17.** Tingkat Pendidikan informan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sarjana	5	6
2	Diploma	-	-
3	SLTA	19	24
4	SLTP	21	27
5	SD	31	40
6	Tidak Tamat SD	2	3
<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>100</b>

Sumber: *Analisis Data Primer, Tahun 2011*

Pendidikan formal tertinggi yakni tamatan SD sebanyak 31 orang (40 %) dan ada 2 orang atau 3 % dari jumlah informan sebanyak 78 orang yang tidak tamat SD. Sedangkan yang lulus sarjana sebanyak 5 orang atau 6% dari 78 informan, informan dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 19 orang atau 24% dari 78 informan, dan SLTP sebanyak 21 orang atau sebanyak 27 % dari 78 informan. Bagi perempuan anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pendidikan formal maupun pendidikan non formal sama - sama pentingnya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi dengan demikian perempuan tersebut akan mengalami peningkatan jati diri. Dengan bertambah banyaknya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh perempuan akan dapat merubah pola pikir dari tradisional menjadi pemikiran yang modern, sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya akan dapat meningkatkan jati diri yang dimiliki oleh perempuan anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri karena mendapatkan banyak pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang tidak akan pernah perempuan dapatkan hanya dengan berdiam diri dirumah saja.

#### 6.1.4. Luas Pekarangan yang Dimiliki Oleh Informan Anggota Simpan Pinjam (SPP) PNPM Mandiri

Dalam penelitian ini luas pekarangan yang dimaksud adalah tanah disekitar rumah yang dimiliki oleh informan. Luas pekarangan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menanam tanaman hias saja tetapi juga tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk sayuran, buah, dan keperluan memasak yang lain.

**Tabel 18.** Luas Pekarangan yang Dimiliki Informan Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri

No	Luas Pekarangan (m <sup>3</sup> )	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0 – 99	41	53
2	100 – 199	31	40
3	200 – 250	6	7
<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>100</b>

Sumber: *Analisis Data Primer, Tahun 2011*

Sesuai dengan tabel 18 dapat diketahui luas pekarangan yang dimiliki oleh informan paling banyak dengan luas 0 – 99 m<sup>3</sup> sebanyak 41 orang dengan presentase 53 % dari 78 informan, dan luas pekarangan 100 – 199 m<sup>3</sup> dimiliki oleh 31 orang dengan presentase sebesar 40 % dari 78 informan, sedangkan untuk luas pekarangan 200 – 250 m<sup>3</sup> hanya dimiliki oleh 6 orang dengan presentase 6 % dari 78 informan. Luas pekarangan ini menunjukkan status sosial dari pemiliknya semakin luas pekarangan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan diri dari pemiliknya yang kurang lebih akan mempengaruhi jati diri dari pemiliknya sesuai dengan perilakunya terhadap masyarakat disekitar.

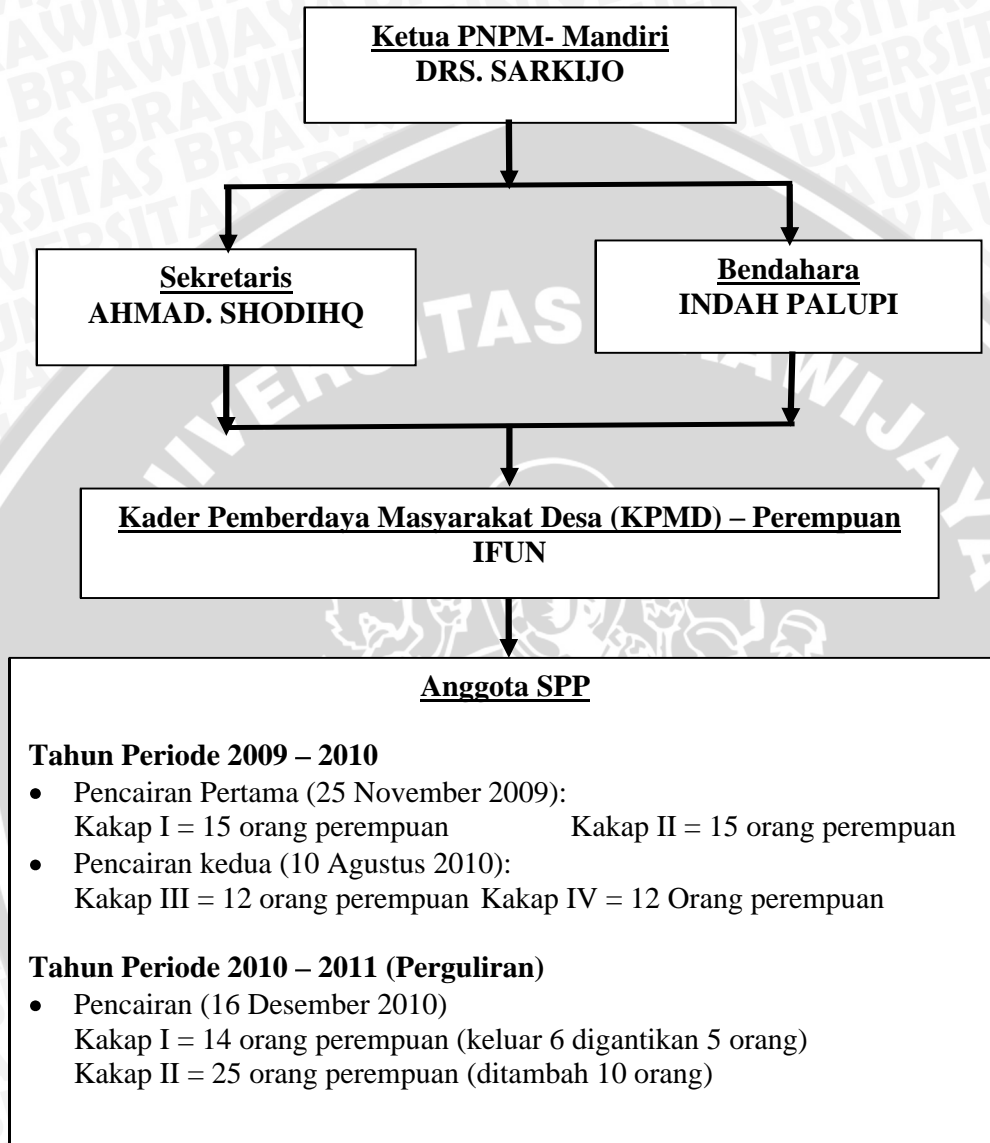
## 6.2. Proses Pelaksanaan Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri

Masyarakat Desa Sobontoro mempunyai mata pencaharian sebagian besar sebagai petani dan nelayan dalam upaya meningkatkan peranan perempuan maka diperlukan suatu program untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan agar keterampilan, pengetahuan, dan peningkatan jati perempuan dapat tercipta, serta untuk memberikan bantuan usaha maka diperlukan tambahan modal usaha dengan sistem angsuran dan jasa pinjaman relatif terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Dari hasil wawancara dengan kepala desa Desa Sobontoro Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini tidak hanya memberikan pinjaman modal tetapi juga ingin meningkatkan keterlibatan perempuan pada aktivitas sosial. Oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan kepada perempuan yang ingin mendapatkan dana pinjaman, yakni diantaranya: Kartu Tanda Penduduk Suami Istri, mau tergabung dalam kelompok organisasi yang mewadahi perempuan seperti tahlilan dan kegiatan PKK, sehingga dengan wadah organisasi inilah perempuan dapat ikut terlibat dalam seluruh kegiatan, dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan perempuan untuk bersosialisasi serta berorganisasi dengan masyarakat. Selain itu pentingnya wadah ini juga untuk memonitoring dari Proyek Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri. Sehingga dengan demikian tujuan dari Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini dapat tercapai, yakni:

- a. Anggota kelompok yang mempunyai usulan dapat memperoleh pinjaman usaha dengan jasa ringan
- b. Anggota kelompok dapat mengembangkan usahanya tanpa terjerat renterner
- c. Anggota kelompok mampu mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan berorganisasi.

Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri merupakan proyek dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang berupa bantuan pinjaman dana usaha. Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Desa Sobontoro sudah berjalan sejak Juli 2009. Dalam pelaksanaan sudah berjalan 2 kali periode, periode tahun 2009 – 2010 dan tahun periode tahun 2010 – 2011 dengan 4 kelompok yaitu Kakap 1, Kakap 2, Kakap 3, dan Kakap 4. Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini merupakan dana pinjaman kredit yang diangsur pembayarannya selama 12 kali dalam setahun, dengan syarat: menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk untuk suami istri, warga desa setempat, mau bersedia membentuk kelompok dengan wadah tahlilan dan PKK, bersedia melakukan perjanjian tanggung renteng oleh kelompok pemimjam dengan uang tabungan sebesar Rp. 5.000,00 per bulan.

Dalam realisasinya pada periode tahun 2009 -2010 pencairan dana dibagi menjadi dua, pencairan dana pertama pada tanggal 25 november 2009 untuk Kakap 1, dan Kakap 2 dengan jumlah anggota Kakap 1 sebanyak 15 orang, dan Kakap 2 sebanyak 15 orang. Dana pinjaman untuk Kakap 1 sebesar Rp. 15.000.000,00 dan dana pinjaman untuk Kakap 2 juga sebesar Rp.15.000.000,00 sehingga total pinjaman untuk pencairan dana pertama periode tahun 2009 – 2010 sebesar Rp. 30.000.000,00. Kemudian pada tanggal 10 agustus 2010 dilakukan pencairan dana kedua untuk Kakap 3 dan Kakap 4. Anggota dari Kakap 3 berjumlah 12 orang dan untuk anggota kakap 4 juga sebanyak 12 orang dengan total jumlah dana pinjaman Rp. 24.000.000,00 dibagi untuk Kakap 3 dan Kakap 4 masing – masing mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,00. Ada pun struktur dari Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri dapat dilihat pada gambar 5, di bawah ini:



**Gambar 5.** Struktur Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Sobontoro

Setelah berjalan selama 1 tahun Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mendapatkan tanggapan positif dari warga Desa Sobontoro mulai dari kegiatannya yang mempererat tali silaturahmi antar warga dengan perkumpulan tahlilan dan PKK serta pemberian keterampilan berupa jahit menjahit, yang dirasa cukup berguna untuk peningkatan jati diri perempuan melalui kegiatan sosialisasi dengan masyarakat yang dilaksanakan selain kegiatan rumah tangga yang sering perempuan lakukan. Jadi Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini tidak hanya memberikan bantuan usaha akan tetapi juga mempererat jalinan persaudaraan antar warga dengan bersosialisasi dengan warga setempat dan peningkatan keterampilan demi peningkatan jati diri perempuan melalui kegiatan – kegiatan berupa jahit – menjahit, pelatihan pembukuan, belajar berorganisasi melalui tahlilan dan PKK.

Dukungan positif dari warga inilah yang melatar belakangi kembali aparat desa untuk melanjutkan kegiatan Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Desa Sobontoro dengan harapan kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat khususnya perempuan dalam modal usaha akan tetapi dapat meningkatkan keterampilan, dan cara bersosialisasi serta berorganisasi dalam kegiatan PKK dan tahlilan dengan perempuan mengikuti pemberdayaan perempuan ini melalui Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri. Sehingga terrealisasikan Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pada tahun periode 2010 – 2011 yang disebut dengan “Simpan Pinjam Perempuan – Perguliran (SPP - Perguliran)”. Akan tetapi dalam SPP – Perguliran ini hanya Kakap 1 dan Kakap 2 yang mendapatkan kucuran dana bantuan usaha karena untuk Kakap 3 dan Kakap 4 belum lunas angsurannya. Pada SPP- Perguliran ini anggota dari Kakap 1 sebesar 14 orang dengan jumlah pinjaman Rp. 16.500.000,00 dan Kakap 2 dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang dengan jumlah pinjaman Rp. 28.000.000,00. Dalam proyek SPP perguliran ini jumlah anggota untuk Kakap I mengalami perubahan dari 15 orang

menjadi 14 orang dengan 6 orang keluar digantikan 5 orang, dan untuk Kakap 2 dari 15 orang bertambah 10 orang menjadi 25 orang. Sehingga total anggota dari tahap reguler sampai dengan tahap perguliran ini berjumlah 69 orang dari 54 orang ditambah 15 orang. Tahap perguliran ini yang dinamakan dengan tahap pelestarian program. Untuk data peminjam dan data jumlah pinjaman anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini dapat dilihat pada lampiran 2.

Subjek dari Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini adalah ibu – ibu rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan tetap dan memiliki usaha yang dikembangkan, yang selanjutnya akan dibina, diberikan keterampilan dan pelatihan untuk meningkatkan jadi diri perempuan tersebut. Sehingga Proyek Simpan Pinjam Perempuan ini tidak hanya untuk memberikan bantuan modal tetapi juga memberikan dorongan dan pembelajaran bagi perempuan atau ibu – ibu untuk terlibat dalam organisasi sehingga tidak hanya beraktifitas di dalam rumah saja. Seperti halnya yang dikatakan oleh NC 38 tahun :

“Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini tidak hanya memberikan bantuan modal usaha saja kepada ibu – ibu, tetapi juga memberikan pelatihan dan pembelajaran (berupa kursus menjahit dan pelatihan dalam pembukuan) agar ibu – ibu ini lebih percaya diri untuk kegiatan diluar rumah, sehingga sekaligus juga lebih mempererat kerukunan melalui PKK dan tahlilan yang merupakan wadah dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ”

Dari hasil wawancara dengan salah satu aparat desa KRS 38 tahun, proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini diwadahi oleh organisasi masyarakat berupa PKK dan Tahlilan untuk mengumpulkan para ibu –ibu untuk belajar dan maju bersama – sama sehingga terciptalah peningkatan jati diri dari perempuan. Adapun tahapan dari pemberdayaan perempuan melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini antara lain: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring serta tahap evaluasi, lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:



### 6.2.1. Tahap Perencanaan

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksana Unit Kecamatan (TPU – Kec) sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku SPP PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Kondisi kegiatan yang akan dibiayai melalui Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Inventarisasi data kependudukan.

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan keagamaan; (pengajian, dan yasinan), dan pertemuan PKK.

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di

kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sampai dengan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten.

### **1. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi**

MAD sosialisasi dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksanakan Unit Kecamatan (TPU – Kec) merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan - kesepakatan antar desa dalam melaksanakan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil dalam MAD sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Dipahaminya informasi pokok Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur.
- b. Dipahaminya cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antar desa, utamanya menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana.
- c. Dipahaminya cara pemetaan RTM dan kegunaannya modal untuk usaha.
- d. Dipahaminya konsep BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), cara penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi,
- e. Disepakatinya mekanisme musyawarah antar desa termasuk terpilihnya ketua rapat, pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan musyawarah, dan penetapan anggota tim perumus.

- f. Disepakatinya jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa dan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan.
- g. Disepakatinya waktu penyusunan detail desain dan RAB (Realisasi Anggaran dan Biaya) usulan kegiatan,
- h. Tersosialisasikannya rencana pembentukan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dan Badan Pengawas UPK beserta tugas dan kewenangannya. Untuk kecamatan yang sudah terbentuk UPK dan BP-UPK perlu disosialisasikan tugas, kewenangan, dan kategori kinerja lembaga ini kepada peserta yang hadir,
- i. Disampaikannya hasil evaluasi pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan yang telah berjalan sebelumnya terutama berkaitan dengan kegiatan pelestarian sarana prasarana yang telah dibangun, serta pengelolaan kegiatan perguliran
- j. Tersusunnya rencana penggunaan DOK (Dana Oreasional Kegiatan) Perencanaan

Peserta MAD (Musyawarah Antar Desa) Sosialisasi terdiri dari:

1. Enam orang wakil per desa: Kepala desa, 2 orang wakil dari BPD, dan 3 orang tokoh masyarakat (sekurang - kurangnya 3 dari keenam wakil tersebut adalah perempuan) dari semua desa di kecamatan.
2. Unsur-unsur yang dapat dipilih mewakili desa untuk hadir dalam MAD adalah: Kades, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil RTM dari setiap desa, Wakil perempuan dari setiap desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas), Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Anggota masyarakat lainnya.

Dalam MAD Sosialisasi juga dihadiri oleh Camat dan staf terkait, wakil instansi sektoral kecamatan (ISK) maupun terbuka untuk anggota masyarakat lainnya yang berminat. Sebagai narasumber dalam pertemuan MAD Sosialisasi adalah: Tim Kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan Kabupaten, Camat dan Instansi tingkat kecamatan terkait. Sedangkan fasilitator pertemuan adalah: PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan), UPK dan Fasilitator Kecamatan. Sumber pendanaan berasal stimulan dana operasional kegiatan (DOK) dari Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Dokumen yang dihasilkan adalah: berita acara yang menuangkan hasil-hasil keputusan musyawarah, jadwal musyawarah desa sosialisasi, dan rencana penggunaan DOK perencanaan. Penuturan dari AS 24 tahun Selaku aparat Desa Sobontoro, menjelaskan:

“Musyawarah Antar Desa – Sosialisasi dikumpulkan di Kecamatan yang hadir oleh Tim dari Kecamatan, Kades, Tokoh Masyarakat dan Agama, BPD dan wakil perempuan 3 orang dari 6 orang wakil dari desa”.

## 2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi

Musdes sosialisasi dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksanan Unit Kecamatan (TPU – Kec) merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Menurut penuturan ANK 31 tahun:

“Musdes Sosialisasi desa dilakukan pada awal untuk memberikan informasi kepada warga tentang proyek SPP PNPM Mandiri serta ketentuan dan syarat – syarat menjadi anggota proyek SPP PNPM Mandiri.”

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksanan Unit Kecamatan (TPU – Kec) hasil dalam musdes sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Tersosialisasinya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan meliputi: tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat desa. Untuk tujuan, dan aturan sanksi dari Proyek SPP PNPM Mandiri dapat dilihat di lampiran 3.

- b. Dipahaminya kebijakan tentang pemetaan RTM, pembentukan BKAD, penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, pola penyampaian informasi,
- c. Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi,
- d. Adanya pernyataan kesanggupan atau kesediaan desa untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan.
- e. Terpilihnya Pengurus TPK terdiri dari; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- f. Tersosialisasinya pola pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi.
- g. Ditetapkannya BPD sebagai lembaga pengawas pelaksanaan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di desa.
- h. Dibentuk tim pemantau dari unsur masyarakat untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.
- i. Dipilih dan ditetapkannya KPMD atau kader desa dan kader teknik yang akan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan proses SPP PNPM Mandiri Perdesaan.
- j. Disepakati dan ditetapkannya jadwal musyawarah desa perencanaan SPP PNPM Mandiri

### **3. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksanan Unit Kecamatan (TPU – Kec) KPMD/K yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPM D/K akan mendapat pelatihan. Hasil dalam pelatihan KPM D/K adalah:

- a. Bertambahnya keterampilan melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk perencanaan secara partisipatif.

- b. Bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri
- c. Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan
- d. Bertambahnya kemampuan KPM D/K dalam menyusun rencana kerja.

Sedangkan pendanaan atas penyelenggaraan pelatihan Kader berasal dari DOK Perencanaan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan, swadaya desa atau masyarakat, serta dari APBD. Sesuai dengan penjelasan dari IF 34 tahun sebagai KPMD Perempuan:

“Pada saat pelatihan diberikan pelatihan berupa tata cara pembukuan dalam Proyek Simpan Pinjam Perempuan dan pelatihan kader kepemimpinan untuk mengatur masyarakat”

#### **4. Penggalan Gagasan**

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksana Unit Kecamatan (TPU – Kec) penggalan gagasan adalah proses untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Tahapan dalam penggalan gagasan meliputi:

Tahap awal dari proses penggalan gagasan adalah mengadakan pertemuan di dusun untuk membuat peta sosial bersama-sama dengan warga dusun setempat. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembuatan peta sosial dalam pertemuan dusun sebagai berikut :

- a. Penentuan Klasifikasi Peta Sosial

Kegunaan Peta sosial adalah sebagai alat bantu dalam:

- a) Menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas rumah tangga miskin yang layak mendapatkan bantuan SPP PNPM Mandiri.

- b) Melaksanakan dan memantau tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, seperti penulisan usulan, verifikasi, musyawarah desa, dan musyawarah antar desa.

Sebelum Musyawarah Khusus Perempuan, Fasilitator Kecamatan (FK) bersama Kader Perempuan Masyarakat Desa (KPMD) menggabungkan daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin berikut kriterianya, serta peta sosial hasil pertemuan dusun-dusun menjadi baseline desa tentang rumah tangga masyarakat, serta peta sosial dusun/desa. Untuk melengkapi peta sosial yang telah dibuat, selanjutnya adalah melakukan pemetaan lembaga-lembaga yang ada di dusun dan desa, termasuk kelompok simpan pinjam perempuan, serta pola hubungan yang ada. Tujuan pemetaan lembaga desa adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan lembaga yang ada untuk sarana memecahkan masalah yang dihadapi serta mengoptimalkan potensi lingkungan yang dimiliki. Metode pemetaan lembaga dengan menggunakan metode diagram Venn yaitu dengan menemukan dan mengenali lembaga yang paling dekat dengan lokasi masyarakat, kekuatan dan potensinya, hubungan antar lembaga, serta peluang dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam Proyek SPP PNPM ini lembaga yang digunakan adalah PKK dan tahlilan. Dokumen yang dihasilkan: Form kriteria dan kategori rumahtangga masyarakat, form daftar Kartu Keluarga (KK) rumah tangga miskin, dan Peta desa.

#### b. Musyawarah Penggalan Gagasan

Musyawarah penggalan gagasan adalah pertemuan kelompok-kelompok atau dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Kelompok yang dimaksud dalam proses penggalan gagasan

adalah sekumpulan warga masyarakat (laki-laki, perempuan, atau campuran) yang tergabung dalam: (a) Ikatan kemasyarakatan yang berlatar belakang wilayah seperti RT, RW, RK, Dusun dan desa; (b) Kelompok-kelompok informal di masyarakat seperti kelompok arisan, kelompok keagamaan, dan PKK. Musyawarah penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Hasil yang diharapkan dari musyawarah penggalian gagasan adalah: masyarakat memahami hal-hal pokok tentang Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan meliputi (tujuan, prinsip, ketentuan dasar, dan alur kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan yang akan dilakukan), dan gagasan-gagasan kegiatan maupun visi ke depan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan berdasarkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki. Dokumen yang dihasilkan berupa Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah dan Daftar Gagasan yang dapat dilihat dalam Lampiran 5. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ID 29 tahun:

“Musyawarah Desa Penggalian Gagasan bertujuan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh desa dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, dalam SPP ini sumberdaya yang ingin dimanfaatkan dan dioptimalkan tentunya perempuan dengan memberikan dana bantuan modal usaha, keterampilan serta kegiatan positif dikemasyarakatan”

##### **5. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)**

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksanan Unit Kecamatan (TPU – Kec) MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa. Hasil yang diharapkan melalui pertemuan ini adalah: menetapkan usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, menetapkann usulan dari kelompok



perempuan selain usulan kegiatan simpan pinjam, dan terpilih calon-calon wakil perempuan yang akan hadir di musyawarah antar desa prioritas usulan. Adapun berita acara MKP dapat dilihat pada Lampiran 6. Dari penuturan ST 34 tahun selaku Anggota Proyek SPP PNPM menjelaskan:

*“Dateng MKP sakmenika dihadiri sedoyo anggota perempuan membahas sakwetawi dana pinjaman SPP PNPM Mandiri. Dana meniko kagem perempuan, dengan syarat kagem modal usaha kaleh’an ngersakaken derek tahlilan utawi PKK.”*

Yang artinya dari sitasi atau penuturan tersebut, yakni:

*“Dalam musyawarah khusus perempuan dihadiri seluruhnya perempuan yang ingin membahas mengenai dana pinjaman dari SPP PNPM Mandiri yang diperuntukkan untuk perempuan, dengan ketentuan modal tersebut digunakan untuk modal usaha, dan bersedia ikut dalam tahlilan atau PKK.”*

## **6. Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan**

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksanan Unit Kecamatan (TPU – Kec) Musdes perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok-kelompok. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah rekap gagasan semua kelompok, dan usulan kelompok perempuan. Hasil dari Musdes Perencanaan adalah :

- a. Terumuskannya visi desa yang dibuat berdasarkan proses sebelumnya yang berasal dari penggalian gagasan dan MKP
- b. Berdasarkan tabel penggalian gagasan MKP, mengesahkan tanpa pembahasan kembali, usulan kegiatan hasil keputusan musyawarah khusus perempuan, terdiri dari:
  1. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi. Jika usulannya sama dengan usulan dari musyawarah desa perencanaan, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti,

sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga.

2. Usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan.
  - c. Ditetapkannya daftar usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaanya melalui sumber dana lainnya (swadaya, pendapatan desa, APBD Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), dan lain-lain). Usulan ini dapat disampaikan melalui musrenbangdes dan musyawarah antar desa tahap selanjutnya.
  - d. Terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan, Tim Pemelihara.
  - e. Terpilihnya sekurang-kurangnya satu orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus UPK dan calon pengamat pada musyawarah antar desa prioritas usulan
  - f. Terpilihnya wakil-wakil desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa prioritas usulan terdiri dari 6 orang meliputi kepala desa, ketua TPK, dan 4 orang wakil masyarakat. Minimal 3 dari 6 wakil tersebut adalah perempuan,
  - g. Disetujuinya keikutsertaan desa dalam pembentukan BKAD yang tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh BPD dan Kepala Desa.

Peserta dari musdes perencanaan meliputi: kepala desa dan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil RTM desa, Wakil perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (ORMAS), dan Tokoh masyarakat atau tokoh agama. Dari penuturan THF 41 tahun, menjelaskan:

“Keterlibatan perempuan dalam Proyek Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri ini amatlah diperhatikan, terbukti dari usulan dari perempuan ini akan dikedepankan dan pasti disetujui dan dalam musyawarah desa kehadiran perempuan itu sekurang – kurangnya 40%, 50 % untuk musdes perencanaan dan SPP ini 100% dikelola oleh perempuan dalam kegiatannya dimasyarakat”

Proses ini difasilitasi oleh kader desa dan atau Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta Musdes Perencanaan adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan musdes perencanaan berasal dari DOK, swadaya desa atau masyarakat. Setelah musyawarah desa perencanaan, segera dilanjutkan dengan penulisan usulan.

### **7. Penulisan Usulan Desa**

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD. Proses ini dilakukan oleh TPU (Tim Penulis Usulan) yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari Fasilitator-Kec.

Hasil yang diharapkan dari tim penulis usulan adalah tiga proposal kegiatan berdasarkan keputusan Musdes Perencanaan yang akan diajukan ke MAD Prioritas Usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Dalam penyusunan dokumen- dokumen untuk musrenbang reguler, TPU merujuk kepada hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan dan bekerjasama dengan perangkat pemerintahan desa/ kelurahan. Dalam penuturan IF 24 tahun selaku TPU dan KPMD- Perempuan, menjelaskan:

“Dalam menulis usulan proposal harus memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang sekiranya mampu dikerjakan oleh masyarakat dan sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang ada di Desa serta harapannya usulan ini ada tindak lanjut dan berkelanjutan”

### **8. Verifikasi Usulan**

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan

oleh Tim Verifikasi (TV) yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. Sebelum menjalankan tugasnya TV akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari Fasilitator Kecamatan (FK). Untuk Gambar saat verifikasi di Desa Sobontoro dapat dilihat pada Lampiran 7.

TV harus memberi umpan balik di desa sebelum menyusun rekomendasi kelayakan usulan. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh Fasilitator Kecamatan, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya, TV membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil pemeriksaan oleh Fasilitator Kecamatan. Rekomendasi TV akan menjadi dasar pembahasan dalam MAD Prioritas Usulan. Dalam penuturan AS 24 tahun menjelaskan:

“Dalam Verifikasi dihadiri oleh Tim Kecamatan diantaranya UPK: Bpk Muzakin Siswo, Spd, Yanti, Spd, Nanik, dan Yayan, FK : Thoif Afaran, ST, FT: Bintari Candra Santi, ST, PJOK: Zaenal Abidin S.Sos, dan BKAD. Dalam verifikasi semua usulan akan dinilai untuk kelayakan dalam kebutuhan bagi masyarakat”

### **9. Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan**

MAD prioritas usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh Tim Verifikasi dalam menilai usulan kegiatan. Hasil dari MAD Prioritas Usulan adalah:

- a. Disepakati cara memeriksa dan menilai (sesuai kriteria yang digunakan TV) usulan kegiatan yang diajukan desa
- b. Ditetapkannya urutan atau peringkat usulan kegiatan SPP dan usulan lainnya sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat,
- c. Dipilih dan ditetapkannya pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara),

- d. Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan di desa Sobontoro
- e. Disampaikannya keputusan desa-desa yang bersepakat untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sekaligus deklarasi pembentukan BKAD. Setelah keputusan ini maka FK memfasilitasi penyusunan AD BKAD secara partisipatif dengan melibatkan wakil-wakil desa. Bagi kecamatan yang sudah terbentuk BKAD agendanya adalah Perumusan Rencana Kerja BKAD/Prioritas Pembangunan Kecamatan berdasarkan dari hasil perumusan visi desa- desa
- f. Disampaikannya usulan-usulan desa yang akan diajukan dan didanai dari sumber lain (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, anggaran Dana Desa atau ADD). Usulan ini dapat disampaikan melalui musrenbang kecamatan dan musyawarah antar desa tahap selanjutnya apabila tidak terrealisasikan ditahun ini. Penjelasan dari KRS 38 tahun, menjelaskan bahwa:

“Semua usulan yang masuk ke Kecamatan akan diperingkat dari usulan – usulan 18 desa yang ada di Kecamatan Tambakboyo. Usulan yang paling tinggi peringkatnya akan didanai. Tetapi yang usulan yang belum didanai tahun ini akan mendapat perioritas didanai pada tahun berikutnya. Peringkat ini akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ketersediaan sumberdaya dan kemampuan sumberdaya yang ada pula”

Peserta MAD Prioritas Usulan terdiri dari: enam orang wakil per desa: kepala desa, 2 orang wakil dari BPD, 3 orang tokoh masyarakat (sekurang- kurangnya 3 dari keenam wakil tersebut adalah perempuan) dari semua desa di kecamatan. Terhadap enam wakil per desa ini mempunyai hak memberikan suara atau pendapat pada saat pengambilan keputusan. Sehingga dalam MAD secara umum dihadiri oleh: camat dan staf terkait, wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK), kades di lingkungan kecamatan, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), wakil perempuan dari setiap desa, Organisasi Massa (ormas), tokoh masyarakat, dan tokoh agama,

Langkah berikutnya setelah MAD Prioritas Usulan adalah Penyusunan Desain dan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yaitu:

- a. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Desain, dan RAB TPU bersama KPM Desa dengan dibimbing oleh Fasilitator Kecamatan melakukan survey dan pengukuran lokasi serta survei harga material. Bila TPU dan KPM Desa sudah mampu, selanjutnya berdasarkan atas hasil survei dibuatkan rencana pelaksanaan kegiatan, dan Rancangan Anggaran Biaya atau RAB-nya.
- b. Pemeriksaan Desain dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Setiap desain dan RAB yang telah selesai dibuat oleh tim desa harus diperiksa oleh Fasilitator Teknik kecamatan dan Kabupaten

#### **10. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan**

MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan. Jika pada saat MAD prioritas usulan, seluruh usulan telah selesai dibuat berikut detail desain dan RABnya, maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui SPP PNPM Mandiri Perdesaan bisa langsung diselenggarakan setelah agenda MAD prioritas usulan diselesaikan. Namun jika belum selesai desain dan RABnya, maka MAD penetapan usulan dilakukan pada waktu yang berbeda. Hasil yang akan dicapai dari MAD Penetapan Usulan adalah:

- a. Ditetapkannya pendanaan usulan sesuai dengan keputusan MAD Prioritas Usulan.
- b. Disetujuinya ketentuan tentang pemberlakuan sanksi lokal
- c. Disampaikannya informasi tentang status kontribusi pendanaan Kabupaten
- d. Disampaikannya rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan di kecamatan
- e. Disepakatinya rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan desa,

- f. Ditetapkannya rancangan Anggaran Dasar BKAD menjadi ketetapan Anggaran Dasar BKAD. Penyusunan Anggaran Dasar BKAD ini sendiri dilakukan setelah MAD prioritas usulan.

Penuturan dan penjelasan dari SH 51 tahun selaku Ketua Kelompok Proyek SPP Kakap 1, menjelaskan bahwa:

*“Dateng MAD Penetapan Usulan diwastakaken kalehan enam orang wakil saking desa yakni: Kepala desa, 2 orang wakil saking BPD, 3 orang tokoh masyarakat (minimal 3 saking enam wakil niku estri). Dan dihadiri: Camat kalehan staf, wakil seeking sedoyo instansi sektoral kecamatan (ISK), Kades, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), wakil perempuan saking setiap desa, Organisasi Massa (Ormas), lan tokoh masyarakat”.*

Yang artinya dari sitasi atau penuturan tersebut, yakni:

*“Dalam MAD Penetapan Usulan terdiri dari: enam orang wakil per desa yakni: Kepala desa, 2 orang wakil dari BPD, 3 orang tokoh masyarakat (minimal 3 dari keenam wakil tersebut adalah perempuan). Dan dihadiri oleh: Camat dan staf terkait, wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK), Kades, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), wakil perempuan dari setiap desa, Organisasi Massa (Ormas), dan tokoh masyarakat”.*

Hasil dari keputusan MAD penetapan usulan disahkan sesegera mungkin oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan di desa Sobontoro. Dalam lampiran SPC mencantumkan nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan oleh PjOK (Pertanggung Jawaban Operasional Kegiatan) kepada Tim Kegiatan PNPM Mandiri Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati, Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten.

#### **11. Musdes Informasi Hasil MAD**

Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Musdes ini dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. Khusus bagi desa-desa

yang mendapatkan dana Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan, musdes ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terpilih dan ditetapkannya susunan lengkap TPK, yaitu ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai
  - b. Disosialisasikannya jadwal pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri
  - c. Disosialisasikannya sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelaksanaan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di desa tersebut
  - d. Disepakatinya rencana tanggung renteng bersama berupa tabungan Rp. 5.000 perbulan. Untuk surat pernyataan tanggung renteng dapat dilihat dalam Lampiran 8 dan surat kesediaan menabung pada Lampiran 9.
  - e. Terbentuknya Tim Pemantau yang akan memantau pelaksanaan SPP PNPM
  - f. Terpilihnya Ketua Bidang Kegiatan (BPK) Drs. Sarkijo sebagai TPK
- Dalam Penuturan PNT 53 tahun selaku anggota Proyek SPP PNPM Mandiri, menjelaskan:

*“Mantun verifikasi lan usulan sampun diterima dilakukaken musdes informasi kagem nyukani informasi kagem warga kagem jelasaken tujuan, dendo, syrat Derek proyek SPP PNPM Mandiri engkang sakderengipun sampun dijelasaken dating Musdes sosialisasi utawi musdes perencanaan”*

Yang artinya dari sitasi atau penuturan tersebut, yakni:

*“Setelah verifikasi selesai dan usulan diterima maka dilakukan Musdes Informasi untuk memberikan informasi ke warga dan memperjelas mengenai tujuan, sanksi, dan persyaratan untuk ikut dalam Proyek SPP PNPM Mandiri yang telah dijelaskan pada Musdes sosialisasi atau musdes perencanaan”*

Fasilitator dalam musdes informasi hasil MAD adalah Fasilitator Kecamatan atau PjOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan). Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta Musdes informasi hasil MAD adalah perempuan.



## 12. Pengesahan Dokumen SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan)

Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), PjOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan) dan Ketua UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) akan membuat SPPB, yang diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati. Pengesahan SPPB dilakukan langsung segera sesudah diterbitkan SPC (Surat Penetapan Camat), dan tidak perlu menunggu persetujuan dari kabupaten. Kelengkapan dokumen sebagai lampiran SPPB, terdiri dari: usulan kegiatan, RAB detail kegiatan SPP PNPM Mandiri, dan jadwal pelaksanaan. Adapun contoh dari Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Desa Sobontoro dapat dilihat pada Lampiran 10.

Setelah SPPB sudah disahkan maka pencairan dana dapat direalisasikan, untuk gambar pencairan dana dapat dilihat pada Lampiran 11. Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Sobontoro. Mekanisme pencairan dana yakni:

- Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan antara UPK dengan TPK
- TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan
- Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

Dari penjelasan YSM 55 tahun, menjelaskan:

*“Pencairan dana dilaksanakan dateng balai dusun kalehan petugas kecamatan engkang disaksikan sedoyo anggota SPP beserta pengurus, kepala desa, KPMD, kalehan tokoh masyarakat. Syarat pencairan dana kagem peminjam diwajibkan mbeto foto copi lan asli KTP suami - istri”*

Yang artinya dari sitasi atau penuturan tersebut, yakni:

*“Saat pencairan dana dilakukan dibalai desa oleh pihak kecamatan dan disaksikan oleh seluruh anggota SPP beserta pengurus SPP, dan kepala desa, KPMD dan tokoh masyarakat yang ada. Saat pencairan dana anggota peminjam diwajibkan untuk membawa KTP suami – istri yang asli beserta fotokopinya.”*

## 6.2.2. Tahap Pelaksanaan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana untuk Proyek SPP PNPM Mandiri. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), dan seluruh pelaku Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) oleh Camat.

### 1. Persiapan Pelaksanaan

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksanan Unit Kecamatan (TPU – Kec) pelaksanaan Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri diawali dengan beberapa rapat – rapat, yakni:

#### a. Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan

Rapat koordinasi ini difasilitasi oleh PL, Fasilitator dan PjOK. Rapat dihadiri oleh pengurus UPK, Kades, dan TPK setiap desa penerima dana SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Waktu penyelenggaraan rapat, tidak lebih dari satu minggu setelah pelaksanaan pelatihan bagi TPK dan UPK. Hasil yang diharapkan: Disepakati mekanisme koordinasi dan rapat-rapat lain selama periode pelaksanaan, yakni melalui tahlilan dan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga).

#### b. Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa

Pengurus TPK bersama Kades secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan di desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan SPP PNPM Mandiri. Rapat persiapan di desa difasilitasi oleh KPMD (Kader Perempuan Masyarakat Desa). Hasil yang diharapkan : disepakatinya

peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Sobontoro, serta disepakatinya jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin 2 minggu sekali untuk tahlilan dan 1 bulan untuk PKK untuk evaluasi pelaksanaan.

## 2. Pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam MAD penetapan usulan dan musdes informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat.
- b. Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut terlibat dalam Proyek SPP PNPM Mandiri baik sebagai anggota maupun pengurus.
- c. Penggunaan dana harus sesuai dengan rencana dan kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu pembayarannya tanpa tunggakan atau kredit macet.

Dalam pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri akan dilakukan rapat evaluasi TPK. Rapat evaluasi TPK ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Rapat evaluasi TPK dilaksanakan secara periodik saat tahlilan 2 minggu sekali atau bisa juga saat pertemuan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) 1 bulan sekali. Hasil yang diharapkan dalam rapat evaluasi TPK, yakni: Laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana yang sudah dibuat, adanya pembahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan, dan tersusunnya Laporan Penggunaan Dana (LPD) SPP PNPM Mandiri. Sehingga uraian diatas sesuai dengan penuturan dari NNK 26 tahun dan TMN 33 tahun selaku anggota Proyek SPP PNPM Mandiri, menjelaskan:

“Simpan Pinjam Perempuan merupakan bantuan pinjaman modal khusus untuk perempuan sebagai modal usaha dagang, tambahan dana untuk pertanian dan berlayar. Tetapi Proyek SPP PNPM Mandiri tidak hanya memberikan bantuan modal saja melainkan memberikan bantuan keterampilan berupa keterampilan dalam pembukuan untuk TPU dan menjahit untuk anggota Proyek SPP PNPM Mandiri. Anggota Proyek SPP PNPM Mandiri juga diusahakan untuk aktif dalam jamaah tahlil dan PKK. Pembayaran angsuran kredit dilakukan pada 2 minggu sekali saat pertemuan tahlilan atau 1 bulan saat pertemuan PKK”

Penuturan dari TMN 33 tahun, menjelaskan:

*“Jamaah tahlil dan PKK sebagai wadah kagem sosialisasi kearah warga masyarakat dan wadah penyalur informasi keadaan desa. Mboten namung niku, jamaah tahlil dan PKK didamel wadah pertemuan rutin. Sehingga saget memudahkan evaluasi kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri”*

Yang artinya dari sitasi atau penuturan tersebut, yakni:

“Jamaah tahlil dan PKK digunakan sebagai wadah untuk bersosialisasi dengan warga masyarakat sekaligus wadah dimana berbagai informasi mengenai keadaan desa dapat diperoleh. Selain itu jamaah tahlil dan PKK merupakan wadah yang pertemuannya dilakukan secara kontinyu. Sehingga akan memudahkan untuk evaluasi dalam kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri”

### **3. Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban**

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksanan Unit Kecamatan (TPU – Kec) Musdes pertanggungjawaban bertujuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban ini dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan tahap pertama dan tahap kedua. Hasil dari musdes pertanggungjawaban adalah:

- a. Penyampaian laporan dari TPK tentang penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan SPP PNPM, tingkat partisipasi, dan keterlibatan perempuan. Penerimaan dana dapat dilihat pada Lampiran 2. Dan hasilnya dalam SPP PNPM Mandiri di desa Sobontoro berjalan dengan baik dengan keaktifan dari perempuan

sebagai anggota dan pengurus dalam kegiatan maupun pembayaran kredit melalui jamaah tahlil dan PKK.

- b. Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat. Dalam pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri ada kendala berupa kredit macet dari beberapa anggota namun dapat ditanggulangi dengan kesepakatan tanggung renteng dana tabungan sebesar Rp.5.000 perbulan, sehingga dari dana tabungan inilah kendala yang dialami tidak menjadi penghalang karena anggota yang kreditnya macetpun akan segera melunasi pembayaran dengan secepatnya bila sudah ada uang. Dari kutipan SH 51 tahun, menjelaskan:

“Apabila ada anggota yang telat membayar maka akan dilakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada anggota tersebut dan kepastian akan membayar kapan, sementara itu akan digunakan dana tabungan untuk membantu anggota yang kreditnya terlambat itu, Karena dalam pembayaran ini pun tidak ingin memberatkan kepada para anggota Proyek SPP PNPM Mandiri. Untuk pembayaran dilakukan perbulan di pertemuan tahlilan dan PKK dan dibukukan dalam buku kas SPP PNPM Mandiri”

Fasilitator dalam musdes pertanggungjawaban adalah FK-Kec/FT-kec atau PjOK. Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta Musdes pertanggungjawaban adalah perempuan.

#### **4. Dokumentasi Kegiatan**

Seluruh kegiatan dari Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan didokumentasikan oleh FK-Kec/FT-Kec. Meskipun demikian, untuk kepentingan desa dan kecamatan, maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumentasi kegiatan. Pada akhir periode pelaksanaan SPP PNPM Mandiri Perdesaan, F-Kec/FT-Kec harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan: foto-foto yang ditampilkan merupakan foto SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro dan setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.

“ dokumentasi berupa foto – foto hasil kegiatan, catatan dari notulen ketika rapat atau musyawarah, dan data – data pembukuan dari proyek SPP PNPM Mandiri” Bu ida 26 tahun

Dari hasil wawancara dengan ID, 24 tahun dokumentasi berupa foto – foto kegiatan, arsip atau data – data pembukuan, dan catatan dari notulen ketika musyawarah di desa. Dokumentasi ini bertujuan untuk arsip dan bukti bahwa proyek SPP PNPM Mandiri ini benar – benar di laksanakan. Juga memudahkan untuk memonitoring dari dokumentasi yang ada.

## 5. Penyelesaian Kegiatan

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksana Unit Kecamatan (TPU – Kec) penyelesaian Proyek Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri sebagai bentuk pertanggungjawaban TPK di desa. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan, meliputi:

### a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) memuat pernyataan bahwa kegiatan SPP PNPM Mandiri telah selesai dilaksanakan (100%) dan siap diperiksa oleh PjOK. LP2K ditandatangani oleh TPK dan FK/FT.

### b. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)

MDST merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pengelolaan dana dan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat setelah Proyek SPP PNPM Mandiri selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil yang dari MDST (Musyawarah Desa Serah Terima):

1. Penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan maka berakhir sudah tanggung jawab TPK terhadap kegiatan di lapangan.
2. Laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan SPP, dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana.

3. Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), dan penggunaan dana.
4. Ditetapkannya rencana pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah diserahterimakan, mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan. Fasilitator dalam musdes serah terima adalah FK/FT atau PjOK. Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta Musdes serah terima adalah perempuan

### 6.2.3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Dari hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksanan Unit Kecamatan (TPU – Kec) pengendalian dilakukan melalui pemantauan Proyek SPP PNPM Mandiri, pengendalian ini bertujuan :

- a. Menjaga kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri melalui proses dan mekanisme yang benar
- c. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
- d. Mengendalikan pemanfaatan dana Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- e. Mengendalikan agar setiap pelaku Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Penuturan dari JTMI 53 tahun selaku anggota Proyek SPP PNPM Mandiri, menjelaskan:

*“pengawasan lan evaluasi proyek SPP PNPM Mandiri dilaksanakan ketawis proyek saget berjalan apik kados tujuan nipun SPP engkang sampun di setuju. Tujuan sak meniko meliputi: saget maringi modal, keterampilan, lan bantu perempuan Derek*

*organisasi, serta tasih melibatkan hak lan kewajiban saking anggota SPP, serta sedoyo bukti pembayaran dilebet aken di buku kas.*

Dari sitasi diatas dapat diartikan, sebagai berikut:

“Monitoring dan evaluasi dilakukan agar Proyek SPP PNPM Mandiri dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yakni membantu permodalan, keterampilan, dan membantu perempuan dalam berorganisasi, dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari anggota Proyek SPP, serta semua pembayaran dibukukan dalam buku kas”

Sedangkan RMLH 46 tahun selaku ketua kelompok Proyek SPP PNPM Mandiri, menjelaskan bahwa:

“Monitoring dan Evaluasi kegiatan Proyek SPP dilaksanakan setiap bersamaan dengan tahlilan (2 minggu) dan PKK (1 bulan) tetapi pembayaran dana pinjaman diangsur 12 kali selama satu tahun sehingga pembayarannya 1 bulan sekali dengan ketentuan suku bunga 2% perbulan ditingkat TPK dan 1,5 % ditingkat UPK”

Strategi dasar dalam pengendalian Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan
- b. Pelaku Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah
- c. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang Proyek SPP PNPM Mandiri telah ditetapkan. Jenis Kegiatan pemantauan dalam Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:



- a. Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat  
Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok atau tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa.
- b. Pemantauan dan pemeriksaan oleh pemerintah  
Dana Proyek SPP PNPM Mandiri adalah bagian dari anggaran belanja Negara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Proyek SPP PNPM Mandiri berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam Proyek SPP PNPM Mandiri (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PjOK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. Pemantauan dan pemeriksaan berjenjang  
Koordinator wilayah, manajemen provinsi, fasilitator kabupaten dan kecamatan, dan pendamping lokal bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan diterapkan dengan benar. Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi:
  1. Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur Proyek SPP PNPM Mandiri
  2. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Proyek SPP PNPM Mandiri

3. Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dokumen dan administrasi.

Evaluasi dalam Proyek SPP PNPM Mandiri dapat dilakukan pada saat semua kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri berakhir dalam 1 tahun. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku Proyek SPP PNPM Mandiri. Sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui apa saja kelemahan dan hambatan agar dapat diperbaiki pada kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri berikutnya. Hambatan dan Kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Proyek Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sobontoro diantaranya adalah:

- a. Ada beberapa kredit macet dari beberapa anggota Proyek SPP PNPM Mandiri, solusinya diadakan tanggung renteng atau tabungan Rp. 5.000 perbulan. Dan tabungan ini nantinya akan dikembalikan kembali pada masyarakat setelah kegiatan Proyek SPP telah selesai.
- b. Terbatasnya sumberdaya manusia yang menguasai dalam pembukuan, solusinya TPU (Tim Pembuat Usulan) diberikan pelatihan mengenai pembukuan Proyek SPP PNPM Mandiri agar lebih terampil.
- c. Ada beberapa kendala dalam persepsi masyarakat berkenaan dengan manfaat, aturan, dan proses kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri yang berbeda dengan ketentuan dalam musdes, oleh karena itu solusinya sering dilakukan sosialisasi dan pendekatan secara personal kepada masyarakat akan manfaat, aturan, dan proses kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri yang sebenarnya.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :

- a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan
- b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan.
- d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya
- f. Gambaran keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Sistem laporan dari Tim Pengelola Kegiatan dalam Proyek SPP PNPM Mandiri Perdesaan dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif TPK. Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat. Untuk foto dalam monitoring dan evaluasi proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri dapat dilihat pada Lampiran 12. Setelah selama satu periode berlalu maka akan ada tahap pelestarian kegiatan dengan syarat: kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri berjalan dengan baik tanpa ada kredit macet, masih diperlukan oleh masyarakat, adanya SDM yang ikut bersedia melestatikan Proyek SPP PNPM Mandiri.

Sehingga kesimpulannya dari proses Pelaksanaan proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro sudah berjalan dengan baik mulai dari proses persiapan, pelaksanaan proyek SPP PNPM Mandiri, hingga pada proses monitoring dan evaluasi, hal ini terbukti dengan dapat diatasinya semua kendala dalam proyek SPP PNPM Mandiri seperti kredit macet dengan solusi menggunakan uang tabungan anggota SPP PNPM Mandiri sehingga proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro dapat dilanjutkan pada tahap perguliran. Selain itu bila ditinjau dari hasil lapang maka proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro sudah berjalan sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita (2005) yakni: Dalam pelaksanaan proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro dapat mengembangkan sektor yang sudah maju seperti home industri ikan untuk bersama – sama dengan masyarakat dapat maju bersama dan ikut serta

membangun desa, serta melihat peluang yang besar dengan melihat banyaknya tenaga kerja wanita yang belum dioptimalkan dengan memanfaatkan sumberdaya alam berupa laut maupun hasil pertanian dengan membangun home industri dan bekerjasama dengan home industri yang sudah ada berupa home industri keripik singkong, dan pengolahan hasil laut seperti terasi, ikan asin, serta kedepannya pengalengan ikan asin. Sehingga dengan adanya proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro dapat memberikan bantuan terhadap perempuan yakni menciptakan iklim yang baru yang memihak dan mengembangkan perempuan dengan bantuan modal, keterampilan, dan pengetahuan untuk lebih maju lagi dalam melaksanakan semua kegiatan baik dalam keluarga dan sosial sehingga dapat meningkatkan jati diri dari perempuan di Desa Sobontoro.

Pelaksanaan proyek SPP PNPM Mandiri juga selaras dengan proses atau tahapan pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004), yang meliputi: tahap penyadaran dari masyarakat yaitu dengan sosialisasi yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai proyek SPP PNPM Mandiri dan untuk mengetahui akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan menyadari kekurangan berupa modal usaha dan keterampilan dan kelebihan potensi tenaga kerja perempuan yang belum dimanfaatkan secara maksimal maka muncullah proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro yang kemudian dalam tahap transformasi yang akan dilanjutkan dengan tahap peningkatan intelektual yang memberikan banyak pelatihan dan keterampilan seperti jahit menjahit, pengetahuan akan mengolah hasil pertanian dan tangkapan ikan, pembukuan buku kepada perempuan. Sehingga dengan demikian penambahan kemampuan atau keterampilan tersebut dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan beserta jati diri dari perempuan anggota proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro.

### **6.3. Analisis Gender dalam Peningkatan Jati Diri Perempuan Melalui Proyek Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri.**

Dalam penelitian ini digunakan analisis gender berupa analisis Harvard sebagai alat bantu untuk mengetahui tingkat peningkatan jati diri perempuan pada anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri. Analisis Harvard terdiri dari empat indikator analisis yakni: analisis aktivitas, analisis akses, analisis kontrol, dan analisis manfaat atau benefit. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada penjelasan dibawah ini:

#### **6.3.1. Analisis Aktivitas Perempuan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri**

Penduduk Desa Sobontoro mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan, dan melakukan perdagangan, oleh karena itu tentunya perempuan di Desa Sobontoro merupakan istri dari petani, pelayar, dan pedagang yang kebanyakan dari ibu – ibu atau perempuan ini hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, atau hanya ikut membantu dalam berdagang, dan membantu dalam bertani. Oleh karena itu Simpan Pinjam Perempuan ini ingin memanfaatkan waktu luang dari ibu – ibu untuk hal yang lebih berguna, sehingga Proyek SPP PNPM Mandiri ini tidak hanya meminjamkan modal usaha kepada perempuan Desa Sobontoro akan tetapi juga ingin memberdayakan perempuan ini agar kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat bagi kehidupannya dengan memberikan pelatihan, keterampilan, dan cara berorganisasi dan bersosialisasi yang baik dengan masyarakat lainnya agar terjadi peningkatan jati diri dari perempuan Desa Sobontoro.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh perempuan Desa Sobontoro dalam rutinitasnya sehari – hari sebelum mengikuti Proyek SPP PNPM Mandiri yakni: lebih banyak bekerja di dalam rumah seperti menjaga anak, memasak, mengurus rumah, lalu bersama – sama suami menyiapkan peralatan untuk berlayar dan bertani. Setelah siang hari para perempuan yang kenyataannya adalah para ibu – ibu akan menyambut kedatangan

suami dan anaknya untuk sekedar memberikan dukungan dan perhatiannya sebagai seorang suami, ada kalanya juga membantu suami yang bekerja untuk ikut menanam padi disawah, dan sekedar mengantarkan makanan untuk suami yang bekerja di sawah. Sedangkan ibu-ibu istri nelayan akan menunggu kepulangan suami dari melaut. Ibu –ibu pedagang pun memiliki rutinitasnya sendiri memiliki tanggung jawab untuk bekerja mengurus pekerjaan rumah, berbelanja di pasar untuk kebutuhan sehari – hari sekaligus untuk bahan atau barang yang akan dijual, akan tetapi perempuan Desa Sobontoro yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan amatlah kecil jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya wawasan akan pentingnya mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang dapat menumbuhkan rasa saling persaudaraan, mempermudah akses informasi kepada masyarakat, belajar untuk lebih bisa menghargai dan bertoleransi akan pendapat orang lain dalam forum kegiatan masyarakat seperti PKK dan Jamaah Tahlil. Oleh karena itu Proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro tidak hanya membantu masyarakat dalam permodalan usaha melainkan juga untuk ikut memberdayakan perempuan agar lebih berkembang, dengan perkembangan perempuan ke arah yang lebih positif ini diharapkan akan meningkatkan jati diri dari perempuan. Adapun gambar dari kegiatan produktif dan reproduksi dan usaha setelah mengikuti proyek SPP PNPM Mandiri yang dilakukan perempuan Desa Sobontoro pada lampiran 13 dan lampiran 14. Bila dilihat dari penjelasan NR 38 tahun menyatakan:

*“kegiatan kados mengurus rumah tangga, merawat anak, nyiapaken maem, belonjo, lan derek mbantu nyiapaken alat – alat kagem berlayar lan betani. Kagem tandur pari saben, dilakukaken kalehan estri, lha... sakmenika bapak – bapak mikir estri saget luwih sabar. Benten maleh kagem estri berdagang, bapak – bapak gadah pendapat yakni estri niku gadah sifat lemah lembut lan pinter ngeraju dadine ngegeh cocok kagem dagang”*

Arti dari sitasi diatas, yakni sebagai berikut:

“Kegiatan seperti mengurus rumah, anak, menyiapkan makanan, berbelanja, dan ikut membantu dalam menyiapkan alat – alat yang akan digunakan dalam berlayar dan bertani. Untuk menanam padi di sawah

(tandur) lebih sering dilakukan perempuan karena bapak – bapak lebih menganggap perempuan itu lebih sabar. Sedangkan untuk perempuan yang berdagang pendapat bapak – bapak yakni perempuan itu cocok untuk berdagang karena sifatnya yang lembut dan pintar merayu”

Paradigma umum yang ada dimasyarakat Desa Sobontoro bahwa perempuan lebih cocok untuk tinggal dirumah dengan kegiatan aktivitas produktif dan reproduktif inilah yang menyebabkan perempuan tidak dapat berkembang, karena tanggung jawab sebagai istri ingin mematuhi perintah dari suami, dan merawat buah hati dengan setulus hati. Sehingga dorongan dari suami dan pemerintah amatlah dibutuhkan untuk memberikan rangsangan kepada perempuan dalam mengikuti suatu pemberdayaan perempuan untuk lebih dapat mengembangkan diri yang dapat meningkatkan jati diri dari perempuan tersebut.

Selama ada Proyek SPP PNPM Mandiri telah memberikan motivasi perempuan untuk lebih dapat mengembangkan diri dengan pemberian pinjaman dana usaha, dan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan perempuan seperti pelatihan pembukuan, jahit – menjahit, membordir, mengikuti kegiatan masyarakat berupa tahlilan dan PKK yang dapat melatih perempuan dalam berorganisasi, bersosialisasi dengan baik untuk lapang menerima pendapat dan saran demi kemajuan bersama.

Dalam penelitian ini jumlah responden yang digunakan sebanyak 69 orang dari anggota Proyek SPP PNPM Mandiri dengan kriteria: Jumlah responden yang jenis usahanya sebagai petani sebanyak 23 orang, nelayan sebanyak 6 orang responden, pedagang 27 orang responden dan penjahit sebanyak 3 orang. Untuk aktivitas dari perempuan anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri dapat dilihat dalam Lampiran 15.

Lampiran 15 menjelaskan bahwa untuk aktivitas produksi dan pembagian kerja anggota SPP PNPM Mandiri sebelum dan sesudah mengikuti SPP PNPM Mandiri didominasi oleh kaum perempuan (istri). Aktivitas ini dibagi menjadi 3(tiga) bagian yakni aktivitas produktif,

aktifitas reproduktif, dan aktivitas sosial yang dilaksanakan oleh perempuan baik sebelum mengikuti Proyek SPP PNPM- MP maupun setelah mengikuti Proyek SPP PNPM- MP. Untuk aktivitas produksi pada persiapan dan pelaksanaan kegiatan pertanian dalam kegiatan penyiapan bibit sebelum mengikuti SPP PNPM- MP didominasi oleh laki – laki sebesar 56,52% untuk perempuan sebesar 26,09%, dan dilakukan bersama sebesar 17,39% sedangkan selama mengikuti proyek SPP PNPM- MP untuk kegiatan penyiapan bibit bergeser dari didominasi oleh laki – laki menjadi banyak dilakukan secara bersama karena laki – laki (suami) bisa lebih percaya bila perempuan (istri) diikutsertakan akan lebih cepat membantu pekerjaan dan meringankan ongkos produksi dalam pertanian. Hal ini sama halnya dengan kegiatan penyiapan lahan pertanian sebelum Proyek SPP PNPM- MP juga didominasi oleh laki – laki sebesar 78,26%, perempuan sebesar 4,35%, dan secara bersama sebesar 17,39%, namun selama mengikuti proyek SPP PNPM-MP menjadi sama – sama dominan antara laki – laki dan dilakukan secara bersama sebesar 43,48% dan untuk perempuan naik menjadi 13,04%. Untuk kegiatan penanaman sebelum proyek SPP dan sesudah proyek SPP PNPM – MP tidak ada perubahan tetap didominasi secara 100% oleh perempuan, penjelasan mengenai alasan penanaman didominasi oleh perempuan dituturkan oleh WR 51 tahun, yakni:

*“Tiang estri luwih saget telaten lan sabar damel tandur, sehingga kegiatan tandur luwih cocok kagem estri”*

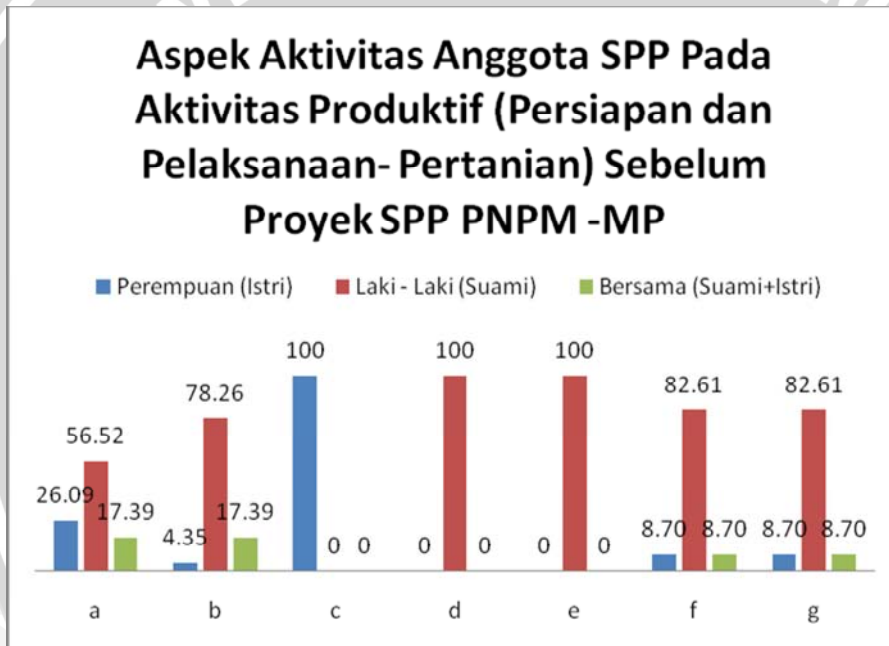
Ari dari sitasi diatas dapat dijelaskan di bawah ini:

*“Perempuan dirasa lebih bisa teliti dan sabar ketika tandur, sehingga kegiatan ini lebih cocok untuk perempuan”*

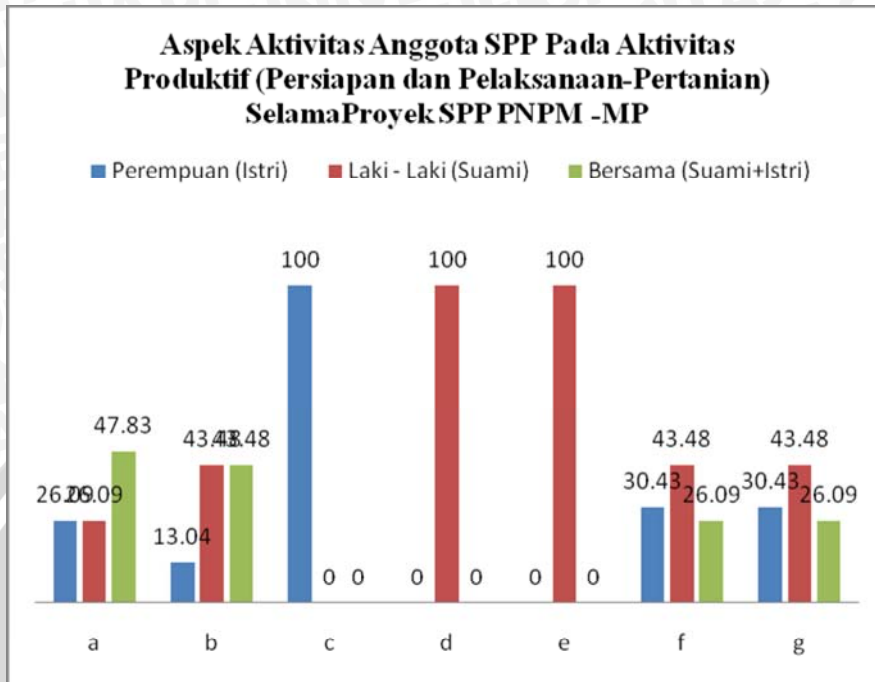
Untuk kegiatan pengairan dan pemupukan sebelum dan sesudah proyek SPP PNPM-MP didominasi oleh laki- laki sebesar 100%. Hal ini dikarenakan laki- laki lebih mengetahui kadar kebutuhan air dan dosis pupuk untuk tiap tanaman yang ditanam. Perempuan hanya sekedar tahu harga pupuk yang digunakan dan berapa yang harus dibayar ketika



melakukan pengairan dari sumur pompa. Sedangkan untuk pemanenan dan penjemuran sebelum mengikuti proyek SPP PNPM-MP didominasi oleh laki – laki sebesar 82,61%, perempuan sebesar 8,70%, dan bersama sebesar 8,70%, sedangkan selama mengikuti proyek SPP PNPM-MP dominasi laki – laki sedikit berkurang menjadi 43,48%, perempuan naik menjadi 30,43%, dan dilakukan secara bersama juga naik menjadi 26,09%. Hal ini dikarenakan mulai adanya pembagian kerja dan kepercayaan kepada perempuan untuk dapat membantu kegiatan suami walaupun peningkatan itu hanya dalam jumlah kecil.



**Gambar 6.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Persiapan dan Pelaksanaan- Pertanian) Sebelum Proyek SPP PNPM- MP

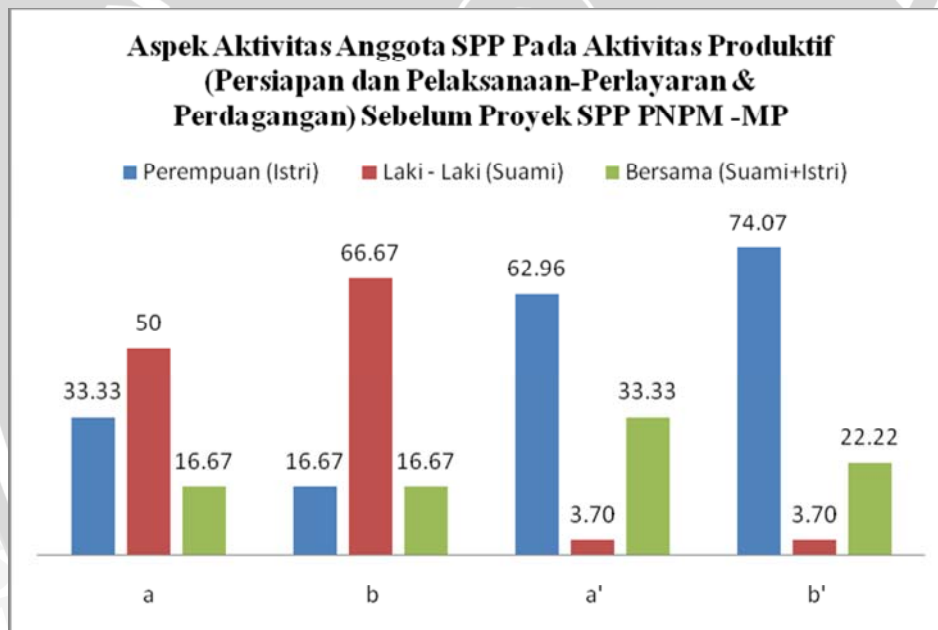


**Gambar 7.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Persiapan dan Pelaksanaan- Pertanian) Selama Proyek SPP PNPM- MP

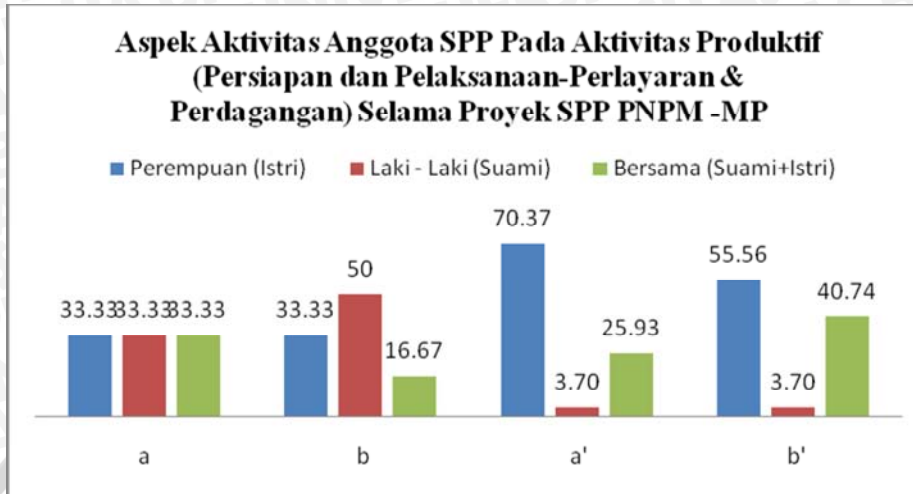
Keterangan :  
 a : Penyiapan bibit  
 b : Penyiapan lahan  
 c : Penanaman  
 d : Pengairan  
 e : Pemupukan  
 f : Pemanenan  
 g : Penjemuran

Sedangkan untuk kegiatan produktif dalam kegiatan nelayan untuk penyiapan jaring dan bekal awalnya sebelum ada proyek SPP PNPM-MP didominasi oleh laki – laki sebesar 50% namun, sedangkan selama ada proyek SPP PNPM- MP menjadi rata untuk laki – laki, Perempuan, dan bersama sebesar 33,33%. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebelum dan sesudah SPP PNPM- MP tetap didominasi oleh laki- laki sebesar 66,67% dan selama ada proyek SPP turun menjadi 50% karena terjadi peningkatan dari keterlibatan perempuan yang dulunya sebesar 16,67% menjadi 33,33%.

Dari data lampiran 15 untuk kegiatan perdagangan dalam kegiatan menyiapkan barang yang akan dijual didominasi oleh perempuan sebelum proyek SPP PNPM-MP sebesar 62,96% menjadi 70,37% selama mengikuti proyek SPP PNPM-MP, hal ini selaras dengan kegiatan membersihkan dan menjaga warung juga didominasi perempuan sebelum Proyek SPP PNPM-MP sebesar 74,07 dan turun menjadi 55,56% selama ada proyek SPP PNPM-MP karena ada toleransi dari laki – laki (suami) untuk mau membantu pekerjaan dalam menjaga warung ketika perempuan (istri) sedang mengikuti kegiatan proyek SPP PNPM-MP sehingga dilakukan secara bersama- sama yakni dari 22,22% naik menjadi 40,74%.



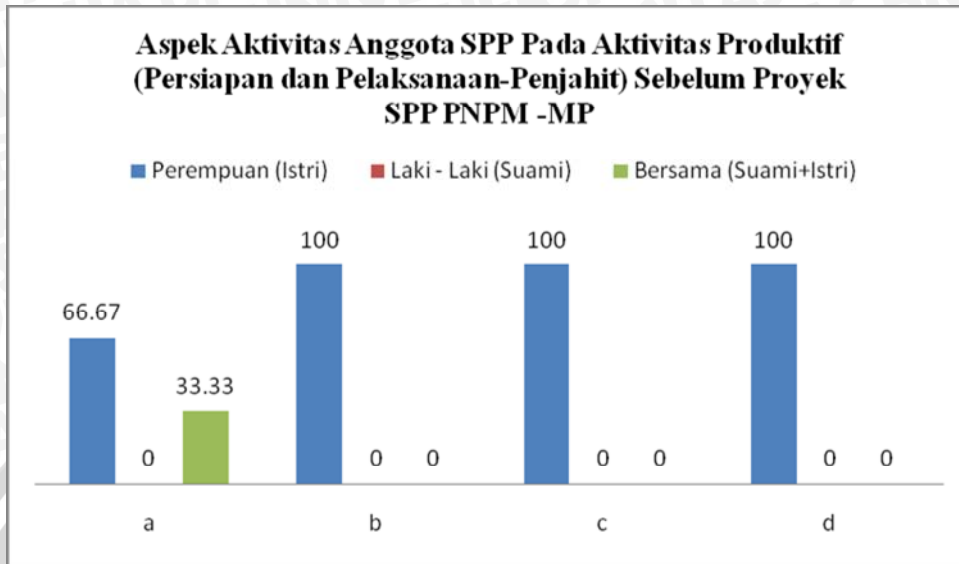
**Gambar 8.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Persiapan dan Pelaksanaan- Pelayaran dan Perdagangan) Sebelum Proyek SPP PNPM- MP



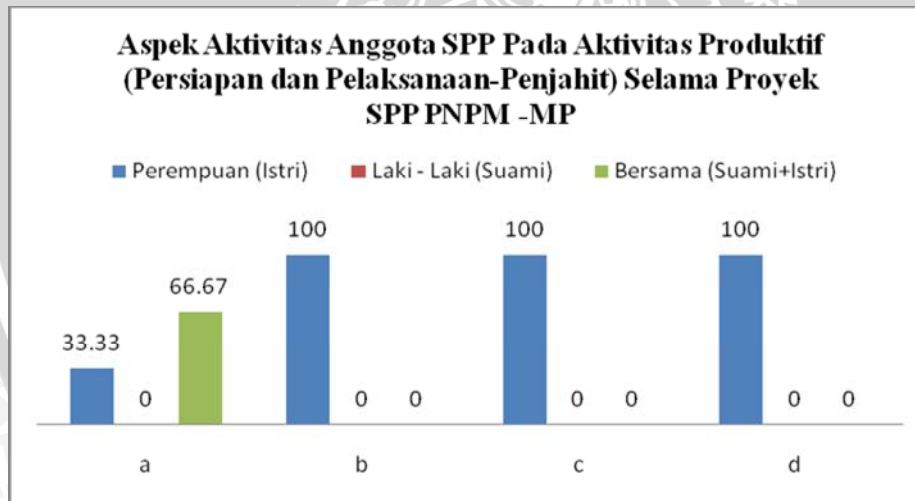
**Gambar 9.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Persiapan dan Pelaksanaan- Pelayaran dan Perdagangan) Selama Proyek SPP PNPM- MP

Keterangan : a : Penyiapan jaring dan bekal  
 b : Penangkapan ikan  
 a' : Menyiapkan barang yang akan dijual  
 b' : Membersihkan dan menjaga warung

Untuk aktivitas produktif dalam kegiatan jahit menjahit untuk pembelian bahan sebelum Proyek SPP PNPM-MP didominasi oleh perempuan sebesar 66,67% namun selama ada proyek SPP PNPM-MP bergeser menjadi dilakukan bersama sebesar 66,67% hal ini dikarenakan adanya toleransi dari laki- laki (suami) untuk saling bekerjasama dengan perempuan (istri). Sedangkan untuk kegiatan membuat pola, memotong pola, dan menjahit sebelum dan selama proyek tidak ada perubahan tetap didominasi oleh perempuan sebesar 100%, hal ini dikarenakan kegiatan menjahit membuat pola dan memotong pola perempuan lebih teliti, sabar, dan rapi.



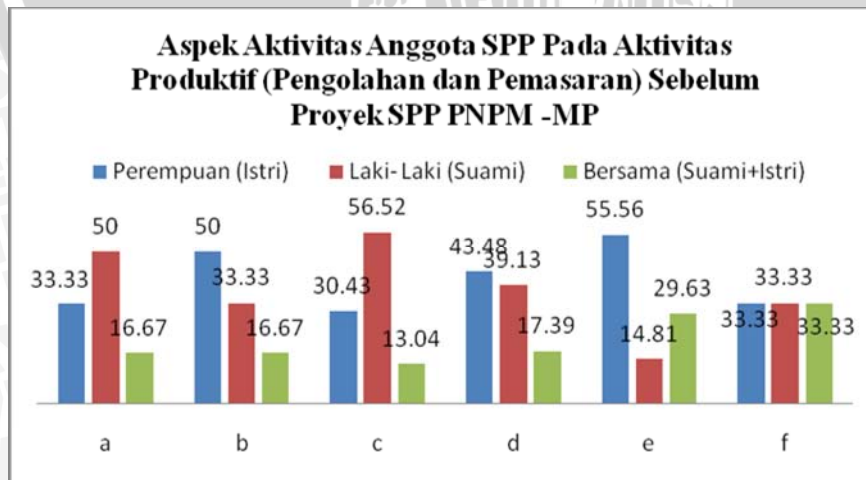
**Gambar 10.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Persiapan dan Pelaksanaan- Penjahit) Sebelum Proyek SPP PNPM- MP



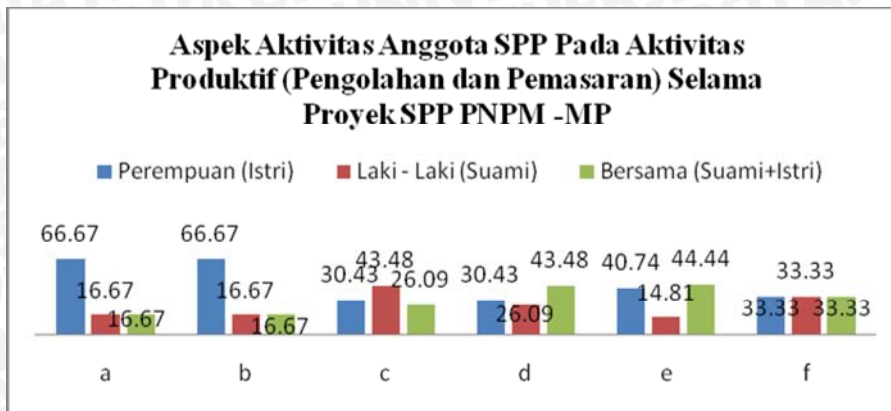
**Gambar 11.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Persiapan dan Pelaksanaan- Penjahit) Selama Proyek SPP PNPM- MP

Keterangan : a : Pembelian bahan                      c : Pematangan  
 b : Membuat pola                                      d : Menjahit

Aktivitas produktif dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran untuk pengolahan hasil ikan sebelum proyek SPP PNPM-Mp didominasi oleh laki – laki sebesar 50% dan bergeser mnjadi didominasi oleh perempuan selama proyek SPP PNPM-MP sebesar 66,67% hal ini dikarenakan dulunya oleh laki- laki sebelum ada proyek SPP PNPM-MP hasil ikan dijual pada tengkulak dan sisanya untuk lauk sendiri, tetapi selama ada proyek perempuan lebih kreatif untuk membuat hasil ikan menjadi produk yang lebih berguna untuk konsumen dengan modal awal dari pinjaman dana SPP PNPM-MP. Untuk kegiatan pemasaran hasil ikan sebelum dan selama ada Proyek SPP didominasi oleh perempuan dari 50% naik menjadi 66,67%, hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian pengolahan hasil pertanian yang didominasi oleh laki - laki dari 56,52% menjadi 43,48%. Untuk kegiatan pemasaran hasil pertanian sebelum proyek SPP didominasi oleh perempuan sebesar 43,48% dan bergeser menjadi dilakukan bersama- sama dengan nilai sebesar 43,48% selama proyek SPP PNPM-MP. Untuk kegiatan menjaga toko sebelum proyek didominasi oleh perempuan sebesar 55,56% dan bergeser menjadi dikerjakan bersama- sama sebesar 44,44% selama proyek SPP. Sedangkan untuk informasi pemasaran hasil jahit dari penelitian tidak ada yang mendominasi sebelum dan selama proyek dengan nilai sebesar 33,33%.



**Gambar 12.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Pengolahan & Pemasaran) Sebelum Proyek SPP PNPM-MP



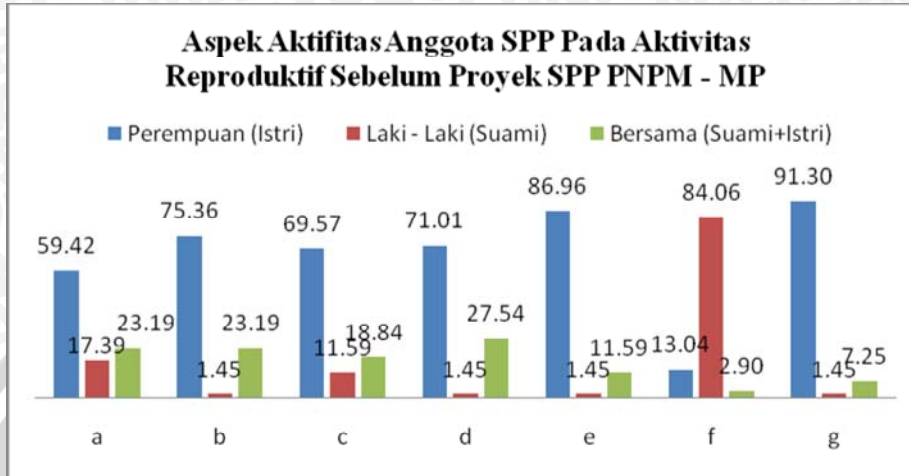
**Gambar 13.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif (Pengolahan & Pemasaran) Selama Proyek SPP PNPM- MP

Keterangan :

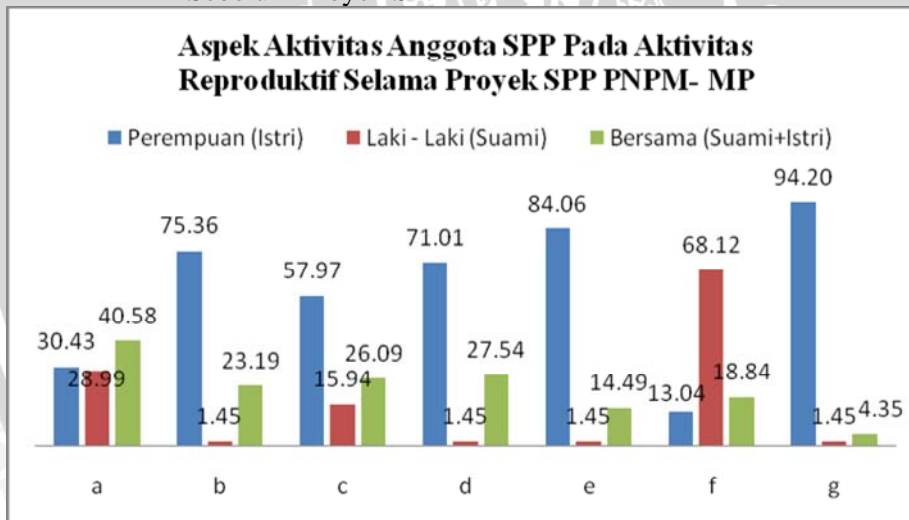
- a : Pengolahan hasil ikan
- b : Pemasaran hasil ikan
- c : Pengolahan hasil pertanian
- d : Pemasaran hasil pertanian
- e : Menjaga toko
- f : Informasi pemasaran hasil jahit

Aktivitas reproduktif dari hasil penelitian untuk kegiatan mengambil air didominasi oleh perempuan sebelum ada proyek dengan nilai 59,42% bergeser menjadi kegiatan yang dilakukan secara bersama sebesar 40,48% selama proyek SPP. Untuk kegiatan menyiapkan makanan tetap didominasi oleh perempuan sebesar 75,36%, hal ini selaras dengan kegiatan menjaga anak, berbelanja, dan mengurus rumah, serta mengelola keuangan yang didominasi oleh perempuan. Sedangkan untuk kegiatan memperbaiki perabotan rumah sebelum dan selama SPP didominasi oleh laki- laki dari 91,30% menjadi 94,20%. Untuk aktivitas sosial inilah yang paling menonjol terlihat bahwa perempuan ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial terbukti dari penelitian dari setiap kegiatan sosial perempuan 100% mengikuti kegiatan sosial selama proyek SPP PNPM- MP. Keterlibatan perempuan ini meningkat karena perempuan ingin memanfaatkan peluang dengan berkumpul dengan masyarakat dapat menambah pengetahuan, informasi, bertukar pengalaman dan pendapat kepada perempuan lainnya.

Untuk lebih mudah memahami dapat dilihat dalam gambar diagram batang dibawah ini:



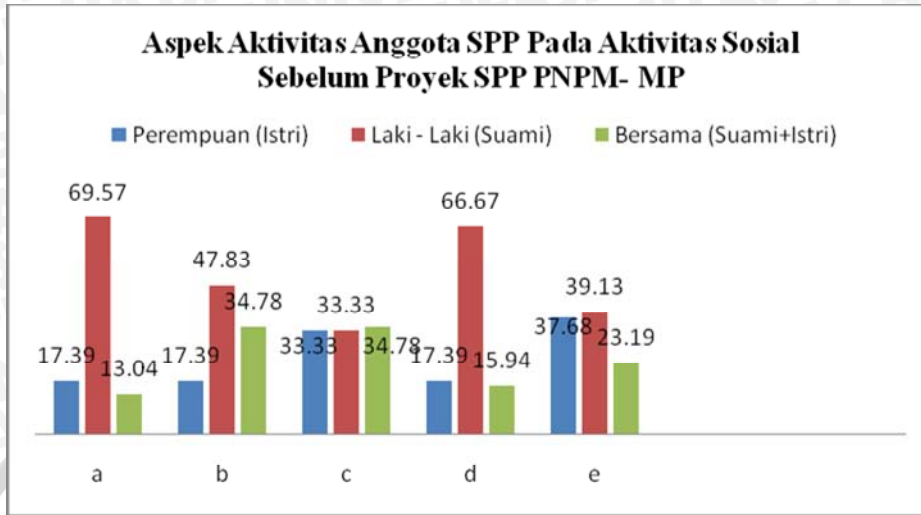
**Gambar 14.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Reproduktif Sebelum Proyek SPP PNPM- MP



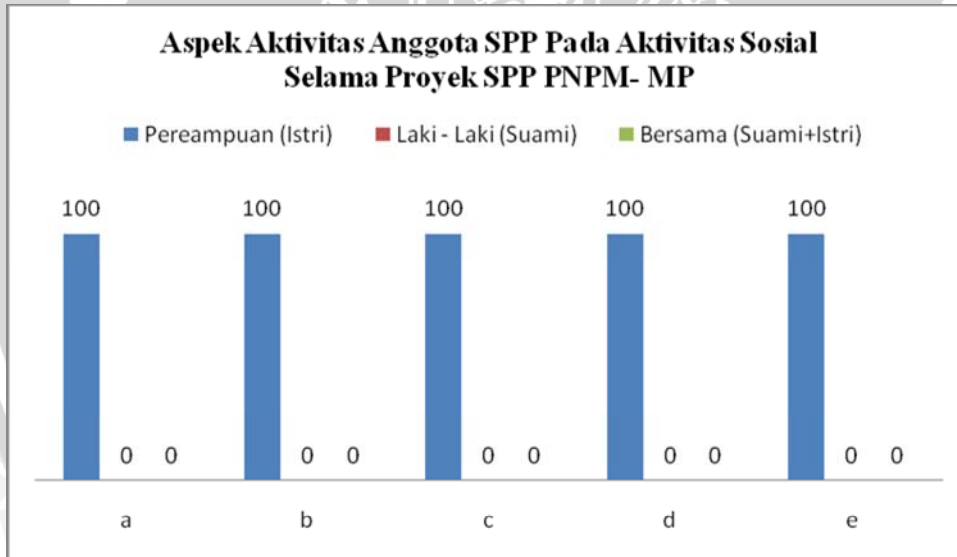
**Gambar 15.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Reproduktif Selama Proyek SPP PNPM- MP

- Keterangan :
- a: Mengambil air
  - b: Penyiapan makanan
  - c: Manjaga anak
  - d: Membersihkan rumah
  - e: Belanja
  - f: Memperbaiki rumah dan perabot
  - g: mengelola keuangan rumah tangga





**Gambar 16.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Sosial Sebelum Proyek SPP PNPM- MP



**Gambar 17.** Aspek Aktivitas Anggota SPP Pada Aktivitas Sosial Selama Proyek SPP PNPM- MP

- Keterangan :
- a: Mengikuti rapat di tingkat RT, RW, dan desa.
  - b: Terlibat dalam organisasi di tingkat desa
  - c: Terlibat dalam kegiatan kerohanian
  - d: Terlibat penyampaian pendapat dalam rapat maupun kegiatan kerohanian
  - e: Terlibat dalam kegiatan gotong royong dan arisan

Kesimpulannya dari aspek aktivitas yang meliputi aktivitas produktif, aktivitas reproduktif, dan aktivitas sosial. Untuk aktivitas produktif dalam kegiatan pertanian dan pelayaran masih sebelum proyek SPP PNPM Mandiri didominasi oleh laki – laki (Suami), Hal tersebut juga masih berlaku ketika sudah ada proyek SPP PNPM Mandiri masih didominasi oleh laki – laki (suami) walaupun terjadi peningkatan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara bersama – sama, hal ini membuktikan bahwa selama ada proyek SPP PNPM Mandiri jadi ada pembagian kerja yang dilakukan secara bersama – sama untuk saling membantu dan berkordinasi satu sama lain, dan laki – laki (suami) mulai memberikan kepercayaan kepada perempuan (istri), sedangkan untuk aktivitas produktif dalam kegiatan perdagangan dan menjahit didominasi oleh perempuan. Hal ini membuktikan bahwa untuk aktivitas produktif dalam kegiatan perdagangan dan menjahit masih ditekuni oleh perempuan dan perempuan masih dijadikan icon bahwa pekerjaan berdagang dan menjahit hanya cocok untuk perempuan oleh sebagian besar penduduk Desa Sobontoro dari hasil wawancara didapatkan uraian bahwa laki – laki (suami) masih cenderung malu untuk melakukan kegiatan berjualan apalagi menjahit.

Sedangkan untuk aktivitas reproduktif tidak ada perubahan yang signifikan karena baik sebelum dan selama Proyek SPP PNPM- MP masih tetap didominasi oleh perempuan. Dari hasil penelitian dan wawancara, hal ini dikarenakan para laki – laki masih terpengaruh dengan budaya kalau pekerjaan reproduksi seperti membersihkan rumah, merawat anak, menyiapkan makanan, belanja, dll lebih cocok dilakukan oleh perempuan sehingga untuk menghilangkan pemikiran dari laki – laki (suami) memerlukan pemahaman, sosialisasi, pengertian, dan waktu yang lebih lama lagi. Namun dari hasil penelitian pula menunjukkan adanya peningkatan beberapa kegiatan produktif seperti mengambil air, menjaga anak, membersihkan rumah, dan memperbaiki perabotan rumah meningkat menjadi dikerjakan bersama – sama, hal ini membuktikan bahwa selama

proyek SPP PNPM Mandiri menimbulkan perubahan akan kerjasama dan pembagian kerja antara perempuan dan laki – laki walaupun belum signifikan hasilnya.

Dalam penelitian ini terlihat paling menonjol terlihat pada aktivitas sosial yang dilakukan oleh perempuan yang 100% ikut dalam kegiatan sosial setelah mengikuti proyek SPP PNPM- MP, hal ini terjadi Karena proyek SPP PNPM Mandiri menghendaki terlibat aktifnya perempuan dalam setiap kegiatan proyek SPP PNPM Mandiri, dan kegiatan tersebut memang dikhususkan untuk perempuan.

Dengan demikian untuk aspek aktivitas perempuan di Desa Sobontoro yang meliputi aktifitas produktif, aktivitas reproduktif, dan aktivitas sosial. Untuk aktivitas produktif pertanian dan pelayaran sebelum ada proyek SPP PNPM Mandiri didominasi oleh laki – laki dan selama proyek berjalan masih didominasi oleh laki – laki tetapi ada peningkatan kegiatan yang dilakukan bersama, sedangkan untuk aktivitas produktif dalam bidang perdagangan dan jahit sebelum ada proyek didominasi oleh perempuan dan selama proyek berjalan masih tetap didominasi oleh perempuan tetapi ada peningkatan kegiatan yang dilakukan secara bersama – sama. dan aktivitas reproduktif perempuan di Desa Sobontoro sebelum dan selama mengikuti Proyek SPP PNPM-MP tidak banyak perubahan dari aktivitas yang dilaksanakan oleh perempuan tetap didominasi oleh perempuan, hanya yang paling menonjol terlihat pada aktivitas sosial yang dilakukan oleh perempuan. Karena perempuan Desa Sobontoro mulai sadar akan pentingnya bersosialisasi bersama untuk bertukar pendapat, pengalaman, keterampilan, menabuh kerukunan dan rasa saling menghormati.

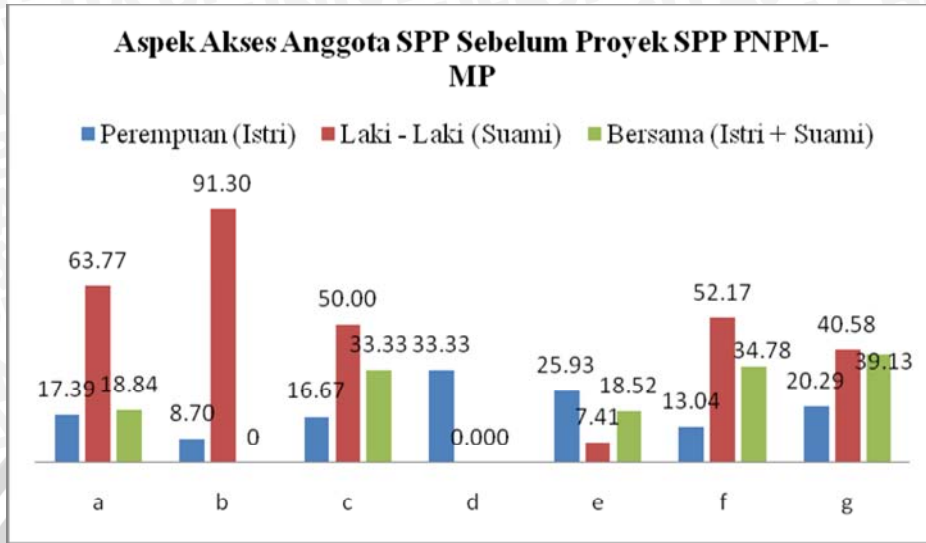
**6.3.2. Analisis Akses Perempuan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri**

Analisis akses untuk mengetahui siapa yang lebih dominan mendapatkan peluang antara perempuan dan Laki – Laki yang sehubungan dengan SPP PNPM Mandiri, dapat dilihat pada tabel 16.

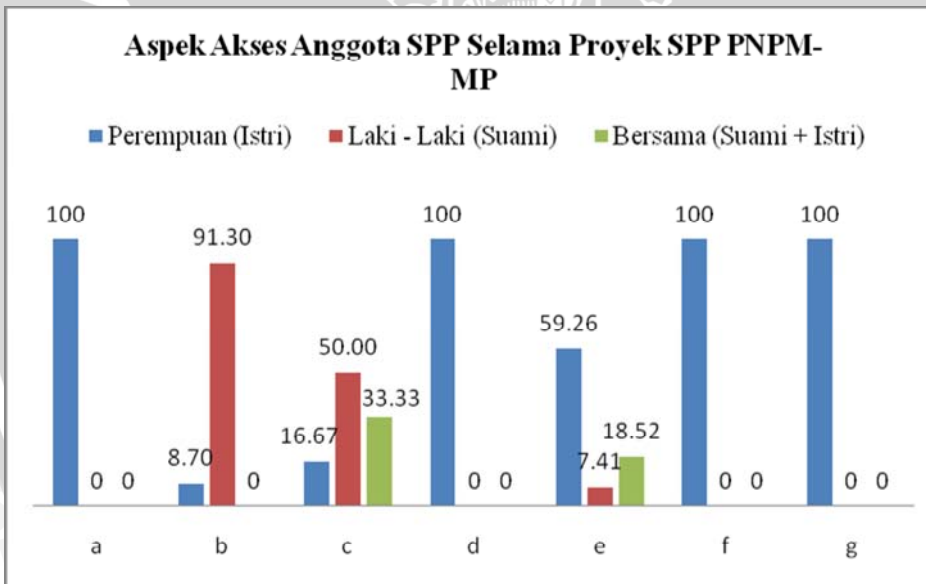
**Tabel 19.** Aspek Akses Antara Laki – Laki (Suami) dan Perempuan (Istri) terhadap Sarana dan Informasi dalam Proyek SPP PNPM Mandiri.

No	Jenis Pekerjaan	SEBELUM						SESUDAH					
		Perempuan (Istri)		Laki-Laki (Suami)		Bersama (Suami + Istri)		Perempuan (Istri)		Laki-Laki (Suami)		Bersama (Suami + Istri)	
		Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
2	<b>Aspek Akses</b>												
	a. Permodalan atau kredit	12	17.39	44	63.77	13	18.84	69	100	0	0	0	0
	b. Kepemilikan tanah sawah	2	8.70	21	91.30	0	0	2	8.70	21	91.30	0	0
	c. Kepemilikan perahu	1	16.67	3	50	2	33.33	1	16.67	2	33.33	2	33.33
	d. Kepemilikan mesin jahit	1	33.33	0	0.00	0	0	3	100	0	0	0	0
	e. Kepemilikan toko	7	25.93	2	7.41	5	18.52	16	59.26	2	7.41	5	18.52
	f. Pendidikan atau pelatihan	9	13.04	36	52.17	24	34.78	69	100	0	0	0	0
	g. Jangkauan Terhadap Informasi	14	20.29	28	40.58	27	39.13	69	100	0	0	0	0

Tabel 19 menunjukkan hasil penelitian aspek akses yang terjadi pada perempuan di Desa Sobontoro sebelum dan sesudah proyek SPP PNPM-MP untuk akses permodalan atau kredit sebelum mengikuti proyek SPP PNPM-MP didominasi oleh laki – laki sebesar 63.77% namun selama proyek SPP berjalan bergeser menjadi perempuan yang lebih dominan sebesar 100%. Sedangkan untuk akses kepemilikan tanah, kepemilikan perahu, kepemilikan mesin jahit, dan kepemilikan toko tidak terjadi perubahan sebelum dan selama proyek SPP PNPM- MP berjalan dengan dominasi untuk kepemilikan tanah dan perahu diatas namakan laki – laki (suami) sebesar 91,30% untuk kepemilikan tanah, dan 50% untuk kepemilikan perahu. Sedangkan untuk kepemilikan mesin jahit, dan kepemilikan toko didominasi oleh perempuan dengan nilai sebelum proyek untuk kepemilikan mesin jahit dari 33,33% menjadi 100% selama mengikuti proyek SPP PNPM-MP, dan akses kepemilikan toko didominasi perempuan sebelum Proyek SPP sebesar 25,93% menjadi 59,26% selama ada proyek SPP PNPM-MP. Untuk akses dalam pendidikan atau pelatihan sebelum ada proyek SPP didominasi oleh laki- laki sebesar 52,17% yang kemudian bergeser setelah ada proyek didominasi oleh kaum perempuan secara 100%, hal ini senada dengan akses jangkauan terhadap informasi yang sebelum ada proyek akses mengenai informasi didominasi oleh kaum laki- laki sebesar 40,58% dan setelah ada proyek SPP PNPM-MP perempuan dapat mendapatkan akses terhadap informasi secara 100%. Peningkatan aspek akses ini dikarenakan proyek SPP PNPM Mandiri memang bertujuan untuk membantu para perempuan dalam mendapatkan akses yang sama seperti yang dirasakan oleh laki – laki sehingga dengan demikian tidak terjadi ketimpangan gender. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil penelitian akan aspek akses telah disederhanakan dalam diagram batang, di bawah ini:



**Gambar 18.** Aspek Akses Anggota SPP Sebelum Proyek SPP PNPM- MP



**Gambar 19.** Aspek Akses Anggota SPP Selama Proyek SPP PNPM- MP

- Keterangan :
- a: Permodalan atau kredit
  - b: Kepemilikan sawah
  - c: Kepemilikan Perahu
  - d: Kepemilikan Mesin Jahit
  - e: Kepemilikan toko
  - f: Pendidikan dan pelatihan
  - g: jangkauan terhadap informasi

Dari gambar 18 dan gambar 19 dapat disimpulkan bahwa aspek akses pada perempuan di Desa Sobontoro sebelum ada Proyek SPP PNPM-MP banyak didominasi oleh laki – laki (Suami) mulai dari kemudahan akses dalam memperoleh kredit, kepemilikan tanah pertanian, kepemilikan perahu, memperoleh pendidikan atau keterampilan, serta akses terhadap jangkauan informasi. Namun, selama proyek SPP PNPM- MP berjalan ada angin segar untuk perempuan untuk memperoleh segala kebutuhan akses mulai dari akses mendapat kemudahan dalam kredit, akses kepemilikan mesin jahit, kepemilikan toko, mendapatkan pendidikan atau pelatihan, serta kemudahan dalam mendapatkan informasi yang ada untuk mengetahui kondisi desa Sobontoro dengan peningkatan akses ini akan dapat meningkatkan jati diri perempuan dengan memanfaatkan akses yang ada di Desa Sobontoro secara baik dan maksimal. Peningkatan terhadap aspek akses ini selama ada proyek SPP PNPM-MP di Desa sobontoro yang didominasi oleh perempuan ini dikarenakan memang SPP PNPM-MP merupakan pinjaman kredit yang dikhususkan untuk perempuan sehingga membutuhkan keterlibatan aktif dari perempuan pada setiap kegiatan yang ada dalam SPP PNPM-MP di Desa Sobontoro. Kegiatan yang melibatkan perempuan dalam SPP PNPM Mandiri berupa pelatihan pembukuan, pelatihan jahit menjahit, dan border, PKK, serta tahlilan. Dalam tahlilan dan PKK tidak hanya perkumpulan keagamaan dan organisasi perempuan saja, melainkan mendapatkan akses informasi yang menyangkut masyarakat akan diumumkan kepada perempuan secara langsung. Hal ini sejalan dengan penuturan ANK 26 tahun

*“kulo pikantuk informasi SPP PNPM Mandiri saking jamaah tahlil, dateng jamaah tahlil mboten namung perkumpulan keagamaan saknalikon pikantuk informasi lan perkembangan engkang dilakukan pemerintah kagem warga masyarakat”*

Arti dari sitasi diatas, sebagai berikut:

“Saya mendapatkan informasi SPP PNPM Mandiri ini melalui jamaah tahlil yang saya ikuti, ikut dalam jamaah tahlil tidak hanya untuk perkumpulan keagamaan melainkan juga untuk mendapatkan informasi dan perkembangan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat”

Dengan adanya SPP PNPM Mandiri ini akses perempuan terhadap kegiatan perempuan dalam masyarakat lebih meningkat, karena pada dasarnya SPP PNPM Mandiri ini dikhususkan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan seperti peminjaman kredit dalam SPP PNPMN Mandiri ini dilakukan oleh 100% perempuan, selain itu juga kepemilikan atas harta benda perempuan dapat meningkat dengan modal pinjaman yang didapat dari SPP PNPM Mandiri, sehingga nantinya diharapkan dengan berbagai akses dan kegiatan yang meningkatkan dan mengelola potensi yang dimiliki oleh perempuan dapat lebih meningkatkan jati diri perempuan. Berikut ini kutipan pernyataan dari TMSR 48 tahun, mengatakan:

*“Sakdering ipun derek SPP PNPM Mandiri kegiatan kula sak mendinane nunggu garwo kulo mantuk saking miyang (berlayar), sakmantune derek SPP PNPM Mandiri kegiatan kula sakmeniko derek kegiatan masyarakat (tahlilan lan PKK) luwih katah lan saking dana bantuan pinjaman modal SPP PNPM Mandiri saget didamel tumbas perahu, jala, lan solar. Mboten namung niku, kegiatan kula ditambah sadean ikan, kanthi kulo kulakan dumateng TPI, sak sampune dateng TPI kulo bakar, pindang, sak lajeng ipun kulo sade, ideraken, dumateng langganan kulo, kelehan sisanipun kulo sade dateng peken. Niku kedatosan ngoten mlampah dateng sedoyo konco – konco ingkang sadean sami kalihan kulo”*

Arti sitasi dari diatas yakni sebagai berikut:

“Sebelum mengikuti SPP PNPM Mandiri kegiatan yang saya lakukan yakni menunggu suami pulang berlayar, tetapi setelah mengikuti SPP PNPM Mandiri kegiatan saya untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan (tahlilan dan PKK,) lebih banyak dan dengan dana bantuan pinjaman modal SPP PNPM Mandiri dapat digunakan untuk membeli perahu dan membeli jala, serta solar. Tidak hanya itu kegiatan saya juga sekarang menjual ikan tangkapan dari jualan di TPI, dari TPI saya bakar, pindang, terus saya jual secara keliling kepada pelanggan, lalu sisanya dijual di pasar. Hal ini, berlaku pada semua teman – teman yang berusaha seperti saya”



SPP PNPM Mandiri membantu perempuan dalam membantu suami untuk mendapatkan modal pinjaman usaha yang dikhususkan untuk perempuan. Berikut penuturan dari MNR 39 tahun mengatakan:

*“Sakderengipun nderek SPP PNPM Mandiri kegem mundut pinjaman sedoyo beban dipun tanggung suami, nanging saklajengipun wonton SPP PNPM Mandiri kulo saget menambah modal usaha piyambak kangge nambahi modal usaha sadayan kulo lan saget tumbas kebutuhan keluarga engkang dereng kagungan utawi saget mbantu kangge kebutuhan sekolah.”*

Arti dari sitasi diatas dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, yakni:

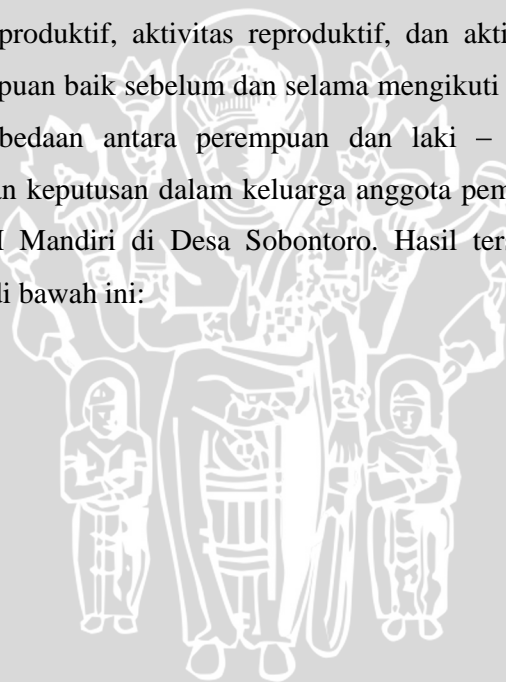
*“sebelum ada SPP PNPM Mandiri untuk melakukan pinjaman selalu mengandalkan suami, tetapi setelah ada SPP PNPM Mandiri saya bisa melakukan pinjaman sendiri untuk modal usaha dagang saya dan membeli barang – barang yang dibutuhkan oleh keluarga serta membantu biaya sekolah.”*

SPP PNPM Mandiri membantu perempuan dalam meningkatkan akses perempuan baik dalam kegiatan kemasyarakatan seperti PKK dan tahlilan, tetapi juga membantu perempuan dalam ikut serta dalam menikmati kepemilikan aset berupa tanah, toko, mesin jahit, dan kepemilikan perahu yang dimiliki oleh keluarga. Dengan berbagai kepemilikan aset dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perempuan diharapkan dapat meningkatkan jati diri dari para perempuan pengikut SPP PNPM Mandiri di desa Sobontoro.

### **6.3.3. Analisis Kontrol Perempuan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri**

Dalam aspek ini menyakut wewenang dalam pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya dan pengambilan keputusan dalam keluarga anggota pemanfaat dana SPP PNPM Mandiri. Dari hasil penelitian analisis kontrol antara perempuan anggota SPP PNPM Mandiri dan laki - laki meliputi aspek produktif, aspek reproduktif, dan aspek sosial yang dilakukan perempuan sebelum dan selama mengikuti SPP PNPM Mandiri. Dalam aspek produktif meliputi: penentuan pemilihan alat pertanian, penentuan alat pertanian, penentuan alat pelayaran, penentuan waktu

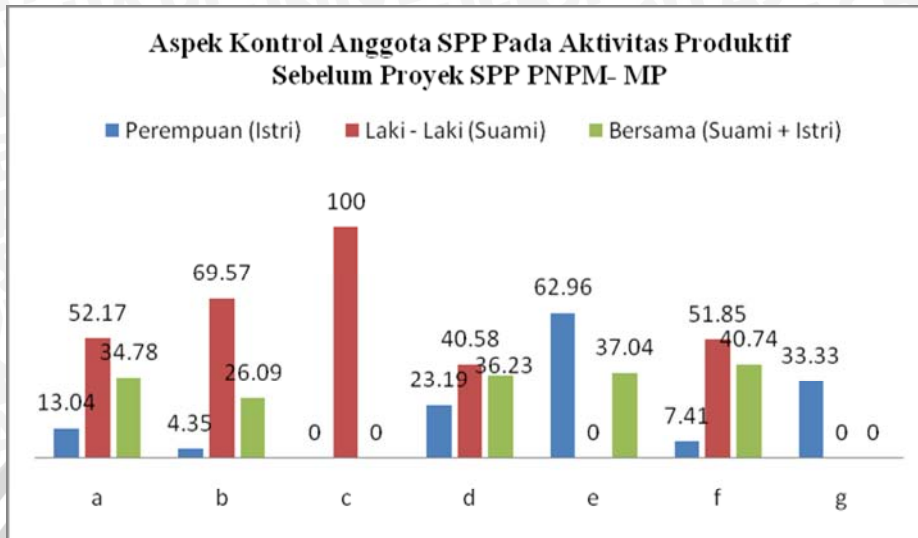
kegiatan, penentuan barang yang akan dijual, penentuan bentuk dan penataan toko, dan penentuan bahan yang digunakan untuk menjahit. Sedangkan untuk aktivitas reproduktif meliputi kegiatan: membeli kebutuhan konsumsi keluarga, biaya pendidikan anak, mentekan biaya kesehatan, memperbaiki rumah, dan membeli perabotan rumah. Tidak hanya dalam aspek kontrol di aktivitas produktif dan reproduktif saja tetapi juga aspek kontrol dalam peran sosial yang meliputi: mengikuti rapat baik ditingkat RT, RW, Desa, mengikuti pelatihan di lingkungan tempat tinggal, mengikuti kegiatan keagamaan, dan menghadiri hajatan dan arisan di lingkungan tempat tinggal. Dari hasil penelitian yang meliputi aspek kontrol baik dalam aktivitas produktif, aktivitas reproduktif, dan aktivitas sosial yang dilakukan perempuan baik sebelum dan selama mengikuti SPP PNPM Mandiri terdapat perbedaan antara perempuan dan laki – laki dalam penentuan pengambilan keputusan dalam keluarga anggota peminjam dana bantuan usaha PNPM Mandiri di Desa Sobontoro. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 20, di bawah ini:



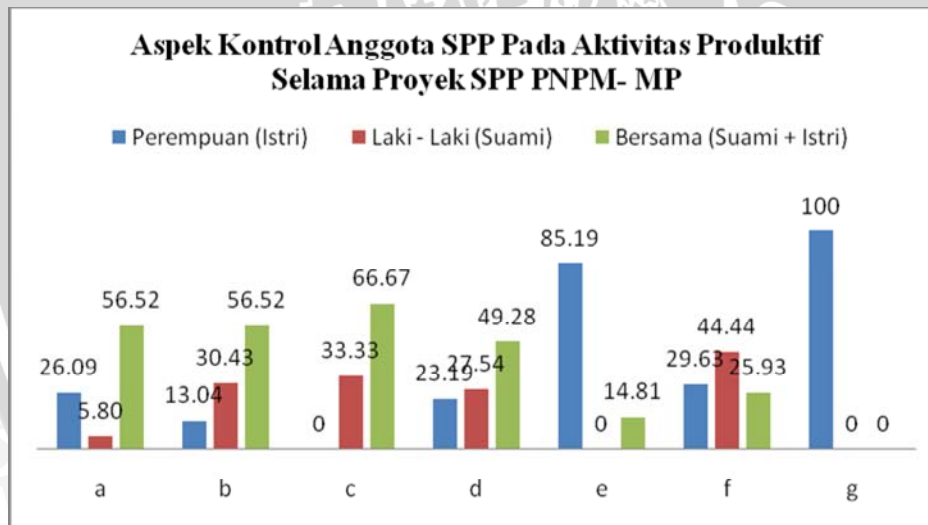
**Tabel 20.** Aspek Kontrol Antara Laki – Laki (Suami) dan Perempuan (Istri) terhadap Aktivitas Produktif, Aktivitas Reproduksi, dan Aktivitas Sosial dalam Proyek SPP PNPM Mandiri.

No	Jenis Pekerjaan	SEBELUM						SESUDAH					
		Perempuan (Istri)		Laki-Laki (Suami)		Bersama (Suami + Istri)		Perempuan (Istri)		Laki-Laki (Suami)		Bersama (Suami + Istri)	
		Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
3	<b>Aspek Kontrol</b>												
	<b>A. Aktivitas Produktif</b>												
	a. Penentuan pemilihan alat pertanian	3	13.04	12	52.17	8	34.78	6	26.09	4	5.80	13	56.52
	b. Penentuan tanaman pertanian	1	4.35	16	69.57	6	26.09	3	13.04	7	30.43	13	56.52
	c. Penentuan pemilihan alat perikanan	0	0	6	100	0	0	0	0	2	33.33	4	66.67
	d. Penentuan waktu kegiatan	16	23.19	28	40.58	25	36.23	16	23.19	19	27.54	34	49.28
	e. Penentuan barang yang akan dijual	17	62.96	0	0	10	37.04	23	85.19	0	0	4	14.81
	f. Penentuan bentuk dan penataan toko	2	7.41	14	51.85	11	40.74	8	29.63	12	44.44	7	25.93
	g. Penentuan bahan yang digunakan untuk menjahit	1	33.33	0	0	0	0	3	100	0	0	0	0
	<b>B. Aktivitas Reproduksi</b>												
	a. Membeli kebutuhan konsumsi keluarga	29	42.03	13	18.84	27	39.13	36	52.17	11	15.94	22	31.88
	b. Membiayai pendidikan anak	9	13.04	31	44.93	29	42.03	17	24.64	23	33.33	29	42.03
	c. Menentukan Biaya Kesehatan	12	17.39	28	40.58	29	42.03	19	27.54	15	21.74	35	50.72
	d. Memperbaiki rumah	2	2.90	47	68.12	20	28.99	8	11.59	18	26.09	43	62.32
	e. Membeli perabotan rumah tangga	3	4.35	39	56.52	27	39.13	8	11.59	29	42.03	32	46.38
	<b>C. Aktifitas Sosial</b>												
	a. Mengikuti rapat ditingkat RT, RW, dan desa	2	2.90	60	86.96	7	10.14	69	100	0	0	0	0
	b. Mengikuti pelatihan dilingkungan tempat tinggal	13	18.84	41	59.42	15	21,74	69	100	0	0	0	0
	c. Mengikuti kegiatan keagamaan	22	31.88	22	31.88	25	36.23	69	100	0	0	0	0
	d. Menghadiri hajatan dan arisan	22	31.88	22	31.88	25	36.23	69	100	0	0	0	0

Aspek kontrol dilihat dari tabel 20 dibagi menjadi aktivitas produktif, aktifitas reproduktif, dan aktivitas sosial. Untuk aktivitas produktif dalam penentuan keputusan pemilihan alat petanian sebelum ada proyek SPP PNPM-MP didominasi oleh laki – laki (suami) sebesar 52,17% namun selama ada Proyek SPP bergeser menjadi keputusan diambil secara bersama sebesar 56,52%, untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan penentuan alat perlayaran juga sebelum ada proyek SPP didominasi oleh laki – laki (suami) sebanyak 100% dan bergeser selama ada proyek dilakukan secara bersama sebesar 66,67%. Pengambilan keputusan dalam penentuan waktu kegiatan baik dalam pertanian, perdagangan, perlayaran, dan jahit menjahit sebelum ada proyek SPP didominasi oleh laki – laki (suami) sebesar 40,58% dan selama ada proyek SPP bergeser menjadi ditetapkan secara bersama sebesar 49,28%. Penentuan keputusan akan barang yang akan dijual ditoko sebelum dan selama SPP didominasi oleh perempuan (istri) sebesar 62,96% menjadi 85,19%. Penentuan keputusan bentuk dan penataan toko sebelum dan selama ada proyek SPP didominasi oleh perempuan sebesar 51,85% turun menjadi 66,66%. Sedangkan untuk pengambilan keputusan dalam penentuan bahan yang akan dijahit sebelum dan selama proyek berjalan didominasi oleh perempuan (istri) sebesar 33,33% naik menjadi 100% didominasi perempuan (istri) selama ada proyek SPP PNPM-MP.



**Gambar 20.** Aspek Kontrol Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif Sebelum Proyek SPP PNPM-MP

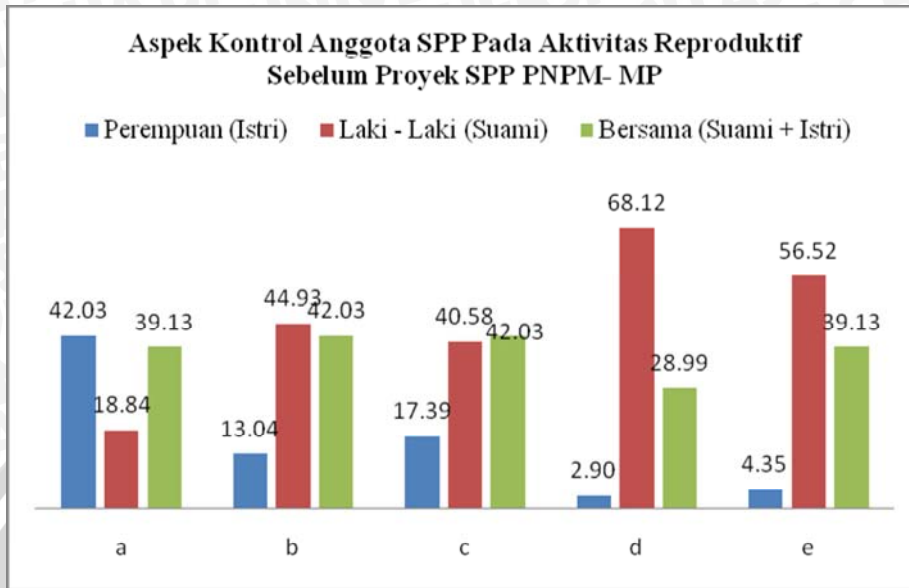


**Gambar 21.** Aspek Kontrol Anggota SPP Pada Aktivitas Produktif Selama Proyek SPP PNPM-MP

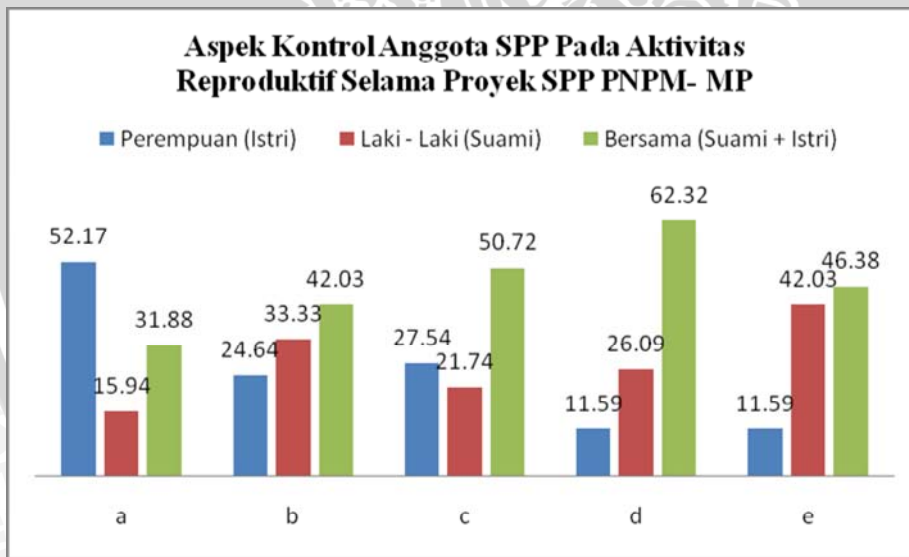
- Keterangan :
- a: Penentuan pemilihan alat pertanian
  - b: Penentuan tanaman pertanian
  - c: Penentuan alat pelayaran
  - d: Penentuan waktu kegiatan
  - e : Penentuan barang yang akan dijual
  - f: Penentuan bentuk dan penataan toko
  - g: Penentuan bahan yang digunakan untuk menjahit

Untuk penentuan keputusan dalam aktivitas reproduktif di kegiatan membeli kebutuhan keluarga baik sebelum dan sesudah ada Proyek SPP didominasi oleh perempuan (istri) sebesar 42,03% menjadi 52,17%. Untuk penentuan keputusan dalam kegiatan membiayai biaya pendidikan anak sebelum SPP didominasi oleh laki – laki sebesar 44,93 setelah ada proyek SPP bergeser menjadi diputuskan secara bersama dengan nilai 42,03%. Untuk pengambilan keputusan dalam biaya kesehatan sebelum dan sesudah ada proyek SPP dilakukan secara bersama dengan nilai sebesar 42,03% naik menjadi 50.72% setelah ada proyek SPP. Untuk penentuan keputusan dalam memperbaiki rumah sebelum ada proyek SPP banyak didominasi oleh laki-laki (suami) sebesar 68,12% dan setelah ada proyek bergeser diputuskan secara bersama dengan nilai 62,32%. Sedangkan untuk pengambilan keputusan dalam pembelian perabotan rumah sebelum ada proyek didominasi oleh laki – laki (suami) sebesar 56,52% setelah ada proyek SPP bergeser menjadi keputusan dalam pembelian perabotan rumah diputuskan secara bersama- sama dengan nilai sebesar 46,38%. Hal ini membuktikan bahwa perempuan mulai dipercaya untuk mengelola keuangan keluarga dan suami mulai memberikan kesempatan perempuan untuk memberikan pendapatnya.





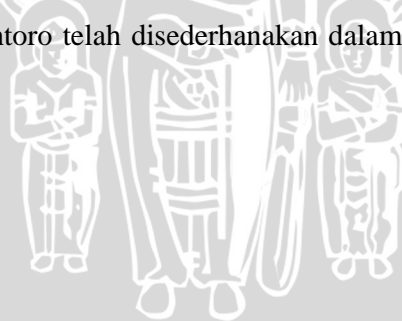
**Gambar 22.** Aspek Kontrol Anggota SPP Pada Aktivitas Reproduksi Sebelum Proyek SPP PNPM-MP



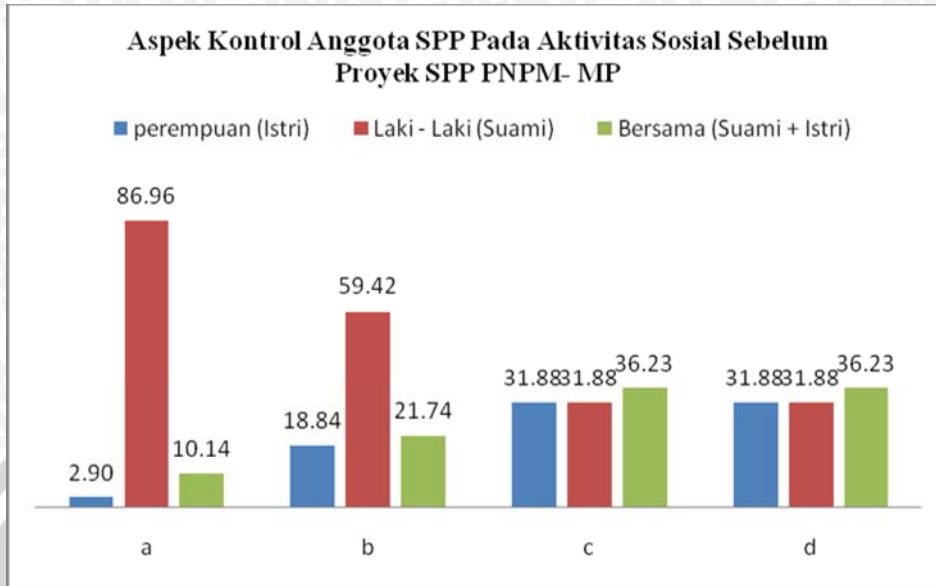
**Gambar 23.** Aspek Kontrol Anggota SPP Pada Aktivitas Reproduksi Selama Proyek SPP PNPM-MP

Keterangan : a: Membeli kebutuhan konsumsi keluarga  
 b: Membiayai pendidikan anak  
 c: Menentukan penggunaan biaya kesehatan  
 d: Memperbaiki rumah  
 e: Membeli perabotan rumah

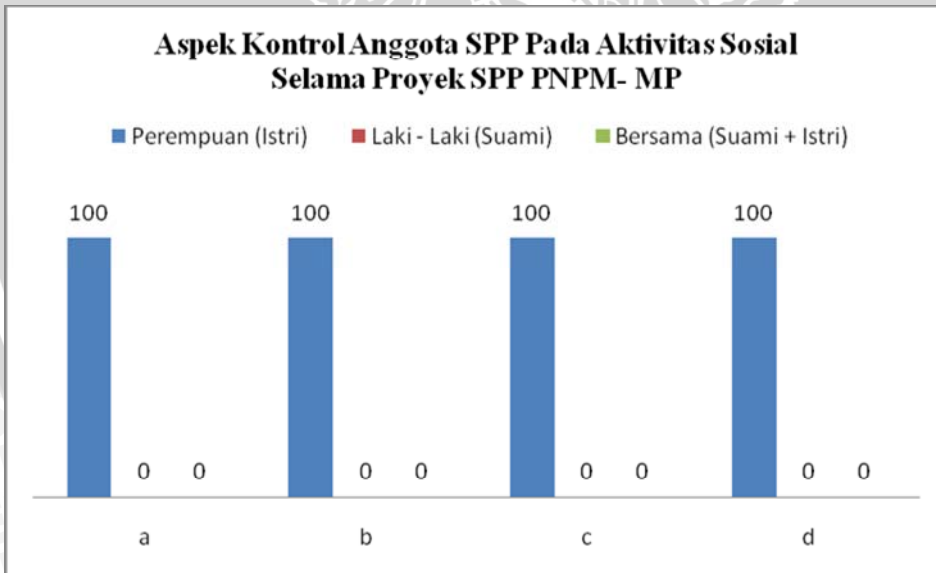
Penentuan keputusan dalam aktivitas sosial perempuan di Desa Sobontoro sebelum ada proyek SPP PNPM-MP dalam kegiatan mengikuti rapat rapat ditingkat RT, RW, dan kelurahan banyak didominasi oleh laki – laki sebesar 86,96%, dan untuk kegiatan mengikuti pelatihan sebelum ada proyek SPP didominasi oleh kaum laki – laki (suami) sebesar 59,42%, dan untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan keagamaan dan arisan sebelum ada proyek SPP dilakukan secara bersama – sama sebesar 36,23%, untuk kegiatan dalam keikutsertaan perempuan dalam mengikuti rapat ditingkat RT, RW, dan kelurahan, kegiatan dalam mengikuti pelatihan dan keterampilan, serta keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan keagamaan serta arisan setelah ada proyek SPP PNPM-MP di desa Sobontoro menjadi 100% perempuan anggota proyek SPP terlibat dalam semua pengambilan keputusan dalam kegiatan mengikuti rapat ditingkat RT, RW, dan kelurahan, kegiatan dalam mengikuti pelatihan dan keterampilan, serta keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan keagamaan serta arisan. Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai hasil penelitian aspek kontrol anggota Proyek SPP PNPM-MP di Desa Sobontoro telah disederhanakan dalam diagram batang dibawah ini:







**Gambar 24.** Aspek Kontrol Anggota SPP Pada Aktivitas Sosial Sebelum Proyek SPP PNPM-MP



**Gambar 25.** Aspek Kontrol Anggota SPP Pada Aktivitas Sosial Selama Proyek SPP PNPM-MP

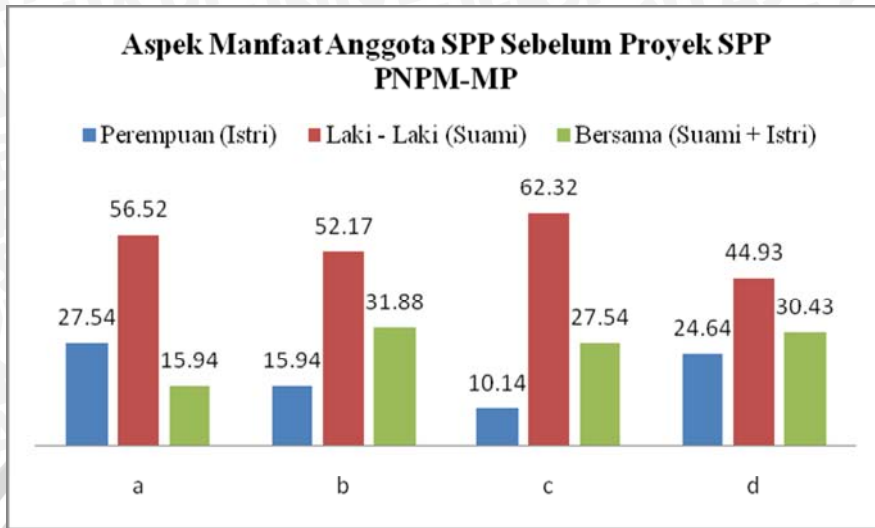
Keterangan : a: Mengikuti rapat ditingkat RT, RW, dan desa  
 b: Mengikuti pelatihan di lingkungan tempat tinggal  
 c: Mengikuti kegiatan keagamaan  
 d: Menghadiri hajatan dan arisan

Dari hasil diagram batang diatas menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan aspek kontrol yang dilakukan secara bersama – sama yang sebelumnya ketika belum ada proyek SPP PNPM Mandiri di dominasi oleh laki – laki. Hal ini terbukti dari hasil penelitian untuk keikutsertaan perempuan anggota Proyek SPP PNPM – MP di Desa Sobontoro untuk aspek kontrol yakni aktivitas produktif dan reproduktif selama ada proyek SPP PNPM Mandiri dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan produktif dan reproduktif dilakukan secara bersama – sama, hal ini dikarenakan mulai adanya pemahaman dari laki – laki untuk memusyawarahkan segala sesuatu masalah yang melingkupi keluarga kepada pasangan atau istri sehingga dari adanya proyek SPP PNPM Mandiri laki – laki atau suami mulai percaya dan memberikan wewenang untuk musyawarah dalam lingkup keluarga. Sedangkan untuk aktivitas sosial setelah ada proyek SPP PNPM- MP di Desa Sobontoro keikutsertaan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial dilakukan secara maksimal secara 100% perempuan aktif dalam kegiatan sosial yang ada di Desa Sobontoro, hal ini dikarenakan untuk perempuan anggota SPP PNPM- MP diwajibkan untuk ikut dalam wadah organisasi seperti tahlilan atau PKK di Desa Sobontoro. Dan SPP PNPM Mandiri memang khusus untuk memberdayakan perempuan.

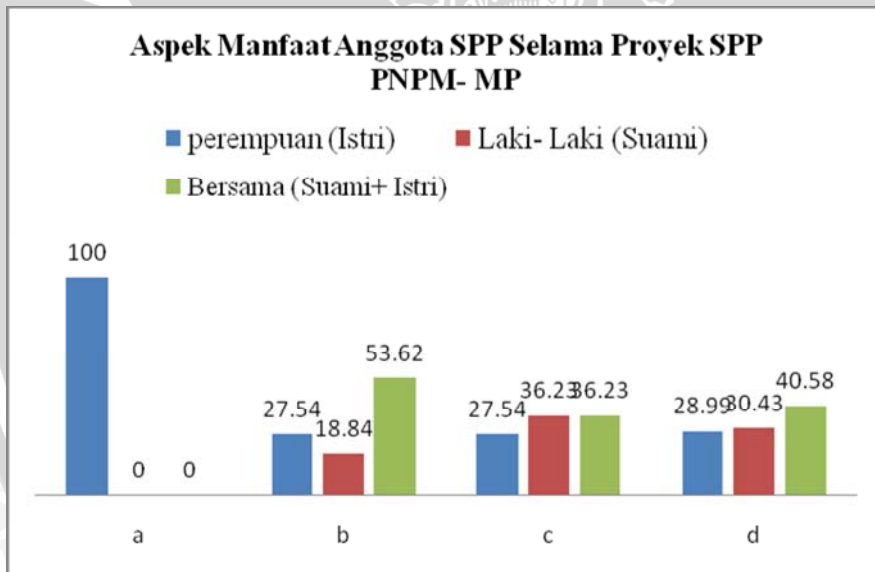
#### **6.3.4. Analisis Manfaat atau Benefit Perempuan Anggota Proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri**

Analisis manfaat atau benefit ini digunakan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari hasil mengikuti Proyek SPP PNPM Mandiri yang di peroleh anggota SPP PNPM Mandiri. Analisis ini digunakan untuk menjawab siapa yang mendapat kesempatan dalam memperoleh manfaat atau hasil dari SPP PNPM Mandiri. Untuk mengetahui hasil dari penelitian dapat dilihat pada tabel 21. Manfaat dari SPP PNPM Mandiri meliputi: pengalaman dan keterampilan serta peningkatan jati diri sebelum Proyek

SPP PNPM-MP didominasi oleh laki – laki (Suami) sebesar 56,52%, dengan perempuan sebesar 27,54%, dan yang didapatkan bersama sebesar 15,94%, sedangkan manfaat yang didapat akan pengalaman dan keterampilan untuk meningkatkan jati diri selama proyek SPP PNPM-MP hanya bisa dirasakan oleh perempuan secara 100%. Sedangkan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok juga merupakan salah satu manfaat yang dapat didapat dari proyek SPP PNPM-MP di Desa Sobontoro dengan hasil yakni didominasi oleh laki – laki (suami) sebelum ada proyek SPP sebesar 52,17% dan selama proyek SPP bergeser dapat diupayakan secara bersama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, karena perempuan (istri) dapat ikut membantu perekonomian dengan usaha yang didapat diusahakan seperti berdagang membuka toko, menjual hasil pertanian, dan menjual hasil penangkapan ikan, serta menjahit dengan nilai sebesar 53,62%. Untuk manfaat pemenuhan biaya kesehatan sebelum proyek SPP PNPM-Mp didominasi oleh laki – laki sebesar 62,32% dan selama proyek SPP didominasi oleh laki – laki dan bermanfaat untuk bersama sebesar 36,23%. Dan manfaat yang terakhir yang dirasakan perempuan anggota SPP PNPM-MP Desa Sobontoro adalah pemenuhan biaya sekolah yang sebelum ada proyek SPP didominasi oleh laki – laki sebesar 44,93% dan selama proyek SPP PNPM-MP dapat diusahakan secara bersama sebesar 40,58%. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil penelitian aspek manfaat yang diperoleh perempuan di Desa Sobontoro melalui Proyek SPP PNPM-MP telah disederhanakan pada diagram batang gambar 26 dan gambar 27.



**Gambar 26.**Aspek Manfaat Anggota SPP Sebelum Proyek SPP PNPM-MP



**Gambar 27.** Aspek Manfaat Anggota SPP Selama Proyek SPP PNPM Mandiri

Keterangan :  
 a: Pengalaman, keterampilan, dan peningkatan jati diri  
 b: Pemenuhan kebutuhan pokok  
 c: Pemenuhan biaya kesehatan  
 d: pemenuhan biaya sekolah

**Tabel 21.** Aspek Manfaat Antara Laki – Laki (Suami) dan Perempuan (Istri) dalam Proyek SPP PNPM Mandiri.

No	Jenis Pekerjaan	Sebelum						Setelah					
		Perempuan (istri)		Laki-laki (suami)		Bersama (Suami + Istri)		Perempuan (istri)		Laki-laki (suami)		Bersama (Suami + Istri)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
4	<b>Aspek Manfaat</b>												
	a. Pengalaman, Keterampilan, dan peningkatan jati diri	19	27.54	39	56.52	11	15.94	69	100	0	0	0	0
	b. Pemenuhan kebutuhan pokok	11	15.94	36	52.17	22	31.88	19	27.54	13	18.84	37	53.62
	c. Pemenuhan biaya kesehatan	7	10.14	43	62.32	19	27.54	19	27.54	25	36.23	25	36.23
	d. Pemenuhan biaya sekolah	17	24.64	31	44.93	21	30.43	20	28.99	21	30.43	28	40.58

Pemanfaatan manfaat dari SPP PNPM Mandiri memang banyak dirasakan oleh perempuan desa Sobontoro dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan peningkatan jati diri perempuan akan tetapi laki – laki pun turut ikut andil dalam merasakan manfaat dari Proyek SPP PNPM Mandiri yang dirasakan oleh istrinya. Berikut ini penuturan dari beberapa anggota yang ikut dalam Proyek SPP PNPM Mandiri (NR 38 tahun, dan SJT 51 tahun) di desa Sobontoro:

“Manfaat yang saya dapat dari mengikuti Proyek SPP PNPM Mandiri yakni saya lebih mudah mendapatkan informasi, lebih rukun dengan warga masyarakat, belajar untuk menghargai pendapat dan menyampaikan pendapat dalam musyawarah, mendapatkan pinjaman modal usaha, serta mendapatkan keterampilan dalam pembukuan dan jahit - menjahit”

Diatas merupakan penuturan dari NR 38 tahun dan berikut ini penuturan dari SJT 51 tahun, sebagai berikut:

“Suami saya menginginkan saya untuk lebih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan agar pola pikir saya bisa berkembang. Dan setelah saya mengikuti Proyek SPP PNPM Mandiri suami saya mendukung semua kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri”

Kesimpulannya untuk aspek manfaat dari Proyek SPP PNPM Mandiri memang belum begitu terasa dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari seperti pemenuhan biaya pokok, biaya kesehatan, dan biaya sekolah anak. Akan tetapi untuk manfaat peningkatan keterampilan dalam pembukuan dan jahit menjahit, pengalaman berorganisasi, dan peningkatan jati diri amatlah dirasakan oleh perempuan selama mengikuti Proyek SPP PNPM Mandiri, perempuan lebih bisa membantu suami dalam kebutuhan sehari – hari dan memiliki hak yang sama untuk berkembang dalam masyarakat. Sehingga manfaat dari proyek SPP PNPM Mandiri dalam peningkatan jati diri, keterampilan, dan pengalaman memang amatlah dirasakan oleh perempuan, akan tetapi suami dan istri (bersama – sama) juga ikut merasakan manfaat dari proyek SPP PNPM Mandiri yang berupa pemenuhan kebutuhan pokok, pemenuhan biaya kesehatan, dan biaya sekolah walaupun belum terlalu signifikan namun setidaknya dengan adanya modal usaha yang diberikan dari dana proyek SPP PNPM Mandiri ini perempuan atau istri dapat membantu suami atau laki – laki dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dari hasil penelitian di lapang maka dapat disimpulkan bahwa Peningkatan jati diri perempuan ditinjau dari analisis Harvard yang meliputi aspek aktivitas, aspek akses, aspek kontrol, dan aspek manfaat di Desa Sobontoro melalui proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNMP Mandiri mengalami peningkatan walaupun belum terlalu terasa atau tinggi. Hal ini di sebabkan karena proyek SPP PNPM Mandiri baru berjalan hampir 2 tahun di Desa Sobontoro. selama proyek SPP PNPM Mandiri aspek aktivitas mengalami peningkatan yaitu dari dominan pria menjadi dilakukan bersama, peningkatan aspek dalam memperoleh akses, peningkatan aspek dalam pengambilan keputusan atau kontrol, dan aspek manfaat yang dapat dirasakan secara bersama untuk pemenuhan kebutuhan keluarga seperti biaya kesehatan dan biaya sekolah sedangkan peningkatan jati diri, pengalaman, dan keterampilan hanya dirasakan oleh perempuan.

dalam peningkatan jati diri perempuan terjadi peningkatan pada dua aspek terpenting yakni aspek memperoleh kemudahan dalam akses (aspek akses) dan aspek pengambilan keputusan (aspek kontrol). Kedua aspek tersebut mempunyai peran penting dalam peningkatan jati diri perempuan karena hakikat jati diri perempuan adalah pemahaman perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol dalam setiap aktivitasnya.

Dari hasil dilapang sesuai dengan konsep perkembangan jati diri menurut Willey dalam buku Calhoun dan Acocella (1990) bahwa salah satu dari faktor yang mempengaruhi perkembangan diri seseorang adalah masyarakat. Dimana masyarakat akan mempengaruhi pola pikir seseorang yang dari pola pikir tersebut akan sangat mempengaruhi jati diri dari orang tersebut. Misalnya saja dalam penelitian ini dari masyarakat yang sebelum ada proyek SPP PNPM Mandiri masyarakat di Desa Sobontoro sangat mempengaruhi pola pikir dari perempuan untuk tetap menjadi ibu rumah tangga tanpa mengembangkan potensi yang dimilikinya, namun selama proyek SPP PNPM Mandiri berjalan pola pikir tersebut berubah setelah mendapatkan sosialisasi perempuan mulai mau mengembangkan diri dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya yang kemudian akan meningkatkan jati diri dari perempuan. Dari hasil penelitian sesuai dengan faktor – faktor jati diri menurut Calhoun dan Acocella (1990) bahwa jati diri dipengaruhi oleh 1) pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan akan meningkatkan jati diri perempuan tersebut. 2) penghargaan, yang berfungsi sebagai motivasi. Semakin tinggi tingkat penghargaan yang diberikan maka akan semakin tinggi harga diri yang dimiliki oleh orang tersebut. Penghargaan ini dapat diberikan oleh orang lain maupun dirinya sendiri. Dan 3) penilaian diri sendiri, yang merupakan pengukuran perempuan pada keadaan saat ini dengan masa lalu atau masa depan. Semakin tinggi penilaian perempuan akan diri sendiri akan meningkatkan jati dirinya, yang diimbangi dengan keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.





## VII. PENUTUP

### 7.1. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri di desa Sobontoro sudah dilaksanakan dengan baik selama 2 periode yakni periode tahun 2009 – 2010 dan periode tahun 2010 – 2011. Dalam pelaksanaannya Proyek SPP PNPM Mandiri di desa Sobontoro meliputi: ‘tahap perencanaan’ yang terdiri dari MAD Sosialisasi, Musdes Sosialisasi, Pelatihan KPMD, penggalian gagasan, MPK, Musdes perencanaan, penulisan usulan desa, verifikasi usulan oleh kecamatan, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan proposal, musdes informasi hasil MAD, dan pengesahan dokumen SPPB. ‘Tahap pelaksanaan’ yang terdiri dari persiapan pelaksanaan berupa rakor desa, pelaksanaan Proyek SPP PNPM Mandiri di desa Sobontoro, musdes pertanggungjawaban, dokumentasi kegiatan, dan penyelesaian Proyek SPP PNPM Mandiri. Untuk tahap terakhir yakni ‘tahap monitoring dan evaluasi’. Tahap monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pembayaran tiap 1 bulan yang dapat dipantau dari buku kas kegiatan Proyek SPP PNPM Mandiri.
2. Peningkatan jati diri perempuan ditinjau dari analisis Harvard yang meliputi aspek aktivitas, aspek akses, aspek kontrol, dan aspek manfaat di Desa Sobontoro melalui proyek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNMP Mandiri mengalami peningkatan walaupun belum terlalu tinggi atay terasa oleh perempuan dalam peningkatan jati dirinya. Hal ini di sebabkan karena proyek SPP PNPM Mandiri baru berjalan hampir 2 tahun di Desa Sobontoro. setelah ada proyek aspek aktivitas mengalami peningkatan yaitu dari dominan pria menjadi dilakukan bersama, peningkatan aspek dalam memperoleh akses, peningkatan aspek dalam pengambilan keputusan atau kontrol, dan aspek manfaat yang dapat dirasakan secara bersama untuk pemenuhan kebutuhan keluarga seperti biaya kesehatan dan biaya sekolah sedangkan peningkatan jati diri, pengalaman, dan keterampilan hanya dirasakan oleh perempuan. dalam peningkatan jati diri perempuan terjadi peningkatan pada dua aspek terpenting yakni aspek memperoleh kemudahan dalam akses (aspek akses) dan aspek

pengambilan keputusan (aspek kontrol). Kedua aspek tersebut mempunyai peran penting dalam peningkatan jati diri perempuan karena hakikat jati diri perempuan adalah pemahaman perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol dalam setiap aktivitasnya.

Setelah melakukan penelitian di Desa Sobontoro, ada beberapa saran yang ditawarkan oleh peneliti, diantaranya:

**Saran Akademis:**

- 1) Untuk peneliti yang tertarik meneliti di Desa Sobontoro di sarankan untuk melakukan penelitian mengenai peran pelaku pendamping terhadap peningkatan jadi perempuan, penelitian mengenai evaluasi proyek SPP PNPM Mandiri dan evaluasi program PNPM Mandiri di Desa Sobontoro, serta peningkatan citra diri perempuan melalui Proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro.

**Saran Praktis:**

1. Pemberian dana bantuan Proyek SPP PPM Mandiri selama ini hanya diberikan kepada anggota peserta proyek SPP PNPM Mandiri, sehingga sebaiknya untuk pemberian dana berikutnya dapat menyentuh semua perempuan yang berada di Desa Sobontoro.
2. Dalam proses koordinasi dan pendekatan perlu lebih ditingkatkan lagi kepada seluruh anggota peserta proyek SPP PNPM Mandiri baik didalam jamaah tahlil maupun PKK. Sehingga semua anggota merasa diperhatikan, tidak hanya pengurusnya saja.
3. Proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro perlu ditingkatkan dan diperpanjang masa periodenya agar tercapai peningkatan jati diri perempuan di Desa Sobontoro
4. Monitoring dan evaluasi oleh pemerintah kecamatan sebaiknya lebih ditingkatkan perlu adanya terjun langsung dari aparat pemerintah (kecamatan) untuk melihat kondisi lapang dari proyek SPP PNPM Mandiri di Desa Sobontoro.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi rukminto. 2003. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi komunitas*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Anggara, Helly. 2009. *Tentang Jati Diri*. Kompasiana Sharing. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. 2010. *Data Jumlah Kependudukan Perempuan dan Laki – Laki di Kabupaten Tuban*. BPS. Tuban
- Calhoun, F. & Acocella, Joan Ross. 1990. *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan (edisi ketiga)*. Semarang Ikip Semarang Press
- Fakih, Mansour. 1995. *Menggeser konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Kartasasmita, G. 1995. *Pemberdayaan dan Pembangunan Desa*. UI Press. Jakarta.
- Hardy, Malcom & Hayes, Steve. 1985. *Pengantar Psikologi (edisi kedua)*. Jakarta: Erlangga.
- Kusnadi. 1985. *Penyuluh Pertanian Teori dan Terapannya*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Moser, O, N and Carolina, 1995. *Memenuhi Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategi Gender ( terjemahan )* Jakarta: Kalimitra
- Pellu, Susana Cecilia L. 2010. *Peranan Perempuan Pesisir di Sektor Publik dan Pergeseran Nilai Patriarki*. Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Malang
- Sajogyo, Pudjiwati. 1983. *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. CV. Rajawali. Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metodologi Penelitian Surve Edisi Revisi*, Jakarta, LP3ES
- Soedarsono, Soemarno. 2004. *Character Building: Membentuk Watak*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta
- Soeseno, N. dan Sarwono, 1995. *Ringkasan Laporan Penelitian Pengetahuan Tentang konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Kelompok Kerja Konvensi. Jakarta

- Sugiarti, dan Handayani, Trisakti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. UMM Press. Malang
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta: Bandung
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Sukei, Keppi. 2002. *Kajian Gender*. Pusat Penelitian Peran Wanita. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta
- Tan, Mely G, 1995. *Perempuan dan Pemberdayaan "Makalah Disampaikan pada Konggres ISI" di Ujungpandang. 2- 4 November 1995*
- Tim Koordinasi PNPM- Mandiri. 2010. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta
- Widuri, Endang. 2006. *Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atau Buruh Perempuan dalam Pemenuhan Hak-Hak Normatif di Kabupaten Kebumen*. Yogyakarta: UGM.
- Widodo, Slamet. 2003. *Studi Gender pada Usaha Tani Lahan Kering*. Universitas Brawijaya. Malang
- Wijaya, Hesti. 1994. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Aditya Media. Yogyakarta.

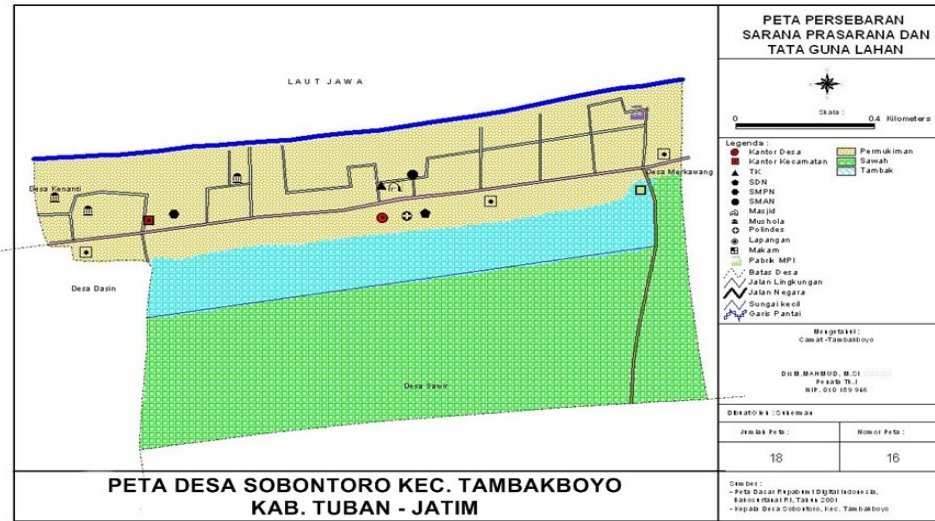
# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



LAMPIRAN 1. Peta Desa Sobontoro







repository.ub.ac

LANJUTAN LAMPIRAN 2. Daftar Pemanfaat Pinjaman Simpan Pinjam  
Perempuan (SPP) PNPM Mandiri.

**PNPM MANDIRI PERDESAAN  
KECAMATAN TAMBAKBOYO – KABUPATEN TUBAN**  
Sekretariat: Jl. Sobontoro No 05, Tambakboyo, Telp (0356) 411388

**DAFTAR PENERIMA PINJAMAN SPP (PEMANFAAT)**

Nama Kelompok : Kakap II  
Alamat : Dusun Sobontoro, Desa Sobontoro

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha/ Pekerjaan	Besar Pinjaman (Rp)
1	Tamsri	Dusun Sobontoro	Ibu Rumah Tangga (Nelayan)	1.000.000
2	Resi	Dusun Sobontoro	Nelayan	1.000.000
3	Masitah	Dusun Sobontoro	Ibu Rumah Tangga (Tani)	1.000.000
4	Rumini	Dusun Sobontoro	Ibu Rumah Tangga (Tani)	1.000.000
5	Jumiatun	Dusun Sobontoro	Tani	1.000.000
6	Terminah	Dusun Sobontoro	Tani	1.000.000
7	Sholichah	Dusun Sobontoro	Dagang	1.000.000
8	Sulistri	Dusun Sobontoro	Ibu Rumah Tangga (Tani)	1.000.000
9	Sujiati	Dusun Sobontoro	Jahit	1.000.000
10	Darisah	Dusun Sobontoro	Tani	1.000.000
11	Juwariyah	Dusun Sobontoro	Ibu Rumah Tangga (Tani)	1.000.000
12	Sarmijah	Dusun Sobontoro	Tani	1.000.000
13	Rimi	Dusun Sobontoro	Ibu Rumah Tangga (Dagang)	1.000.000
14	Rofiah	Dusun Sobontoro	Jahit	1.000.000
15	Sofiatun	Dusun Sobontoro	Dagang	1.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>15.000.000</b>

Sobontoro, 7 Agustus 2009

Pengurus Kelompok,

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Juatmi

Ida Zuliana

Juwariyah

LANJUTAN LAMPIRAN 2. Daftar Pemanfaat Pinjaman Simpan Pinjam  
Perempuan (SPP) PNPM Mandiri.

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PEDESAAN  
KECAMATAN TAMBAKBOYO – KABUPATEN TUBAN**

**DAFTAR PEMANFAAT**

Nama Kelompok : Kakap III  
Alamat : Dusun Jamong, Desa Sobontoro  
Besarnya Pinjaman : Rp. 12.000.000,00

NO	Nama	Jenis Usaha/ Pekerjaan	Besar Pinjaman (Rp)
1	Suwarni	Dagang	1.000.000
2	Sumiah	Dagang	1.000.000
3	Kayamu	Tani	1.000.000
4	Warti	Tani	1.000.000
5	Dewi Sulastri	Tani	1.000.000
6	Kamsri	Tani	1.000.000
7	Sofiah	Dagang	1.000.000
8	Sarmi	Dagang	1.000.000
9	Kumaidah	Tani	1.000.000
10	Sulastri	Tani	1.000.000
11	Kasminah	Tani	1.000.000
12	Kasli	Dagang	1.000.000

Sobontoro 20 April 2010

Pengurus Kelompok,

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Romlah

Zaenab

Sumiah

LANJUTAN LAMPIRAN 2. Daftar Pemanfaat Pinjaman Simpan Pinjam  
Perempuan (SPP) PNPM Mandiri.

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PEDESAAN  
KECAMATAN TAMBAKBOYO – KABUPATEN TUBAN**

**DAFTAR PEMANFAAT**

Nama Kelompok : Kakap IV  
Alamat : Dusun Jamong, Desa Sobontoro  
Besaran Pinjaman : Rp. 12.000.000,00

NO	Nama	Jenis Usaha/ Pekerjaan	Besaran Pinjaman (Rp)
1	Riswati	Dagang	1.000.000
2	Kholifah	Dagang	1.000.000
3	Marni	Dagang	1.000.000
4	Iin Sumei	Dagang	1.000.000
5	Nunuk Karunia	Dagang	1.000.000
6	Sukini	Tani	1.000.000
7	Salmi	Ibu Rumah Tangga (Nelayan)	1.000.000
8	Sumi	Tani	1.000.000
9	Lasiana	Tani	1.000.000
10	Salmining	Dagang	1.000.000
11	Yuliaty	Dagang	1.000.000
12	Munasri	Dagang	1.000.000

Sobontoro 20 April 2010

Pengurus Kelompok,

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Iin Sumei

Sukini

Kholifah

LANJUTAN LAMPIRAN 2. Daftar Pemanfaat Pinjaman Simpan Pinjam  
Perempuan (SPP) PNPM Mandiri.

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PEDESAAN  
KECAMATAN TAMBAKBOYO – KABUPATEN TUBAN**

**DAFTAR PEMANFAAT**

Nama Kelompok : Kakap I (Perguliran)  
Alamat : Dsn Jamong  
Besaran Pengajuan : Rp. 16. 500.000,00

NO	Nama	Jenis Usaha/ Pekerjaan	Besaran Pinjaman (RP)
1	Siti Dzikroh	Dagang	1.000.000
2	Choirun Nisa'	Dagang	1.000.000
3	Teminah	Tani	1.000.000
4	Yasmi	Ibu Rumah Tangga (Nelayan)	1.000.000
5	Tuminarti	Dagang	1.000.000
6	Siti Fatimah	Dagang	1.000.000
7	Panut	Dagang	1.000.000
8	Darmini	Nelayan	1.000.000
9	Daryuliati	Ibu Rumah Tangga (Nelayan)	1.000.000
10	Wari	Petani	1.000.000
11	Darsih	Tani	1.000.000
12	Hariyati	Tani	1.000.000
13	Ifun	Dagang	1.000.000
14	Suhartini	Ibu Rumah Tangga (Dagang)	1.000.000

Sobontoro, 01 Desember 2010

**Mengetahui,  
Pengurus Kelompok**

**Suhartini  
Ketua**

**Jumiati  
Sekretaris**

**Choirun Nisa'  
Bendahara**

## LANJUTAN LAMPIRAN 2. Daftar Pemanfaat Pinjaman SPP

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PEDESAAN  
KECAMATAN TAMBAKBOYO – KABUPATEN TUBAN**

**DAFTAR PEMANFAAT**

Nama Kelompok : Kakap II (Perguliran)  
 Alamat : Dusun Sobontoro, Desa Sobontoro  
 Besar Pinjaman : Rp. 28.000.000,00

NO	Nama	Jenis Usaha/ Pekerjaan	Besar Pinjaman (Rp)
1	Jumiaturun	Tani	1.500.000
2	Rimi	Ibu Rumah Tangga (Dagang)	1.000.000
3	Sulistri	Ibu Rumah Tangga (Tani)	1.000.000
4	Terminah	Tani	1.500.000
5	Masitah	Ibu Rumah Tangga (Tani)	1.000.000
6	Tamsri	Ibu Rumah Tangga (Nelayan)	1.000.000
7	Rofiah	Jahit	1.000.000
8	Sarmijah	Tani	1.000.000
9	Resi	Nelayan	1.000.000
10	Sofiatun	Dagang	1.000.000
11	Rumini	Ibu Rumah Tangga (Tani)	1.000.000
12	Dami	Tani	1.000.000
13	Juwariyah	Ibu Rumah Tangga (Tani)	1.000.000
14	Buriyah	Ibu Rumah Tangga (Tani)	1.000.000
15	Sholichah	Dagang	1.000.000
16	Sujiati	Jahit	1.000.000
17	Tarmilah	Tani	1.000.000
18	Nur Rohmah	Dagang	2.000.000
19	Karti	Nelayan	1.000.000
20	Darisah	Tani	1.000.000
21	Muntamah	Tani	1.000.000
22	Sunari	Tani	1.000.000
23	Anik W	Tani	1.500.000
24	Pariyati	Dagang	1.500.000
25	Kayatun	Tani	1.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>28.000.000</b>

Sobontoro 01 Desember 2010

Pengurus Kelompok,

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Juatmi

Ida Zuliana

Juwariyah

LAMPIRAN 3. Foto Musyawarah Antar Desa Sosialisasi



Tim dari Kecamatan sedang memberikan Sosialisasi kepada masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa – Sosialisasi (Sumber: data sekunder, 2011)



Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri dalam Musyawarah Antar Desa – Sosialisasi (Sumber: data sekunder, 2011)

LAMPIRAN 4. Aturan dan Sanksi Simpan Pinjam Perempuan PNPMM Mandiri

**ATURAN DAN SANKSI  
SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DESA SOBONTORO**

**I. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dirumuskannya tata tertib atau aturan dan sanksi kelompok SPP adalah tersedianya alat pengendalian yang dapat digunakan untuk dipatuhi oleh seluruh anggota, terutama dalam hal penyelenggaraan kelompok, sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan bagi para anggota.

**II. KETENTUAN POKOK**

**BIDANG ORGANISASI**

**1. Keanggotaan**

- a. Yang dapat diterima menjadi anggota kelompok SPP adalah warga masyarakat Dusun Jamong, dan Dusun Sobontoro, Desa Sobontoro
- b. Keanggotaan dinyatakan sah apabila telah membayar lunas simpanan pokok dan simpanan wajib
- c. Anggota yang keluar dari kelompok harus mengajukan permohonan kepada pengurus dan yang bersangkutan tidak mempunyai sisa pinjaman di kelompok
- d. Calon anggota baru harus memperoleh dukungan dari anggota lain.

**2. Kepengurusan**

- a. Pengurus kelompok sekurang- kurangnya terdiri dari tiga orang pengurus inti yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara
- b. Seksi- seksi yang karena dibutuhkan dipilih dan disahkan dalam rapat anggota pertemuan kelompok
- c. Masa jabatan pengurus selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode berikutnya.

**3. Rapat Pengurus Pertemuan Kelompok**

- a. Rapat pengurus diselenggarakan setiap saat diperlukan
- b. Pertemuan kelompok diselenggarakan secara rutin setiap dua minggu sekali dengan mengambil tempat di anggota mulai pukul 18.30 WIB.

#### LANJUTAN LAMPIRAN 4. Aturan dan Sanksi SPP PNPM Mandiri

- c. Apabila dirasa perlu, dapat dilakukan pertemuan kelompok di luar jadwal rutin tersebut.
- d. Setiap anggota wajib menghadiri pertemuan kelompok secara rutin.

#### **BIDANG PERMODALAN**

##### **1. Tabungan Anggota**

- a. Simpanan wajib ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (sebagai tabungan) setiap satu bulan sekali
- b. Simpanan wajib tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota kelompok

##### **2. Pelayanan Pinjaman Kredit**

- a. Calon peminjam harus datang sendiri dalam pertemuan kelompok dan mengajukan pinjaman kepada pengurus kelompok
- b. Jangka waktu kredit maksimum 12 bulan, diangsur setiap bulan (pokok dan jasa) mulai bulan berikutnya setelah kredit diterima
- c. Besarnya plafon kredit, maksimum 12 kali jumlah tabungan kecuali bila keadaan memungkinkan atau calon memenuhi kriteria
- d. Peminjam tidak dapat mengambil simpanan atau tabungan bila masih memiliki pinjaman di kelompok
- e. Suku bunga kredit 2 % tetap perbulan

##### **3. Sanksi Bagi Peminjam**

- a. Bagi peminjam yang menunggak membayar angsuran dan bunga dikenakan denda sebesar 2 % perbulan dari pokok pinjaman (Rp. 20.000 per bulan untuk setiap pinjaman Rp. 1.000.000)
- b. Bagi peminjam yang tidak dapat melunasi pinjaman sampai jatuh tempo, pengurus berhak untuk memindahkan bukukan seluruh tabungannya atau menyita barang atau jaminan yang diberikan peminjam dengan kuasa menjual dan menggunakan hasil penjualan sebagai angsuran sebanding dengan jumlah kewajiban



LANJUTAN LAMPIRAN 4. Aturan dan Sanksi SPP PNPM Mandiri

**ADMINISTRASI KEUANGAN**

1. Bendahara bertanggungjawab tentang kebenaran pencatatan transaksi keuangan kelompok dan keselamatan keuangan kelompok, serta tidak boleh menyimpan uang tunai lebih dari Rp. 5.000.000,00
2. Tutup buku dilaksanakan setiap akhir tahun
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
  - a. Pemupukan Modal : 10 %
  - b. Administrasi atau Operasional Kelompok : 10 %
  - c. Transportasi Pengurus : 40 %
  - d. Bagian Anggota : 20 %
  - e. Dana Cadangan : 10 %
  - f. Dana Sosial : 10 %

**III. KETENTUAN KHUSUS**

Hal- hal yang belum tercantum dalam tata tertib atau aturan kelompok akan diatur tersendiri sesuai perkembangan kelompok. Semua anggota wajib mematuhi tata tertib atau aturan seperti termuat pada bab dan pasal diatas.

Dibuat di Sobontoro, 7 Agustus 2009  
Kepala Desa Sobontoro

Achmad Nur Cholis

LAMPIRAN 5 Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PEDESAAN  
KECAMATAN TAMBAKBOYO – KABUPATEN TUBAN**

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN**

Dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Musyawarah Desa Perencanaan di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, Maka hari ini:

Hari dan tanggal : Senin 22 Desember 2010

Jam : 16. 30 WIB

Tempat : Balai Desa Sobontoro

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan yang dihadiri oleh wakil- wakil dari dusun, kelompok, tokoh masyarakat serta unsur yang terkait di desa.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah:

**A. Materi atau Topik Musyawarah**

1. Merumuskan Visi Desa
2. Merumuskan peta sosial desa dan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan penyusunan kegiatan
3. Menetapkan satu usulan kegiatan non SPP
4. Menetapkan daftar usulan desa yang akan diajukan pendanaan
5. Memilih 6 orang wakil desa meliputi Kades, ketua TPK, 1 orang tokoh masyarakat, 3 orang tokoh perempuan.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pimpinan Rapat : Kades

Sekretais/ Notaris : Ifun

Narasumber : Akhmad Nur Cholis dari Kades

Bintari dari Petugas lapang

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi musyawarah di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Perencanaan memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Khusus Perempuan.

## LANJUTAN LAMPIRAN 5 Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan

Demikian berita acara Musyawarah Desa Perencanaan, ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sobontoro, 22 Desember 2010

Pemimpin Rapat  
Rapat

Notulen/Sekretaris

(Akhmad Nur Cholis)

(Ifun)

Mengetahui,  
Kepala Desa Sobontoro

(Akhmad Nur Cholis)

Mengetahui dan Menyetujui  
Wakil dari Peserta Musyawarah

No	Nama	Alamat	TTD
1	M. Sarsito	Sobontoro	
2	Mustain	Sobontoro	
3	Fatkur	Sobontoro	
4	Widodo	Sobontoro	
5	Syawal	Sobontoro	

LAMPIRAN 6. Berita Acara MKP

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PEDESAAN  
KECAMATAN TAMBAKBOYO – KABUPATEN TUBAN**

---

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH KHUSUS PEREMPUAN**

Dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Musyawarah Khusus Perempuan di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, Maka hari ini:

Hari dan tanggal : Senin 22 Desember 2010  
Jam : 16. 00 WIB  
Tempat : Balai Desa Sobontoro

Telah diselenggarakan Musyawarah Khusus Perempuan yang dihadiri oleh wakil- wakil dari dusun, kelompok, tokoh masyarakat serta unsur yang terkait di desa.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah:

**A. Materi atau Topik Musyawarah**

1. Pembahasan gagasan- gagasan kegiatan maupun visi kedepan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan, berdasarkan potensi dan sumber daya local yang dimiliki
2. Menyepakati dan menetapkan usulan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
3. Menyepakati dan menetapkan usulan dari kelompok perempuan selain usulan kegiatan simpan pinjam
4. Memilih calon- calon wakil perempuan yang akan hadir di MAD prioritas usulan

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pimpinan Rapat : Kades  
Sekretais/ Notaris : Ifun  
Narasumber : Akhmad Nur Cholis dari Kades  
Bintari dari Petugas lapang

LANJUTAN LAMPIRAN 6. Berita Acara MKP

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi musyawarah di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Khusus Perempuan memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berkebetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Khusus Perempuan.

Demikian berita acara Musyawarah Khusus Perempuan, ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sobontoro, 22 Desember 2010

Pemimpin Rapat

Notulis/ Sekretaris Rapat

(Akhmad Nur Cholís)

(Ifun)

Mengetahui,  
Kepala Desa Sobontoro

(Akhmad Nur Cholís)

Mengetahui dan Menyetujui  
Wakil dari Peserta Musyawarah

No	Nama	Alamat	TTD
1	Jumiati	Sobontoro	
2	Endah palupi	Sobontoro	
3	Romlah	Sobontoro	
4	Ida Zulyana	Sobontoro	
5	Ifun	Sobontoro	
6	Rini	Sobontoro	

LAMPIRAN 7. Foto Verifikasi SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro



Penjelasan dari tim verifikasi tentang tujuan, visi, misi, Aturan, dan Sanksi SPP PNPM Mandiri dalam Musdes Verifikasi (Sumber: data sekunder, 2011)



Peserta yang hadir dalam Musdes Verifikasi SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro (Sumber: data sekunder, 2011)

LAMPIRAN 8. Surat Pernyataan Tanggung Renteng

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PEDESAAN  
KECAMATAN TAMBAKBOYO – KABUPATEN TUBAN**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) beralamat di Dusun Jamong Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, masing- masing dalam kedudukan sebagai pribadi anggota kelompok secara sadar dan penuh tanggung jawab menyatakan:

1. Kesanggupan untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat membayar kembali pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
2. Apabila dikelompok ada tabungan anggota maka tabungan tersebut digunakan untuk membayar kewajiban angsuran yang sudah jauh tempo belum dipenuhi oleh anggota kelompok tersebut
3. Apabila anggota kelompok tidak dapat membayar kewajiban anggaran (pokok dan bunga) sesuai jatuh tempo dikenakan denda 2 % dari jasa pengembalian bulan tersebut
4. Bagi kelompok yang kualitas angsuran dan administrasi kelompok kurang tertib, maka perguliran untuk kelompok tersebut ditunda sampai kekurangan kelompok tersebut dipenuhi

Demikian surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Menabung dalam SPP PNPM

**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PEDESAAN  
KECAMATAN TAMBAKBOYO – KABUPATEN TUBAN**

---

**BERITA ACARA  
KESANGGUPAN MENABUNG ANGGOTA KELOMPOK USULAN  
KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN**

Pada hari ini selasa tanggal 01 bulan Desember tahun 2010, bertempat di Dusun Jamong Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berdasarkan hasil musyawarah kelompok, kami bertanda tangan dibawah ini mewakili atas nama anggota kelompok menyatakan bahwa jika usulan kami disetujui dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) maka perguliran untuk didanai melalui PNPM Mandiri, kami sepakat dan sanggup untuk menabung kepada kelompok sebesar Rp. 5.000, 00 per Rp. 1.000.000, 00 dari luar pinjaman.

Kegiatan menabung diatas akan direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh PNPM Mandiri melalui MAD melakukan penetapan usulan. Jika kegiatan menabung tersebut tidak dapat direalisasikan paling lambat satu hari sebelum pencairan dana pinjaman, kami menyadari dan bersedia menerima sanksi berupa pemutusan atau penghentian bantuan dan PNPM mandiri untuk kelompok kami.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar- benarnya dan atas dasar musyawarah kelompok agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sobontoro, 01 Desember 2010



LAMPIRAN 10. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)

**PNPM MANDIRI PERDESAAN  
KECAMATAN TAMBAKBOYO – KABUPATEN TUBAN  
Sekretariat: Jl. Sobontoro No 05, Tambakboyo, Telp (0356) 411388**

---

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)**

Nomor : 08/ SPPB/ TBY/ X/ 2009

Tanggal : 10 Nopember 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

I. Nama : **Muzakin Siswo Prayitno, S. Pd**  
Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 12 Oktober 2009 bertindak atas nama Forum selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

II. Nama : **Drs. Sarkijo**  
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa yang dilaksanakan tanggal 24 April 2009 ditunjuk selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM – MP selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Dengan ini menyepakati hal- hal sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama, menyetujui pembayaran dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 150.353.800,00
- 2) Dana ini disetujui untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
  - a. Nama Kegiatan : Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  
Jumlah Dana : Rp. 30.000.000,00  
Jasa Pinjaman : 18 %  
Sifat Bantuan : **Pinjaman**
  - b. Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana Umum (Saluran Air)  
Jumlah Dana : Rp. 112.836.500,00  
Sifat Bantuan : **Bantuan Lepas**  
Waktu Penyelesaian : 2 (dua) bulan
    - a. Biaya administrasi dan operasional UPK 2 % sebesar Rp. 3.006.900,00
    - b. Biaya administrasi dan operasional TPK 3 % sebesar Rp. 4.510.400,00
- 3) Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan mengembalikan dan bantuan yang bersifat pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak penyerahan dana kepada Pihak Kedua oleh Pihak

Pertama. Pengembalian oleh Pihak Kedua disertai jasa pinjaman sebesar 18 % per tahun. Jumlah keseluruhan dana yang harus dikembalikan Pihak Kedua sampai selesai jangka waktu pinjaman adalah sebesar Rp. 35.400.000,00.

**Dalam hal ini Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, kesempatan Pihak Kedua untuk mendapatkan dana Bantuan PNPM – MP dimasa yang akan datang akan hilang.**

- 4) Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan memelihara prasarana dan sarana melalui swadaya masyarakat dengan sebaik- baiknya
- 5) Pihak Kedua akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) atas penyerahan dana tersebut harus dibuat Berita Acara Serah Terima atau tanda terima.
- 6) Pihak Kedua wajib menyalurkan SPPB ini melalui papan pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum di desa. Rincian teknisnya akan diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM – MP

Pihak Pertama  
Ketua UPK  
Kec. Tambakboyo

(Muzakin Siswo, S.Pd)

PJOK Kec Tambakboyo

Zainal Abidin, S.Sos

Pihak Kedua  
Ketua TPK  
Desa Sobontoro

(Drs. Sarkijo)

Kepala Desa Sobontoro

Achmad Nur Cholis

Mengetahui,

Camat Tambakboyo

Drs. M. Mahmud M. Si

Lampiran SPPB :

1. Proposal atau usulan desa dengan RAB & Rekap RAB
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan atau jadwal pengembalian kelompok SPP

LAMPIRAN 11. Foto Proses Pencairan Dana SPP PNPM Desa Sobontoro



Pendataan dan penjelasan bagi anggota yang menerima pinjaman dana bantuan usaha SPP PNPM Mandiri di desa Sobontoro (Sumber: data sekunder, 2011)



Salah satu anggota menerima dana bantuan usaha SPP PNPM Mandiri di desa Sobontoro (Sumber: data sekunder, 2011)

LAMPIRAN 12. Foto Proses Monitoring dan Evaluasi SPP PNPM Mandiri Desa  
Sobontoro



Pembayaran Ketua Kelompok SPP kepada UPK Kecamatan (Sumber: data primer, 2011)



Penyerahan Uang Angsuran dari Bendahara Kelompok ke Ketua Kelompok SPP  
(Sumber: data primer, 2011)

LANJUTAN LAMPIRAN 12. Foto Proses Monitoring dan Evaluasi SPP PNPM  
Mandiri Desa Sobontoro



Pembayaran Kredit Bantuan Usaha SPP Anggota Melalui PKK (Sumber: data primer, 2011)



Anggota SPP Sedang Mengikuti Tahlilan Rutin yang Menjadi Wadah Organisasi dari Kegiatan SPP (Sumber: data primer, 2011)

LAMPIRAN 13. Kegiatan Aktivitas Produktif dan Reproduksi Perempuan Anggota SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro



(a.)



(b.)



(c.)



(d.)

Kegiatan Produktif ditunjukkan pada gambar (a.) menaman padi yang dilakukan oleh perempuan, dan Kegiatan Reproduksi pada gambar (b.), (c.), dan (d.) memasak, menyetrika, dan merawat anak. (Sumber: data primer, 2011)

LAMPIRAN 14. Usaha Anggota SPP PNPM Mandiri Desa Sobontoro



Usaha Anggota SPP PNPM Mandiri berupa Perdagangan (Sumber: data Primer, 2011)



Usaha Anggota SPP PNPM Mandiri berupa menjahit (Sumber: data primer, 2011)

LANJUTAN LAMPIRAN 14. Usaha Anggota SPP PNPM Mandiri Desa  
Sobontoro



Usaha Anggota SPP PNPM Mandiri berupa Penjualan Ikan (Sumber: data Primer, 2011)



Usaha Anggota SPP PNPM Mandiri berupa Usaha Pertanian (Sumber: data  
Primer, 2011)





**Lanjutan Lampiran 15.** Aspek Aktivitas Antara Perempuan (Istri) dan Laki – laki (Suami) dalam Proyek Simpan Pinjam Perempuan

No	Jenis Pekerjaan	SEBELUM						SESUDAH					
		Perempuan (Istri)		Laki- Laki (Suami)		Bersama (Suami + Istri)		Perempuan (Istri)		Laki- Laki (Suami)		Bersama (Suami + Istri)	
		Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
	<b>B. Aktivitas Reproduksi</b>												
	a. Mengambil air	41	59.42	12	17.39	16	23.19	21	30.43	20	28.99	28	40.58
	b. Penyiapan makanan	52	75.36	1	1.45	16	23.19	52	75.36	1	1.45	16	23.19
	c. Menjaga anak	48	69.57	8	11.59	13	18.84	40	57.97	11	15.94	18	26.09
	d. Membersihkan rumah	49	71.01	1	1.45	19	27.54	49	71.01	1	1.45	19	27.54
	e. Belanja	60	86.96	1	1.45	8	11.59	58	84.06	1	1.45	10	14.49
	f. Memperbaiki rumah dan perabot	9	13.04	58	84.06	2	2.90	9	13.04	47	68.12	13	18.84
	g. Mengelola keuangan Rumah Tangga	63	91.30	1	1.45	5	7.25	65	94.20	1	1.45	3	4.35
	<b>C. Aktivitas Sosial</b>												
	a. Mengikuti rapat ditingkat RT, RW, desa.	12	17.39	48	69.57	9	13.04	69	100	0	0	0	0
	b. Terlibat dalam organisasi ditingkat desa	12	17.39	33	47.83	24	34.78	69	100	0	0	0	0
	c. Terlibat dalam kegiatan- kegiatan kerohanian	23	33.33	23	33.33	24	34.78	69	100	0	0	0	0
	d. Ikut terlibat dalam penyampaian pendapat baik di rapat- rapat maupun dalam kegiatan kerohanian	12	17.39	46	66.67	11	15.94	69	100	0	0	0	0
	e. Ikut terlibat dalam kegiatan- kegiatan gotong- royong dan arisan	26	37.68	27	39.13	16	23.19	69	100	0	0	0	0



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

**Pedoman Wawancara Penelitian (*Key Informan*)**  
**Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Jati Diri Melalui Proyek**  
**Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan**  
**Masyarakat Mandiri (PNPM- Mandiri) Di Pesisir Pantai Utara Kota Tuban**

**Data Responden:**

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. Alamat : \_\_\_\_\_
3. Umur : \_\_\_\_\_
4. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
  - a. Utama : \_\_\_\_\_
  - b. Sampingan : \_\_\_\_\_
5. Pekerjaan Suami : \_\_\_\_\_
  - a. Utama : \_\_\_\_\_
  - b. Sampingan : \_\_\_\_\_
6. Pendidikan : \_\_\_\_\_
  - a. Formal : \_\_\_\_\_
  - b. Non Formal : \_\_\_\_\_
7. Luas Pekarangan : \_\_\_\_\_
8. Status Dalam SPP/ Desa : \_\_\_\_\_

**I. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas sebagai Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo ini?
2. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo ini?
3. Bagaimana proses perencanaannya?
4. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pihak Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan ini?
5. Apakah ada keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan berkaitan dengan PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo ini?

6. Siapa saja pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo ini?
7. Bagaimana pendapat anda tentang adanya program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo?
8. Menurut yang anda ketahui, apa yang menjadi tujuan program SPP dan sasaran apa yang hendak dicapai?
9. Siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan SPP di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo tersebut?
10. Bagaimana bentuk dukungan pihak Kecamatan atas pelaksanaan SPP di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo?
11. Kira-kira apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program SPP di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo tersebut?
12. Apakah seluruh perempuan di desa tersebut telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan terutama pada program SPP?
13. Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam program SPP di desa tersebut?
14. Apakah setelah dilaksanakannya PNPM Mandiri pedesaan terutama program SPP telah meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, terutama terhadap meningkatnya derajat perempuan dan jati diri perempuan?
15. Apakah di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo masih terdapat kasus gender antara laki-laki dengan perempuan?
16. Secara umum, apakah pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo telah berjalan dengan baik? Bagaimana dengan program SPP?

## II. Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kecamatan merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian serta bimbingan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan. Pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimana pendapat anda mengenai PNPM Mandiri Pedesaan?
2. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari PNPM Mandiri Pedesaan menurut yang anda ketahui?
3. Sebagai pendamping masyarakat dalam PNPM Mandiri Pedesaan, kegiatan apa saja yang telah anda lakukan bersama masyarakat berkaitan dengan PNPM ini?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan SPP di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo?
5. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat (perempuan) baik dalam perencanaan sampai pelaksanaan program SPP di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo?
6. Kendala apa yang menghalangi perempuan untuk ikut aktif dalam program SPP di desa tersebut?
7. Bagaimanakah proses pengambilan keputusan dalam program SPP di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo?
8. Apakah ada keluhan dari masyarakat (perempuan) mengenai adanya program SPP di Desa tersebut?
9. Menurut pengamatan anda, sejauh ini manfaat apa yang telah diperoleh masyarakat (perempuan) berkaitan dengan program SPP di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo?
10. Bagaimana cara anda untuk mengajak masyarakat terutama perempuan agar mau berpartisipasi dalam Program SPP tersebut?
11. Menurut yang anda ketahui, apakah masih ada terdapat kasus gender di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo?

### III. Ketua Tim Pelaksana

Ketua Tim Pelaksana merupakan orang yang ditugaskan sebagai ketua untuk pelaksanaan program-program yang telah dirancang dan disetujui bersama dalam PNPM Mandiri Pedesaan. Pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimana pendapat anda tentang PNPM Mandiri Pedesaan?
2. Menurut yang anda ketahui, apa yang menjadi tujuan dari PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan ini?
3. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut?
4. Apa yang anda ketahui mengenai program SPP?
5. Bagaimana pelaksanaan program SPP di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo? Apa saja yang anda ketahui?
6. Sejauh ini bagaimanakah pelaksanaannya? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat?
7. Bagaimanakah keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan program SPP?
8. Apakah dalam pelaksanaannya, seluruh perempuan yang menjadi anggota SPP berperan dan terlibat secara aktif?
9. Apakah ada keluhan yang pernah terjadi dari masyarakat (perempuan) atas program SPP ini?
10. Apakah ada pengawasan dalam program SPP di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo? Siapa yang melakukan pengawasan tersebut?
11. Apakah pernah terjadi ketimpangan peran antara perempuan dengan laki-laki dalam PNPM Mandiri Pedesaan?

#### IV. Kepala Desa

Kepala Desa berperan sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di desa. Pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimana pendapat anda mengenai PNPM Mandiri Pedesaan?
2. Menurut yang anda ketahui, bagaimana tahapan dari PNPM Mandiri Pedesaan?
3. Apakah dalam pengambilan keputusan terkait dengan PNPM Mandiri Pedesaan, masyarakat dilibatkan secara aktif?
4. Apa yang anda ketahui mengenai program SPP? Bagaimana tanggapan anda?
5. Apakah pelaksanaan program SPP di Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo berjalan dengan baik?
6. Apa sajakah yang menjadi kendala yang dihadapi dalam program SPP ini?
7. Apakah masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dalam program SPP ini?
8. Apakah seluruh perempuan berperan aktif dalam program SPP ini? Bagaimana bentuk peranan mereka?
9. Masih adakah isu gender di desa ini yang menghambat peran aktif perempuan dalam pembangunan?
10. Penguatan seperti apa yang telah dilakukan untuk memberdayakan masyarakat terutama perempuan?
11. Apakah pernah terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam program SPP ini?
12. Siapa yang melakukan pengawasan atas program SPP ini?
13. Sasaran-sasaran apa yang telah diperoleh terkait dengan program SPP ini?



## V. Masyarakat Desa

Masyarakat desa merupakan pihak yang akan diberdayakan dan hasil dari PNPM Mandiri Pedesaan. Pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimana pendapat anda mengenai PNPM Mandiri?
2. Apakah anda mengerti bagaimana pelaksanaan PNPM MP dan apa tujuannya?
3. Apa yang anda pahami mengenai program SPP?
4. Apakah anda terlibat didalamnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya?
5. Apakah program SPP yang berjalan sekarang sesuai dengan yang anda harapkan?
6. Manfaat apa yang anda rasakan dengan adanya program SPP ini?
7. Apakah urusan rumah tangga yang anda jalani menghalangi anda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan SPP ini?
8. Apakah pemerintah (pihak Kecamatan) pernah mengundang anda untuk membahas tentang PNPM Mandiri Pedesaan maupun program SPP?
9. Kegiatan apa saja yang pernah dilakukan berkaitan dengan program SPP ini?
10. Apakah keluarga anda (suami) mendukung anda untuk ikut dalam program SPP ini? Atau hanya sebagai suatu keharusan karena program ini berasal dari pemerintah?
11. Pernahkah pihak kecamatan terjun langsung kelapangan untuk melihat perkembangan kegiatan yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan program SPP ini?
12. Adakah perbedaan taraf hidup yang anda alami setelah adanya program SPP ini?
13. Menurut Bpk/ Ibu bertujuan untuk apakah diadakan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini diselenggarakan?
14. Adakah kriteria atau syarat khusus bagi desa yang mendapatkan dana bantuan peminjaman modal usaha dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?

15. Adakah kriteria atau syarat khusus bagi perempuan yang mendapatkan dana bantuan peminjaman modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?
16. Melalui prosedur dan langkah apa sajakah agar dana bantuan peminjaman modal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri dapat tersalurkan ketangan masyarakat yang membutuhkan?
17. Bagaimanakah alur atau proses dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?
18. Sebelum dilaksanakan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri apakah diadakan sosialisasi terlebih dahulu? Jika iya, dari siapa sosialisasi tersebut? Dan apa tujuan, manfaat, serta berupa apa sosialisasi tersebut?
19. Diikuti oleh siapa sajakah proses sosialisasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri? Adakah perempuan disana? Jika ada selaku apakah perempuan disana?
20. Setelah diadakan sosialisasi adakah musyawarah yang dilakukan untuk membahas program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri secara lanjut? Jika ada musyawarah tersebut, apa tujuan, manfaat, serta musyawarah apa sajakah itu?
21. Diikuti oleh siapa sajakah musyawarah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri? Adakah perempuan disana? Jika ada selaku apakah perempuan disana?
22. Perencanaan seperti apa sajakah yang dibutuhkan dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?
23. Bagaimana proses pelaksanaan dari dana bantuan peminjaman modal usaha Simpan Pinjam Perempuan? Dan seperti apa penyaluran dana peminjaman modal usaha tersebut?
24. Adakah kendala dalam proses pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan peminjaman modal usaha Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri?
25. Setelah dilaksanakan pelaksanaan dan penyaluran dana pinjaman usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ini ada kah pelestarian dari

program PNPM Mandiri? Jika ada bagaimana proses pelestarian dari program tersebut?

26. Apa tujuan dan manfaat dari pelestarian program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri bagi desa dan perempuan yang mendapatkan dana pinjaman usaha?
27. Adakah pengawasan dari jalannya program dan penyaluran dana pinjaman usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?
28. Adakah kendala dalam pengawasan program dan penyaluran dana pinjaman usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?
29. Berapa kali diadakan pengawasan atau kontrol dari pihak desa atau kecamatan pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?
30. Dalam bentuk apakah pengawasan dan kontrol dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?
31. Adakah kendala yang dialami dalam proses pengawasan dan kontrol dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?
32. Apa tujuan dan manfaat dari diadakannya proses pengawasan dan kontrol dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri?
33. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat disini sehubungan dengan perubahan ini?
34. Apakah harapan Bpk/ Ibu untuk desa dan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri ke depan?

## **VI. Peran Produktif**

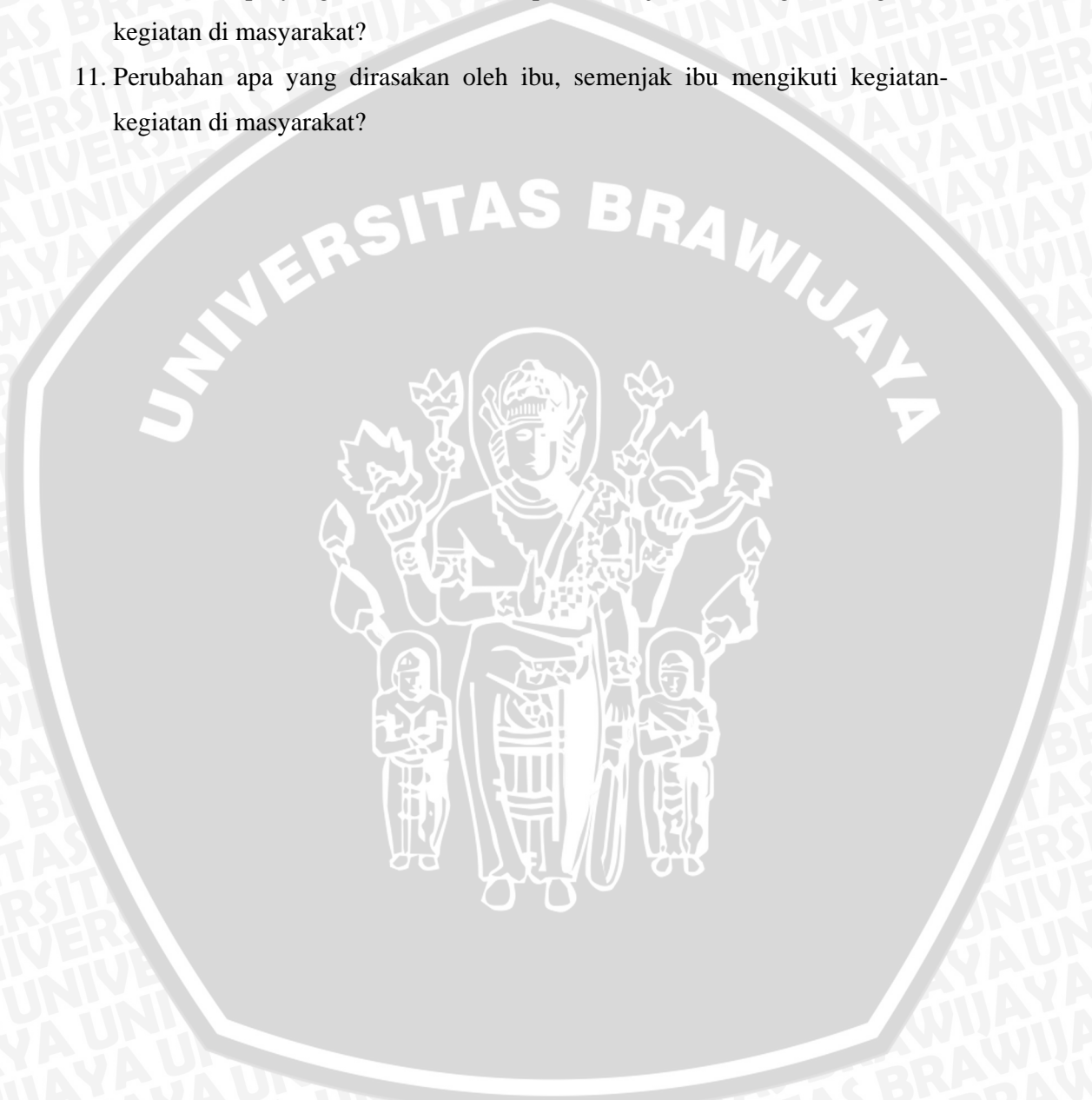
1. Apa kegiatan sehari-hari dari bapak/ ibu yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan nelayan, pertanian, dan perdagangan.
2. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh ibu- ibu sehari-hari? (dulu, sekarang)
3. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh bapak sehari-hari? (dulu, sekarang)
4. Mengapa ibu mau ikut dalam pemberdayaan SPP?
5. Mengapa ibu mau bekerja sebagai pedagang ikan, menggarap sawah, dan berjualan/ berdagang?

6. Berapa pendapatan sehari- hari yang diperoleh dari pekerjaan Bapak/ Ibu?  
(dulu, sekarang)
7. Dimanfaatkan untuk apasajakah penghasilan yang diperoleh? (dulu, sekarang)
8. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang diambil dalam rumah tangga?  
(dulu, sekarang)
9. Siapakah yang peran dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga?  
(dulu, sekarang)
10. Apa tanggapan bapak mempunyai isteri yang ikut bekerja untuk menambah penghasilan?
11. Apa alasan bapak membiarkan isteri bapak untuk bekerja menambah penghasilan?
12. Apa pendapat ibu mengenai peran yang dijalankan oleh ibu untuk bekerja menambah penghasilan dan bekerja mengurus rumah?
13. Perubahan apa yang dirasakan oleh ibu semenjak ibu mengikuti pelatihan SPP dan bekerja menambah penghasilan?
14. Perubahan apa yang dirasakan bapak semenjak ibu mengikuti pelatihan dan bekerja untuk menambah penghasilan?

## **VII. Peran Sosial**

1. Kegiatan apa yang dilakukan pada waktu luang bapak/ ibu? (dulu, sekarang)
2. Apakah bapak/ ibu ikut serta dalam kegiatan- kegiatan warga? (dulu, sekarang)
3. Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk kegiatan- kegiatan dirumah dan luar rumah?
4. Pelatihan apa yang sudah pernah bapak/ ibu ikuti sehubungan dengan pekerjaan nelayan, petani, dan pedangang?
5. Apakah ibu bebas melakukan kegiatan- kegiatan di masyarakat? (dulu, sekarang)
6. Apakah ibu ikut mengambil keputusan- keputusan dalam rapat yang ibu ikuti?  
(dulu, sekarang)
7. Apakah ibu menjadi salah satu pengurus organisasi di desa? (dulu, sekarang)
8. Mengapa bapak/ ibu mengikuti kegiatan- kegiatan kemasyarakatan?

9. Manfaat apa yang bapak/ ibu rasakan dengan mengikuti kegiatan- kegiatan tersebut?
10. Perubahan apa yang dirasakan oleh bapak semenjak ibu mengikuti kegiatan- kegiatan di masyarakat?
11. Perubahan apa yang dirasakan oleh ibu, semenjak ibu mengikuti kegiatan- kegiatan di masyarakat?



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

